

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SEKTOR EKONOMI

(Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota
Malang)

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

MOCH. ZAINAL MUSTOFA
NIM. 135030100111006



Dosen Pembimbing:

Dr. Lely Indah Mindarti M.Si

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2017



MOTTO

“Melangkah atas ridho orang tua”

(Moch. Zainal Mustofa)



LEMBAR PERSEMBAHAN

**Untuk Ibuku Tercinta dan Tersayang
Siti Asiyah**

**Untuk Adikku Tercinta dan Tersayang
Safiratul Dwi Sastya**

Untuk Seluruh Keluargaku



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pemberdayaan Perempuan Sektor Ekonomi (Studi pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang)

Disusun oleh : Moch. Zainal Mustofa

NIM : 135030100111006

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Malang, 22 Juli 2017

Komisi Pembimbing



Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si

NIP. 19690524 200212 2 002

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

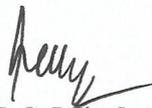
Hari : Selasa
Tanggal : 18 Juli 2017
Jam : 10.00 – 11.00 WIB
Skripsi atas nama : Moch. Zainal Mustofa
Judul : Pemberdayaan Perempuan Sektor Ekonomi (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Anggota



Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si
NIP. 19690524 200212 2 002



Dr. Mohammad Nuh, S.IP, M.Si
NIP. 19710828 200604 1 001

Anggota



Akhmad Amirudin, S.AP., M.AP
NIP. 19870426 201504 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 31 Mei 2017

Moch. Zainal Mustofa

NIM. 135030100111006

RINGKASAN

Moch. Zainal Mustofa, 2017, Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. **Pemberdayaan Perempuan Sektor Ekonomi (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang)**. Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si, 150 Halaman.

Pemberdayaan masyarakat sudah dilakukan di Kota Malang, namun masih ada permasalahan yaitu dari seluruh masyarakat yang bekerja, penduduk perempuan yang bekerja masih 40,8%, kekerasan terhadap perempuan terus meningkat, dan partisipasi perempuan dalam musrenbang tahun 2014 masih 26%. Berdasarkan permasalahan diatas perlu di analisis pemberdayaan perempuan yang dilakukan DP3AP2KB Kota Malang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif studi kasus dan analisis data spiral dari Creswell.

Hasil dari penelitian ini adalah pertama, DP3AP2KB Kota Malang dalam penentuan kriteria untuk seleksi lokasi tidak melibatkan masyarakat, dan ada beberapa kegiatan yang tidak melakukan seleksi lokasi karena lokasi pemberdayaan terpusat menjadi satu. Kedua, sosialisasi rencana kegiatan pemberdayaan sudah dilakukan, namun belum menyeluruh. Ketiga, pengkajian potensi wilayah berbarengan dengan kegiatan musrenbang kelurahan dan ada kajian potensi wilayah yang dilakukan DP3AP2KB berdasarkan data *base* yang sudah dibuat. Keempat, dalam penyusunan rencana kegiatan kelompok, masyarakat dan fasilitator dilibatkan hanya sebatas menyubangkan aspirasi.

Kelima, pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan sektor ekonomi menggunakan metode pelatihan partisipatif, partisipasi perempuan sudah baik, dan kegiatan dibantu oleh fasilitator, namun fasilitator hanya menjadi pemateri kegiatan. Keenam, dilakukannya pemantauan dari proses sampai hasil kegiatan pemberdayaan perempuan sektor ekonomi, pemantauan melalui kegiatan lomba dan secara informal yang dilakukan oleh pegawai internal tanpa melibatkan fasilitator dan masyarakat. Tahap terakhir adalah pemandirian masyarakat, DP3AP2KB belum mempunyai kegiatan berkelanjutan, dan pendampingan berkelanjutan hanya sebatas untuk mendapatkan modal. Di setiap tahapan kegiatan pemberdayaan perempuan sektor ekonomi ada faktor pendorong yaitu komitmen kepala dinas yang tinggi, sarana prasarana tersedia, partisipasi perempuan tinggi, lembaga eksternal yang antusias, dan faktor penghambat yaitu pegawai yang terbatas dan belum mempuni, minimnya akses pemasaran dinas, pasifnya perempuan, dan terbatasnya sumber daya manusia di lembaga eksternal.

Hal-hal yang perlu dilakukan oleh DP3AP2KB Kota Malang yaitu selalu melibatkan perempuan dalam seleksi lokasi dan membuat kegiatan pemberdayaan di lokasi berbeda berdasarkan potensi wilayah, memanfaatkan *website* pemerintah dan televisi dan radio untuk sosialisasi, melibatkan masyarakat dalam penyusunan rencana kegiatan, membentuk tim fasilitator di setiap kelurahan, membuat kegiatan yang berkelanjutan, dan berkoordinasi dengan lembaga lain yang terkait.

SUMMARY

Moch. Zainal Mustofa, 2017, Public Administration Science, Faculty of Administration Science, Brawijaya University. **Women Empowerment in Economic Sector (Study at Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Malang City)**. Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si, 150 Pages.

Community empowerment has been done in Malang, but there are still problems of all working people, 40.8% of working women, female violence continues to increase, and women's participation in musrenbang in 2014 is still 26%. Based on the above problems need to be analyzed women empowerment conducted DP3AP2KB Malang. This research uses descriptive research type with qualitative approach of case study and spiral data analysis from Creswell.

The result of this research is first, DP3AP2KB Malang in determining criteria for location selection does not involve society, and there are some activities that do not do location selection because location of centralized empowerment become one. Second, the socialization of empowerment activity plan has been done, but not yet comprehensive. Third, the assessment of the potential of the area coincided with the deliberation of village development plan activities and there is a potential study of the region conducted DP3AP2KB based on the data base that has been made. Fourth, in the formulation of the plan of group activities, the community and the facilitators are involved only to limited aspirations.

Fifth, the implementation of women's economic empowerment activities using participatory training methods, the participation of women is good, and activities are assisted by the facilitator, but the facilitator only becomes the speaker of the activity. Sixth, the monitoring of the process until the results of women's economic empowerment activities, monitoring through competition and informally conducted by internal staff without involving the facilitator and the community. The last stage is community self-reliance, DP3AP2KB has no sustainable activities, and sustainable assistance is limited to get capital. At each stage of women's empowerment activities in the economic sector, there are promotional factors: high commitment of heads service, available infrastructure, high women participation, enthusiastic external institutions, and inhibiting factors, limited and unemployed staff, lack of access to official marketing, female passivity, And limited human resources in external agencies.

The things that need to be done by DP3AP2KB Malang is always involve women in location selection and make empowerment activity in different location based on area potential, utilizing government website and television and radio for socialization, involving community in preparing activity plan, forming facilitator team in every kelurahan, Create sustainable persistence, and coordinate with other related institutions.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pemberdayaan Perempuan Sektor Ekonomi (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang)”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (SAP) pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini menyampaikan terima kasih yang sangat tulus kepada :

1. Siti Asiyah selaku Ibu saya
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi
3. Bapak Dr. Choirul Saleh, MS selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
4. Ibu Dr. Lely Indah Minarti, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik dan Dosen Pembimbing Skripsi
5. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Administrasi
6. Ibu Dra. Rr. Andayun S. A. MAP selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kota Malang
7. Ibu Wiwik Koesoemaningdijah, SKM. Selaku Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan DP3AP2KB Kota Malang

8. Ibu Dra. Maria Angela Dj. MSi selaku Kepala Seksi Edukasi dan Partisipasi Perempuan DP3AP2KB Kota Malang
9. Bapak Ayok selaku staf Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kota Malang
10. Seluruh Pegawai DP3AP2KB Kota Malang
11. Ibu Naimah, Ibu Mas'adah, Mbak Febri, Ibu Fella selaku masyarakat perempuan Kota Malang yang bersedia menjadi informan
12. Teman seperjuangan saya dikontrakan eman, riski, alvan, eko, ari, nafik, al, alan, shobah, dan ofa
13. Seluruh mahasiswa prodi administrasi publik 2013
14. Teman-teman RSC 2013 dan seluruh keluarga RSC
15. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis

Demikian laporan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat kami harapkan, semoga laporan skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 21 Juli 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL.....	i
MOTTO	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
TANDA PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR GRAFIK	xv
DAFTAR BAGAN.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Administrasi Publik.....	13
1. Pengertian Administrasi Publik.....	13
2. Paradigma Administrasi Publik.....	15
B. Administrasi Pembangunan.....	20
1. Pengertian Administrasi Pembangunan.....	20
2. Ruang Lingkup Administrasi Pembangunan.....	22
3. Pembangunan.....	23
C. Pemberdayaan Masyarakat	25
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat.....	25
2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat.....	26
3. Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat.....	27
4. Metode Pemberdayaan Masyarakat.....	30
5. Pemberdayaan Perempuan.....	32
a. Tujuan Pemberdayaan Perempuan.....	32
b. Program Pemberdayaan Perempuan.....	33
c. Tahapan Kegiatan Pemberdayaan.....	33
d. Indikator Pemberdayaan Perempuan.....	36
e. Fasilitator Pemberdayaan.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Fokus Penelitian.....	40
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	42
D. Sumber Data.....	42





E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Instrumen Penelitian.....	46
G. Metode Analisis Data.....	46
H. Keabsahan Data.....	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum.....	50
B. Penyajian Data.....	64
1. Pemberdayaan Perempuan Sektor Ekonomi.....	64
a. Seleksi Lokasi/Wilayah.....	64
b. Sosialisasi Pemberdayaan.....	70
c. Proses Pemberdayaan.....	78
1) Mengidentifikasi dan Mengkaji Potensi.....	78
2) Menyusun Rencana Kegiatan Kelompok.....	83
3) Menerapkan Rencana Kegiatan Kelompok.....	88
4) Memantau Proses dan Hasil.....	103
d. Pemandirian Masyarakat.....	106
2. Faktor Pendukung dan Penghambat.....	110
a. Faktor Pendukung.....	110
1) Internal.....	110
2) Eksternal.....	112
b. Faktor Penghambat.....	114
1) Internal.....	114
2) Eksternal.....	117
C. Analisis Data.....	119
1. Pemberdayaan Perempuan Sektor Ekonomi.....	119
a. Seleksi Lokasi/Wilayah.....	119
b. Sosialisasi Pemberdayaan.....	121
c. Proses Pemberdayaan.....	124
1) Mengidentifikasi dan Mengkaji Potensi.....	124
2) Menyusun Rencana Kegiatan Kelompok.....	126
3) Menerapkan Rencana Kegiatan Kelompok.....	128
4) Memantau Proses dan Hasil.....	132
d. Pemandirian Masyarakat.....	134
2. Faktor Pendukung dan Penghambat.....	136
a. Faktor Pendukung.....	136
1) Internal.....	136
2) Eksternal.....	137
b. Faktor Penghambat.....	139
1) Internal.....	139
2) Eksternal.....	140
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	142
B. Saran.....	145
DAFTAR PUSTAKA.....	147
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 8 Kota/Kabupaten Prov. Jawa Timur IPM Tertinggi Tahun 2015	4
Tabel 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2014-2015	5
Tabel 1.3 Status Pekerjaan Utama Kota Malang tahun 2014	7
Tabel 1.4 Penduduk yang Bekerja Berdasarkan Jenis Kelamin tahun 2014	7
Tabel 1.5 Kekerasan Perempuan dan Anak Kota Malang 2013-2016.....	8
Tabel 4.1 Jumlah RT, RW, dan Kelurahan setiap Kecamatan	50
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kota Malang.....	51
Tabel 4.3 PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan	63
Tabel 4.4 PNS Berdasarkan Pendidikan Formal	64
Tabel 4.5 Daftar Kegiatan Pemberdayaan Perempuan di Sektor Ekonomi.....	93



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Spiral Analisis Data 49

Gambar 4.1 Peta Kota Malang 52

Gambar 4.2 Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Masyarakat..... 73

Gambar 4.3 Dokumentasi Musrenbang Kelurahan 86

Gambar 4.4 Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Organisasi Perempuan 89

Gambar 4.5 Pelatihan Pengelolaan Sayur 90

Gambar 4.6 Pelatihan Public Speaking 91

Gambar 4.7 Pemilihan Perempuan Inspiratif..... 91

Gambar 4.8 Ruang Pertemuan atau Aula DP3AP2KB Kota Malang 111





DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 IPM Kota Malang 2010-2015 3



DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 Struktur Organisasi..... 54
Bagan 4.2 Tahapan Musrenbang Kota Malang 68
Bagan 4.3 Alur Kegiatan Pemberdayaan Perempuan di Sektor
Ekonomi 95



DAFTAR LAMPIRAN

Surat Pengantar Riset Fakultas..... 151
Surat Pengantar Riset Bangkesbangpol 152
Surat Balasan Riset DP3AP2KB Kota Malang..... 153
Interview Guide..... 154
Transkrip Wawamcara dan Koding 155



CURRICULUM VITAE

Nama : Moch. Zainal Mustofa



Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 25 Juli 1995

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Dsn. Paras RT.01 RW.01 Ds. Banjarejo Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri

Riwayat Pendidikan :

No.	Jenjang	Instansi	Tempat	Tahun
1.	Sekolah Dasar	SDN. Banjarejo	Kabupaten Kediri	2001-2007
2.	SMP	MTsN 2 Kediri	Kota Kediri	2007-2010
3.	SMA	MAN 3 Kediri	Kota Kediri	2010-2013
4.	Perguruan Tinggi	Universitas Brawijaya	Kota Malang	2013-2017



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem desentralisasi dalam menjalankan pemerintahan. Desentralisasi berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan “penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi”. Desentralisasi di Indonesia diterapkan mulai tahun 1999, hal itu berdasarkan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, sehingga memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur segala bidang pemerintahan, kecuali kewenangan mengurus 6 (enam) bidang pemerintahan yaitu politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Kewenangan bidang lain yang dimaksud berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ialah

“meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standardisasi nasional.”

Penerapan desentralisasi dimaksudkan untuk menjadikan pemerintah daerah untuk lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Diterapkannya sistem desentralisasi memunculkan adanya pemberian otonomi daerah kepada daerah otonom. Otonomi daerah merupakan kewenangan

Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999). Berdasarkan pengertian diatas dapat dimaknai bahwa, dengan adanya pemberian otonomi daerah, daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki dan aspirasi rakyat.

Adanya pemberian otonomi daerah kepada daerah otonom menjadikan daerah-daerah di Indonesia berlomba-lomba untuk melakukan pembangunan.

Pembangunan menurut Suryono (2004: 37) adalah

“upaya yang dilakukan secara terus-menerus dilakukan dengan tujuan menempatkan manusia pada posisi dan peranannya secara wajar yakni sebagai subjek dan objek pembangunan untuk mampu mengembangkan dan memberdayakan dirinya, sehingga keluar dapat berhubungan secara serasi, selaras dan dinamis, sedangkan ke dalam mampu menciptakan keseimbangan”.

Pengertian diatas menekankan bahwa pembangunan bertujuan untuk menempatkan manusia pada subjek maupun objek dalam pembangunan yang bisa mengembangkan dan memberdayakan diri sendiri. Sesuai dengan pengertian

didas di atas bahwa setiap daerah di Indonesia melakukan pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dan mengentaskan kemiskinan

daerah, dan menimbulkan perubahan dalam kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Hal ini sesuai juga dengan pernyataan Suryono (2010: 5) bahwa kegiatan

pembangunan akan “menimbulkan perubahan dalam tata kehidupan masyarakat”.

pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh UNDP (2000) yang dikutip Badan

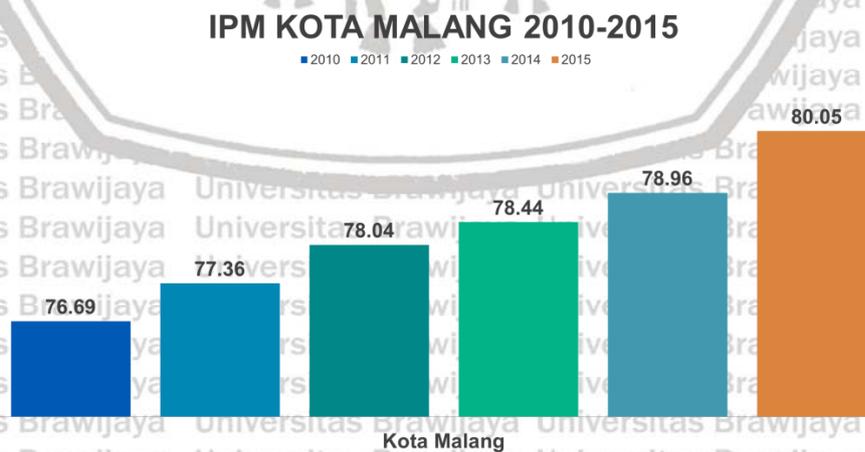
Pusat Statistik (2009 :3) bahwa pembangunan dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif.

Pembangunan di daerah dapat dikatakan berhasil salah satunya diukur berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini sesuai dengan pendapat Badan Pusat Statistika bahwa IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat) dan IPM menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah (bps.go.id).

Secara spesifik IPM digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup (bps 2009: 9). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yang saling dibandingkan yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar layak hidup (bps.go.id).

Kota Malang merupakan kota yang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) setiap tahunnya mengalami kenaikan dari tahun 2010-2015, berikut grafik IPM

Kota Malang tahun 2010-2015:



Grafik 1.1 IPM Kota Malang 2010-2015

Sumber: ipm.bps.go.id

IPM Kota Malang tahun 2010 sebesar 76.69, setiap tahunnya mengalami kenaikan sampai pada tahun 2015 IPM Kota Malang mencapai 80.05. Bahkan IPM Kota Malang pada tahun 2015 merupakan yang tertinggi di Jawa Timur, hal ini ini sesuai dengan tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 8 Kota/Kabupaten Prov. Jawa Timur IPM Tertinggi Tahun 2015

Wilayah	IPM
	2015
Jawa Timur	68.95
Kabupaten Sidoarjo	77.43
Kota Kediri	75.67
Kota Blitar	76
Kota Malang	80.05
Kota Mojokerto	75.54
Kota Madiun	79.48
Kota Surabaya	79.47

Sumber: Hasil olahan peneliti berdasarkan data jatim.bps.go.id

Berdasarkan tabel di atas bahwa Kota Malang merupakan kota yang mempunyai IPM tertinggi di Jawa Timur pada tahun 2015 yaitu sebesar 80.15, bahkan IPM tersebut lebih tinggi dari pada IPM Provinsi Jawa Timur yaitu 68.95. Jadi apabila dilihat dari IPM diatas, penduduk Kota Malang merupakan penduduk yang mempunyai umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar layak hidup yang tinggi apabila dibandingkan dengan kota dan kabupaten lain di Jawa Timur.

Kota Malang merupakan salah satu kota yang mempunyai jumlah penduduk yang besar, tahun 2016 penduduk Kota Malang sebesar 882.736 jiwa, yang terdiri dari 440.651 jiwa penduduk laki-laki dan 442.085 jiwa penduduk perempuan (Laporan Penduduk Dispendukcapil Kota Malang 2016). Tingginya IPM di Kota Malang dan banyaknya jumlah penduduk, namun tingkat

pengangguran terbuka masih menduduki peringkat 2 (dua) di Jawa Timur tahun 2014-2015. Hal ini sesuai dengan tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2014-2015

Wilayah	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	
	2014	2015
Jawa Timur	4.19	4.47
Kabupaten Pasuruan	4.43	6.41
Kabupaten Sidoarjo	3.88	6.3
Kabupaten Jombang	4.39	6.11
Kabupaten Madiun	3.38	6.99
Kabupaten Madiun	4.28	6.05
Kota Kediri	7.66	8.46
Kota Malang	7.22	7.28
Kota Surabaya	5.82	7.01

Sumber: Hasil olahan peneliti berdasarkan data Jatim.bps.go.id

Berdasarkan tabel 1.2 dari 8 (delapan) kota dan kabupaten yang mempunyai tingkat pengangguran terbuka tertinggi, Kota Malang menempati peringkat 2 (dua) pengangguran terbuka terbanyak dengan prosentase 7,22% dari jumlah penduduk pada tahun 2014 dan 7,28% dari jumlah penduduk pada tahun 2015, prosentasi tersebut lebih tinggi dari prosentasi pengangguran terbuka Provinsi Jawa Timur yang sebesar 4.19% dari jumlah penduduk tahun 2014 dan 4,47% dari jumlah penduduk 2015. Pengangguran terbuka Kota Malang juga mengalami kenaikan dari tahun 2014, tahun 2014 jumlah pengangguran sebesar 7,22% dan meningkat menjadi 7,28% tahun 2015.

Salah satu alternatif yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan pengangguran di atas, pemerintah Kota Malang melakukan kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat Kota Malang. Pemberdayaan menurut

Mardikanto dan Soebiato (2015: 100) merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat dengan dukungan dari pihak luar atau pemerintah maupun swasta ataupun tanpa dukungan dari pihak luar, untuk memperbaiki kehidupannya yang berbasis kepada daya mereka sendiri. Pengertian diatas dapat dimaknai bahwa dengan adanya pemberdayaan masyarakat di Kota Malang sehingga kehidupan ekonomi penduduk di Kota Malang bisa meningkat, karena masyarakat akan bisa mandiri.

Salah satu kegiatan pemberdayaan masyarakat di sektor ekonomi yang sudah dilaksanakan pemerintah Kota Malang berada di Kelurahan Lesanpuro. Di Kelurahan Lesanpuro dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pemberdayaan dilakukan dengan penyelenggaraan pelatihan ketrampilan, selain itu juga ada pemberian dana hibah untuk mengembangkan UMKM di Kelurahan Lesanpuro. (Ernawan: 2016). Adanya pemberdayaan masyarakat bertujuan agar masyarakat setelah adanya pemberdayaan bisa meningkatkan ketrampilan, menciptakan dan mengembangkan usaha, baik dalam skala mikro, kecil maupun menengah, mengingat jumlah lowongan pekerjaan yang terbatas dan tidak cukup untuk menampung angkatan kerja di Kota Malang. Hal ini berdasarkan pernyataan dari Handoko selaku Kepala Seksi Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Kota Malang, sebagai berikut “potensi lapangan pekerjaan di Malang masih kurang untuk menampung semua angkatan kerja” (radarmalang.jawapos.com).

Selain itu adanya pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan jumlah penduduk Kota Malang yang dengan status pekerjaan

berusaha sendiri, karena penduduk Kota Malang yang termasuk angkatan kerja di dominasi yang bekerja menjadi buruh/karyawan/pegawai, hal ini berdasarkan tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3 Status Pekerjaan Utama Kota Malang tahun 2014

Status Pekerjaan Utama	Jumlah Tenaga Kerja
Berusaha sendiri	80.230
Berusaha dibantu buruh tidak tetap /tak dibayar	21.447
Berusaha dibantu buruh tetap	12.582
Buruh/Karyawan/Pegawai	242.967
Pekerja bebas di pertanian	1.762
Pekerja bebas di non pertanian	15.089
Pekerja keluarga/tak dibayar	18.973
Jumlah	393.050

Sumber: malangkota.bps.go.id

Apabila dilihat dari jumlah penduduk Kota Malang yang lebih banyak perempuan, seharusnya dengan adanya pemberdayaan masyarakat bisa meningkatkan jumlah penduduk perempuan yang bekerja dari pada laki-laki, namun penduduk yang bekerja masih besar atau dominan penduduk laki-laki, hal ini berdasarkan tabel 1.4 berikut:

Tabel 1.4 Penduduk yang Bekerja Berdasarkan Jenis Kelamin tahun 2014

Jenis Kelamin	Jumlah yang bekerja	Prosentase (Persen)
Laki-laki	232.735	59,2%
Perempuan	160.305	40,8%
Jumlah	393.040	100%

Sumber: Hasil olahan peneliti berdasarkan data dari malangkota.bps.go.id

Berdasarkan tabel 1.4 diatas, jumlah penduduk yang bekerja masih di didominasi oleh penduduk laki laki sebesar 59,2% dan penduduk perempuan yang bekerja hanya 40,8% dari seluruh jumlah angkatan kerja penduduk Kota Malang, jadi kurang dari 50% penduduk perempuan yang bekerja. Selain itu adanya pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi seharusnya bisa menurunkan angka

kekerasan terhadap perempuan dan anak, karena menurut Sekretaris Deputi

Pemberdayaan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak (PPA) RI, Ibu Niken bahwa

“untuk terus memerangi segala bentuk kekerasan gender, diantaranya dengan pemberdayaan ekonomi rumahan. Karena Kekerasan salah satunya disebabkan kemiskinan dan IPM (indeks Pembangunan Manusia) rendah salah satunya diebakkan karena ekonomi perempuan masih rendah (Humas.malangkota.go.id).

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa kekerasan perempuan bisa atasi dengan

kegiatan pemberdayaan ekonomi, kerena kekerasan disebabkan oleh kemiskinan

atau ekonomi perempuan yang rendah. Namun adanya pemberdayaan perempuan

di Kota Malang belum memberikan dampak yang positif, hal ini dapat di lihat dari

angka kekerasan perempuan yang setiap tahun mengalami kenaikan dari tahun

2013 sebanyak 20 laporan sampai 2016 sebanyak 32 laporan, berikut angka

kekerasan perempuan di Kota Malang dari tahun 2013-2017 bulan april:

Tabel 1.5 Kekerasan Perempuan dan Anak Kota Malang 2013-2016

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017 sampai April
Jumlah Kekerasan	20 Laporan	29 Laporan	29 Laporan	32 Laporan	7 Laporan

Sumber: nasional.republika.co.id dan suryamalang.tribunnews.com

Selain itu adanya pemberdayaan seharusnya bisa meningkatkan

partisipasi masyarakat perempuan dalam pembangunan, namun partisipasi

perempuan dalam kegiatan musrenbang pada tahun 2014 belum bisa memenuhi

target kehadiran yaitu 30%, hanya 26% masyarakat perempuan yang ikut

berpartisipasi dalam kegiatan musrenbang (LAKIP Kota Malang 2014).

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan diatas, sehingga peneliti tertarik

untuk menganalisis pemberdayaan kepada penduduk perempuan Kota Malang,

sehingga peneliti mengambil judul “Pemberdayaan Perempuan sektor Ekonomi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemberdayaan perempuan sektor Ekonomi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang?
2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam Pemberdayaan Perempuan sektor Ekonomi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis pemberdayaan perempuan sektor Ekonomi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang yang dilihat dari setiap tahapan kegiatan pemberdayaan perempuan.
2. Mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam setiap tahapan kegiatan pemberdayaan perempuan sektor

Ekonomi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis maupun praktis bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun manfaat yang diharapkan yaitu:

1. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan bagi peneliti dan dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya dalam hal penerapan maupun pengembangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang untuk melakukan pemberdayaan perempuan sektor ekonomi di Kota Malang.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat khususnya perempuan di Kota Malang untuk mendukung pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
(DP3AP2KB) Kota Malang.

E. Sitematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran secara keseluruhan dalam penelitian ini, berikut sistematika penulisan dalam penelitian ini yang terdiri dari 5 (lima) bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I memaparkan mengenai gambaran latar belakang masalah dalam penelitian, selain itu juga memaparkan mengenai rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian, serta di paparkan juga mengenai manfaat dilakukan penelitian dan sistematika penulisan dalam skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II dalam skripsi ini membahas landasan teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian, untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Teori dan konsep yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah administrasi publik, administrasi pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III memaparkan mengenai metode apa yang dipakai dalam penelitian. Di bab ini membahas mengenai jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, metode analisis data, dan uji keabsahan data yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV disini memaparkan dan membahas dari hasil penelitian yang dilakukan.

Bab ini membahas mengenai gambaran umum Kota Malang dan lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data.

BAB V PENUTUP

Bab V memaparkan mengenai kesimpulan dalam penelitian ini dan saran atau rekomendasi yang diberikan oleh peneliti untuk memperbaiki atau meningkatkan pemberdayaan perempuan di Kota Malang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

1. Pengertian Administrasi Publik

Banyak ahli yang mendefinisikan mengenai administrasi publik, salah satunya Dimock dan Dimock. Dimock dan Dimock (1992:21-22) menyatakan bahwa administrasi publik ialah “aktivitas-aktivitas negara dalam melaksanakan kekuasaan politiknya”, lebih lanjut dijelaskan dalam arti yang sempit administrasi publik merupakan “aktivitas-aktivitas badan-badan eksekutif dan kehakiman, atau khususnya aktivitas-aktivitas badan eksekutif saja, dalam melaksanakan pemerintahan”. Pengertian diatas dapat diartikan bahwa administrasi publik segala sesuatu aktivitas yang dilakukan oleh eksekutif dalam menjalankan pemerintahan atau kekuasaan politik yang dimiliki.

Pendapat yang sama serupa dikemukakan oleh menurut Thoha (2008: 67) bahwa administrasi publik dapat diartikan sebagai “administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh aparat pemerintah untuk kepentingan masyarakat”. Pengertian diatas dapat diartikan bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh aparat pemerintah harus untuk melayani kepentingan masyarakat. Jadi kekuasaan yang dimiliki oleh aparat pemerintah harus digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Pernyataan lebih sempit dikemukakan oleh Keban (2004: 3) dengan mengutip pendapat dari Chandler dan Plano bahwa administrasi publik ialah

“proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik”. Pengertian diatas dapat dimaknai bahwa administrasi publik merupakan suatu proses sumber daya dan aparatur pemerintah yang diorganisir dan dikordinasikan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi di dalam publik atau masyarakat melalui kebijakan publik. Jadi administrasi publik mempunyai tujuan untuk memecahkan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di publik atau masyarakat.

Tidak hanya aparatur pemerintah yang menjalankan pemerintahan melainkan ada kerjasama dari berbagai aktor. Hal ini dikemukakan oleh Pasalong (2013: 8) bahwa administrasi publik merupakan “kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif”. Pengertian diatas dapat dimaknai bahwa dalam menjalankan tugas pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan publik yang efektif dan efisien ada kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dengan beberapa lembaga atau sekelompok orang diluar aparatur pemerintah. Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan aktivitas-aktivitas yang diorganisir dan dikordinasikan antara pemerintah bekerjasama dengan lembaga dalam menjalankan pemerintahan yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

2. Paradigma Administrasi Publik

Paradigma administrasi publik berdasarkan beberapa ahli mempunyai pandangan yang berbeda beda. Menurut Henry (1975: 378-386) menyatakan bahwa paradigma administrasi publik terdiri dari 5 (lima) paradigma, diantaranya:

a. *The Politics/administration dichotomy* (1900-1926)

Henry menjelaskan dengan mengutip pendapat Goodnow (1900) yang menjelaskan bahwa pemerintah mempunyai 2 (dua) fungsi yang berbeda yaitu politik dan administrasi. Politik berhubungan dengan kebijakan atau sikap dari negara, sedangkan administrasi berhubungan dengan pelaksanaan dari kebijakan tersebut, sehingga lokus administrasi publik harus berpusat pada birokrasi pemerintah. Pernyataan diatas yang menjadi dasar paradigma pertama ini, yang menekankan dimana politik tidak mengganggu administrasi publik, sehingga administrasi publik bisa bebas nilai, karena tugas administrasi adalah ekonomi dan efisiensi.

b. *The Principles of Administration* (1927-1937)

Paradigma 2 (dua) ini memandang bahwa prinsip-prinsip administrasi publik dapat diberlakukan dimanapun atau *universal* pada organisasi apapun. Menurut Gulick dan Urwick ada 7 (tujuh) prinsip administrasi yang bisa diberlakukan dimanapun yaitu POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting dan Budgeting*).

c. *Public Administration as political science* (1950-1970)

Paradigma 3 (tiga) ini mengkritik paradigma 1 (satu) dan 2 (dua), bahwa dikotomi atau pemisahan antara politik dan administrasi merupakan suatu hal yang tidak realistis dan prinsip-prinsip administrasi tidak bisa diberlakukan *universal* atau tidak bisa dilakukan di setiap organisasi. Kritik tersebut melahirkan paradigma 3 (tiga) bahwa administrasi publik sebagai ilmu politik, administrasi kembali dalam lingkungan ilmu politik, namun keduanya mempunyai lokus dan fokus yang berbeda. Fokus ilmu politik lebih pada masalah-masalah proses penyusunan kebijakan dalam fokus eksternal, sedangkan administrasi lebih berfokus pada proses penyusunan kebijakan dalam internal atau dalam tubuh birokrasi.

d. *Public Administration as administrative Science* (1956-1970)

Paradigma 4 (empat) berfokus pada perkembangan ilmu perilaku dalam administrasi publik yang didorong oleh kembalinya administrasi publik kedalam ilmu politik. Perkembangan ilmu perilaku terbagi menjadi 2 (dua) jalur yaitu teori organisasi dan ilmu manajemen. Perkembangan fokus tersebut juga berpengaruh terhadap lokus administrasi publik yang mengangkut kepentingan umum, sehingga administrasi negara juga menyentuh administrasi bisnis.

e. *Public Administration As Public Administration* (1970-?)

Lokus dari paradigma ini ialah segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah-masalah, urusan publik, dan kepentingan-kepentingan publik.

Paradigma ini berfokus pada teori organisasi, ilmu manajemen dan kebijakan publik.

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Frederickson (dalam Sedarmayanti 2010:7), bahwa paradigma administrasi negara meliputi 6 (enam) paradigma diantaranya:

a. Birokrasi Klasik

Penekanan paradigma ini untuk mewujudkan nilai pokok yaitu efektivitas, efisiensi ekonomi, dan rasionalitas. Paradigma pertama ini memfokuskan pada pengamatan terhadap struktur organisasi dan fungsi atau prinsip manajemen pada berbagai jenis organisasi pemerintahan maupun bisnis.

b. Birokrasi Neo Klasik

Paradigma kedua ini mempunyai nilai pokok yang sama dengan paradigma pertama, namun mempunyai fokus dan lokus yang berbeda. Fokus paradigma ini pada proses pengambilan keputusan pada keputusan yang dihasilkan oleh birokrasi pemerintah.

c. Kelembagaan

Paradigma ketiga kurang memperhatikan masalah efektivitas, efisiensi, dan produktifitas organisasi, namun lebih memfokuskan pada pemahaman perilaku birokrasi yang dipandang sebagai birokrasi yang kompleks.

d. Hubungan Kemanusiaan

Fokus utama pada paradigma ini yaitu dimensi kemanusiaan dan aspek sosial psikologi dalam tiap jenis organisasi maupun birokrasi.

e. Pilihan Publik

Fokus pada paradigma ini tidak bisa terlepas dari politik, dengan lokus pada pilihan melayani kepentingan publik akan barang dan jasa yang harus diberikan sejumlah organisasi kompleks.

f. Administrasi Negara Baru

Paradigma ini lebih berfokus pada usaha mengorganisasikan, menggambarkan, mendesain, atau membuat organisasi berjalan kearah dan dengan mewujudkan nilai kemanusiaan secara maksimal. Organisasi dalam pandangan paradigma ini dijalankan dengan sistem desentralisasi dan demokratis yang responsif dan mengundang partisipasi masyarakat.

Berdasarkan penjelasan mengenai paradigma menurut 2 (dua) ahli diatas dapat disimpulkan bahwa dunia khususnya Indonesia sekarang berada pada paradigma administrasi negara sebagai administrasi negara atau administrasi negara baru. Teori administrasi negara mengalami perkembangan yang cukup pesat, menurut Afiffuddin (2010: 34-38) dengan mengutip pendapat Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaja bahwa perkembangan teori administrasi negara dibagi menjadi 6 (enam) alur, sebagai berikut:

a. Alur Pemikiran Administrasi Negara Klasik

Pemikiran ini memandang bahwa proses administrasi negara dan proses politik harus terpisah, karena administrasi negara dipandang sebagai kegiatan suatu pemerintahan dalam melaksanakan kekuasaan dan kebijakan politik.

b. Alur Penekanan Manajemen

Alur ini menekankan bahwa ada pengaruh yang kuat dari pemikiran-pemikiran manajemen ilmiah, sehingga memandang administrasi Negara sebagai proses manajemen pemerintahan.

c. Alur Pendekatan Perilaku

Alur ini mempunyai beberapa prinsip yaitu pertama aspek nilai dan perilaku, administrasi negara tidak pernah bebas nilai dalam hubungan antar manusia. Kedua, perilaku tercermin dalam organisasi yang mempunyai ciri pokok perilaku dan pengembangan organisasi.

d. Alur Pendekatan Kontinum Politik-Administrasi

Alur ini memandang bahwa politik dan administrasi negara tidak harus dipisahkan, melainkan administrasi negara mempunyai peran penting dalam politik. Administrasi negara mempunyai tugas utama merumuskan, melaksanakan, dan menyelenggarakan kebijakan politik.

e. Alur Pemikiran Ekologi (Lingkungan)

Alur ini memandang bahwa ada keterkaitan antara administrasi negara dengan konteks sosial atau lingkungannya, berbagai faktor lingkungan akan berpengaruh secara timbal balik terhadap administrasi negara.

f. Alur Pemikiran Administrasi Pembangunan

Pemikiran ini mengartikan bahwa administrasi negara mempunyai peran sebagai agen perubahan, dengan tujuan untuk mensukseskan pembangunan dalam berbagai aspek untuk pemerataan hasil pembangunan, melalui perencanaan yang berorientasi pada pelaksanaan,

transfer teknologi, transformasi sosial, pengembangan kapasitas dan partisipasi masyarakat

B. Administrasi Pembangunan

1. Pengertian Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan menurut Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaya (1996: 33) dengan mengutip pendapat dari Mustopadidjaya ialah “ilmu dan seni tentang bagaimana pembangunan suatu sistem administrasi negara dilakukan, sehingga dengan demikian sistem tersebut mampu menyelenggarakan berbagai fungsi pemerintahan dan pembangunan secara efisien dan efektif”. Pengertian di atas dapat dimaknai bahwa administrasi pembangunan merupakan ilmu yang menjelaskan mengenai cara membangun suatu sistem administrasi negara, sehingga fungsi pemerintahan dan pembangunan bisa berjalan efektif dan efisien. Lebih lanjut Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaya (1996: 38) menjelaskan dengan mengutip dari Weidner bahwa administrasi pembangunan merupakan “proses pengarahan dan pengorganisasian menuju tercapainya tujuan-tujuan pembangunan”. Pengertian tersebut bermakna administrasi pembangunan tidak hanya ilmu yang mengajarkan mengenai cara membangun sebuah sistem administrasi negara, tetapi juga proses pengarahan dan pengorganisasian dengan menempatkan administrasi negara sebagai pusat penunjang untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan.

Pernyataan lebih sempit dikemukakan Afiffuddin (2010: 54) bahwa administrasi pembangunan adalah “seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu

negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana disemua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan”. Pengertian diatas dapat dimaknai bahwa administrasi pembangunan merupakan upaya bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana yang dilakukan tidak hanya pemerintah saja, namun juga masyarakat dan swasta untuk mencapai tujuan negara.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Samin (2011: 2) dengan mengutip pendapat dari SP. Siagian bahwa administrasi pembangunan merupakan “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)”. Pengertian di atas mempunyai makna administrasi pembangunan merupakan tindakan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah untuk membina bangsa sehingga bangsa mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi pembangunan merupakan ilmu tentang suatu usaha dan proses dalam hal pembuatan sistem administrasi, pengarahan dan pengorganisasian yang dilakukan secara sadar dan terencana oleh suatu bangsa dan negara, sehingga fungsi pemerintahan dan pembangunan bisa berjalan secara efisien dan efektif serta negara bisa berkembang dan bertumbuh.

2. Ruang Lingkup Administrasi Pembangunan

Ruang lingkup administrasi pembangunan menurut Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaya (1996: 84-88) adalah pengamatan terhadap masalah-masalah penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pembangunan, serta “teori, strategi dan kebijaksanaan mengenai pembangunan negara yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dalam merumuskan, melaksanakan, dan menilai hasil-hasil pelaksanaan berbagai kebijaksanaan pembangunan”. Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaya lebih merincikan ruang lingkup administrasi pembangunan, bahwa pusat perhatian administrasi pembangunan pada pembangunan dalam bidang-bidang berikut:

a. Nilai-nilai Kelembagaan

Kelembagaan disini mencakup beberapa aspek diantaranya aspek nilai sosial budaya, masalah disiplin, dan hukum

b. Organisasi

Pembangunan organisasi dalam hal ini termasuk juga pembentukan organisasi nonbirokratis, seperti badan-badan usaha negara, organisasi, program dan proyek.

c. Kepegawaian

d. Manajemen

Manajemen yang menjadi pusat perhatian disini mulai dari penyusunan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan, serta pengimplementasiannya atau pelaksanaannya.

e. Sarana-sarana Administrasi

Sarana-sarana administrasi yang dimaksud disini meliputi sarana-sarana administrasi keuangan, peralatan dan pembekalan di pembangunan.

3. Pembangunan

Pengertian pembangunan berbeda-beda setiap pakar, karena tergantung dari sudut pandang yang dipakai oleh pakar tersebut. Menurut Soesilo (2000: 3) pembangunan adalah “peningkatan keseluruhan sistim sosial yang sesuai dengan nilai luhur dan dicapai melalui pertumbuhan, pemerataan, dan peningkatan kreativitas rakyat”. Pengertian tersebut dimaknai bahwa adanya pembangunan berarti ada pertumbuhan, pemerataan dan peningkatan kreatifitas rakyat, sehingga terjadi peningkatan sistim sosial yang sesuai dengan nilai luhur.

Pendapat berbeda dikemukakan oleh pakar lain, menurut Bryant dan White (1989: 21) pembangunan diartikan “sebagai peningkatan kemampuan orang untuk mempengaruhi masa depannya”. Apabila Soesilo mengartikan pembangunan berorientasi pada peningkatan keseluruhan sistim sosial yang sesuai dengan nilai luhur, Bryant dan White mengartikan pembangunan berorientasi pada setiap individu orang, pembangunan untuk peningkatan kemampuan setiap sumber daya manusia, sehingga bisa mempengaruhi kemampuan masa depannya sendiri.

Mendukung pendapat dari Bryant dan White, Budiman (2000: 13-14) mengemukakan ada 2 (dua) unsur pokok dalam pembangunan meliputi “pertama, masalah materi yang mau dihasilkan dan dibagi. Kedua, masalah

manusia yang menjadi pengambilan inisiatif, yang menjadi manusia pembangun”. Dilihat dari pendapat diatas dapat dimaknai bahwa manusia selaku pengambil inisiatif dalam pembangunan juga merupakan unsur yang penting dalam pembangunan, sehingga perlu untuk dijadikan perhatian.

Korten juga mengemukakan pendapat yang sama melalui teori *people centered development* (pembangunan yang berpusat pada rakyat) (Mardikanto dan Soebiato, 2015: 17-18). Menurut teori ini pembangunan tidak berorientasi pada pertumbuhan ekonomi maupun memperkuat negara, melainkan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Lebih lanjut Mardikanto dan Soebiato, (2015: 19) mengartikan inti pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah “pemberdayaan yang mengarah pada kemandirian masyarakat”.

Ada beberapa ciri-ciri pembangunan yang berpusat pada rakyat atau manusia, menurut Mardikanto dan Soebiato, (2015: 18) yang mengutip pendapat Tjokrowinoto mengemukakan bahwa ciri-ciri pembangunan yang berpusat pada manusia ada 5 (lima) diantaranya:

1. Prakarsa dan proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tahap demi tahap harus diletakkan pada masyarakat sendiri,
2. Fokus utamanya adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memobilisasikan sumber-sumber yang terdapat di komunitas untuk memenuhi kebutuhan mereka,
3. Pendekatan ini mentoleransi variasi local dan karenanya, sifatnya flexible menyesuaikan dengan kondisi local,
4. Di dalam melaksanakan pembangunan, pendekatan ini menekankan pada proses *social learning* yang didalamnya terdapat interaksi kolaboratif antara birokrasi dan komunitas mulai dari proses perencanaan sampai evaluasi proyek dengan mendasarkan diri saling belajar,

5. Proses pembentukan jaringan antara birokrasi dan lembaga swadaya masyarakat, satuan organisasi tradisional yang mandiri untuk meningkatkan kemampuan.

C. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat bisa diartikan sebagai proses perubahan, hal ini sesuai dengan pendapat Mardikanto yang dikutip oleh Mardikanto dan Soebiato, (2015: 100) bahwa pemberdayaan masyarakat adalah:

“Proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua stakeholders (individu, kelompok, kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan, demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri, dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan.”

Pengertian diatas dapat dimaknai bahwa pemberdayaan masyarakat dilakukan agar masyarakat bisa berdaya, mandiri, partisipatif, dan sejahtera secara berkelanjutan. Hal itu dilakukan dengan cara memperkuat kemampuan masyarakat baik secara ekonomi, sosial, dan politik, melalui proses belajar bersama yang partisipatif.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Munandar (2008: 154) bahwa pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai “pemberian atau peningkatan kekuasaan (*power*) kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung (*disadvantage*)”. Pengertian diatas dapat dimaknai bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat. Meningkatnya

kemampuan masyarakat yang lemah dan tidak beruntung, sehingga masyarakat bisa mandiri dan hidup sejahtera.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Widjajanti (2011: 16) bahwa pemberdayaan masyarakat adalah:

“suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan atau kemampuan kepada individu dan masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif pemecahannya dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara mandiri”.

Pendapat diatas dapat diartikan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan kemampuan kepada masyarakat sehingga bisa mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan atas potensi yang dimilikan dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi, sehingga taraf hidup masyarakat bisa meningkat.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat sendiri untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, sehingga masyarakat bisa berdaya, mandiri dan sejahtera secara berkelanjutan.

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat mempunyai beberapa tujuan, menurut Mardikanto dan Soebiato, (2015: 111-112) ada 9 (sembilan) tujuan pemberdayaan masyarakat diantaranya: 1) perbaikan pendidikan (*better education*), 2) perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*), 3) perbaikan

tindakan (*better action*), 4) perbaikan kelembagaan (*better institution*), 5) perbaikan usaha (*better business*), 6) perbaikan pendapatan (*better income*), 7) perbaikan lingkungan (*better environment*), 8) perbaikan kehidupan (*better living*), 9) perbaikan masyarakat (*better community*).

3. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Prinsip pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto dan Soebiato, (2015: 105-106) ada 3 yaitu:

a. Mengerjakan

Mengerjakan disini diartikan sebagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan baik oleh masyarakat sendiri maupun pemerintah dan pihak swasta harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan sesuatu, hal ini dimaksudkan agar masyarakat mengalami proses belajar.

b. Akibat

Akibat disini diartikan sebagai seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan harus memberikan akibat yang bermanfaat bagi masyarakat.

c. Asosiasi

Asosiasi disini diartikan sebagai kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dikaitkan dengan kegiatan lain, karena manusia cenderung mengaitkan satu kegiatan dengan kegiatan yang lain.

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Suhendra (2006: 88-96) dengan mengutip pendapat Jim Iffe (1995) bahwa pemberdayaan masyarakat harus memperhatikan 22 (dua puluh dua) prinsip yaitu;

- a. *Integrated Development*, pengembangan masyarakat mencakup berbagai aspek yaitu sosial, politik, ekonomi, budaya, lingkungan, dan spiritual, sehingga dalam pengembangannya harus terkait satu sama lain.
- b. *Comfronting Struktural Disadvantage*, dalam pengembangan harus memperhatikan struktur, karena struktur yang bertentangan akan melemahkan pengembangan masyarakat.
- c. *Human Right*, Hak Asasi Manusia merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam pengembangan masyarakat.
- d. *Sustainability*, pengembangan masyarakat ditujukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya yang tidak bisa diperbarui.
- e. *Empowerment*, pemberdayaan dilakukan dengan memberikan sumber, kesempatan, pengetahuan, dan ketrampilan kepada masyarakat.
- f. *The Personal and Political*, pemberdayaan masyarakat harus memberikan pembelajaran politik terhadap setiap individu atau masyarakat.
- g. *Community Ownership*, pemberdayaan masyarakat harus memperhatikan kepemilikan material maupun non material seperti struktur dan proses.
- h. *Self Reliance*, pemberdayaan harus menambah kepercayaan diri.
- i. *Indefendence from The State*, menekankan pada kemampuan otonomi, kepercayaan diri masyarakat, dan meminimalkan dana dari pemerintah.

- j. *Immediate Goals and Ultimate Visions*, pemberdayaan masyarakat harus memperhatikan tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang.
- k. *Organic Development*, dalam pemberdayaan masyarakat juga harus memperhatikan unsur-unsur lain seperti unsur organik.
- l. *The Pace of Development*, langkah-langkah yang dilakukan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada di masyarakat.
- m. *External Expertise*, pemanfaatan ahli dari luar harus tetap memperhatikan dan menyesuaikan karakteristik masyarakat setempat
- n. *Community Building*, pemberdayaan masyarakat harus bertujuan untuk membangun masyarakat.
- o. *Proses and Outcomes*, pemberdayaan tidak hanya memperhatikan hasil tetapi juga memperhatikan prosesnya.
- p. *The Integrity of Process*, pemberdayaan masyarakat harus melalui proses pertemuan-pertemuan masyarakat, sehingga masyarakat bisa didorong untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan.
- q. *Non Violence*, proses pemberdayaan tidak ada kekerasan fisik.
- r. *Inclusiveness*, pemberdayaan harus menyertakan seluruh masyarakat.
- s. *Konsensus*, pemberdayaan dilakukan sesuai kesepakatan bersama.
- t. *Co-Operation*, pemberdayaan masyarakat melakukan kerjasama.
- u. *Participation*, pemberdayaan harus mengoptimalkan partisipasi.
- v. *Defining Need*, Pemberdayaan harus memperhatikan kebutuhan.

4. Metode Pemberdayaan Masyarakat

Banyak metode atau teknik pemberdayaan masyarakat, menurut Suhendra (2006: 104-113) ada 5 (lima) metode yang bisa digunakan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu:

a. *Participatory Rural Appraisal* (PRA)

PRA merupakan metode yang melibatkan masyarakat dalam seluruh proses pemberdayaan masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi.

b. *Metoda Partisipatori Assesment* (MPA)

MPA merupakan metode yang mirip dengan metode PRA, dalam metode ini mempunyai 4 (empat) langkah, yaitu 1) menemukan masalah, 2) menemukenali potensi, 3) menganalisa masalah dan potensi, 4) memilih solusi dan pemecahan masalah.

c. *Metoda Loka Karya*

Metode ini merupakan metode yang menggunakan sistem musyawarah untuk mengambil keputusan dari sebuah permasalahan. Metode ini sangat efektif untuk memotivasi para peserta pemberdayaan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan kreativitas.

d. Teknik *Brainstorming*

Metode ini menggunakan sistem *button up* dalam pemberdayaan masyarakat, sehingga bisa memunculkan kreativitas anggota dalam memecahkan suatu masalah. Adanya metode ini bisa menimbulkan rasa memiliki dan tanggung jawab dari masyarakat.

e. *Community Organization-Community Development (CO-CD)*

CO merupakan metode yang mewujudkan dan membina sesuatu yang sudah ada untuk dijadikan lebih efektif, sedangkan CD merupakan metode yang mengupayakan memajukan kesatuan-kesatuan masyarakat.

Pandangan berbeda dikemukakan oleh Mardikanto dan Soebiato, (2015: 199-205) bahwa ada 6 (enam) metode yang bisa digunakan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu:

a. *Rapid Rural Appraisal (RRA)*

RRA merupakan metode yang memberikan proses belajar dari orang luar, sehingga lebih efektif dan efisien.

b. *Participatory Rapid Appraisal (PRA)*

PRA merupakan metode pemberdayaan yang memanfaatkan orang dalam atau seluruh *stakeholders* dengan difasilitasi oleh orang luar yang berfungsi sebagai fasilitator.

c. *Focus Group Discussion (FGD)*

FGD merupakan metode diskusi kelompok terarah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan suatu proram, metode ini digunakan untuk pengumpulan data.

d. *Participatory Learning and Action (PLA)*

PLA merupakan metode pemberdayaan masyarakat yang melakukan proses belajar sambil bekerja. PLA ini terdiri dari proses belajar tentang suatu topik, setelah itu diikuti dengan kegiatan yang nyata atau riil.

e. *Farmers Field School (FFC)*

Metode ini melakukan pertemuan sekelompok masyarakat secara berkala, yang diawali dengan pembahasan mengenai masalah yang sedang dihadapi, dilanjutkan dengan penyampaian pendapat dan berbagai pengalaman tentang alternatif pemecahan masalah yang paling efektif dan efisien.

f. *Pelatihan Partisipatif*

Metode ini merupakan metode yang melakukan pelatihan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, metode ini diawali dengan penelusuran tentang apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

5. Pemberdayaan Perempuan

a. Tujuan Pemberdayaan Perempuan

Menurut Nugroho (2008: 164) ada 4 (empat) beberapa tujuan program pemberdayaan perempuan dalam pembangunan diantaranya:

- 1) Meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk melibatkan diri dalam program pembangunan, sebagai partisipasi aktif (subjek) agar tidak sekedar menjadi objek pembangunan seperti yang terjadi selama ini.
- 2) Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam kepemimpinan, untuk meningkatkan posisi tawar menawar dan keterlibatan dalam setiap program pembangunan baik sebagai perencana, pelaksana, maupun melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.
- 3) Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam mengelola usaha skala rumah tangga, industri kecil maupun besar untuk menunjang peningkatan kebutuhan rumah tangga, maupun untuk membuka peluang kerja produktif dan mandiri.
- 4) Meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan ditingkat lokal sebagai wadah pemberdayaan kaum perempuan agar dapat terlibat secara aktif dalam program pembangunan pada wilayah tempat tinggal.

b. Program Pemberdayaan Perempuan

Ada beberapa program pemberdayaan perempuan, menurut Nugroho (2008: 165-166) ada 5 (lima) program pemberdayaan perempuan diantaranya:

- 1) Penguatan organisasi kelompok perempuan dari segala sektor, mulai dari tingkat kampung hingga nasional.
- 2) Peningkatan fungsi dan peran organisasi perempuan dalam pemasaran sosial
- 3) Pelibatan kelompok perempuan dalam seluruh kegiatan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring.
- 4) Peningkatan kemampuan perempuan dalam hal kepemimpinan, hal ini dilakukan agar perempuan mempunyai posisi tawar yang setara dengan laki-laki, sehingga bisa terlibat dalam pembangunan.
- 5) Peningkatan kemampuan seluruh anggota kelompok perempuan dalam bidang usaha baik dalam skala rumah tangga hingga usaha skala besar, dengan berbagai ketrampilan.

c. Tahapan Kegiatan Pemberdayaan

Ada 4 (empat) tahapan-tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat menurut Tim Delevy dalam Mardikanto dan Soebiato (2015: 125-127) yaitu:

- 1) Tahap 1 Seleksi Lokasi/Wilayah

Pemilihan lokasi atau seleksi untuk pemberdayaan perempuan dilakukan sesuai dengan kriteria yang sudah disepakati oleh lembaga, masyarakat dan pihak yang terkait lainnya. Penetapan kriteria dalam seleksi lokasi agar pemilihan lokasi dapat dilakukan sebaik mungkin, sehingga tujuan dari pemberdayaan perempuan bisa tercapai dengan apa yang diharapkan.

2) Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan sosialisasi merupakan upaya mengkomunikasikan kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat. Adanya sosialisasi dapat membantu masyarakat dan pihak terkait dalam meningkatkan pemahaman tentang program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan. Proses sosialisasi sangat penting, karena akan berpengaruh pada minat dan ketertarikan masyarakat dan pihak terkait untuk berpartisipasi dalam program pemberdayaan masyarakat.

3) Proses Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat, sehingga taraf hidup dapat meningkat. Proses ini, masyarakat juga ikut atau bersama sama melakukan beberapa hal diantaranya:

a) Mengidentifikasi dan mengkaji potensi lokasi atau wilayah, permasalahan, serta peluang-peluangnya. Tahap ini diharapkan dapat diperoleh gambaran keadaan mengenai berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, dan kelembagaan.

b) Menyusun rencana kegiatan kelompok berdasarkan hasil kajian, yang meliputi

1. memprioritaskan dan menganalisa masalah-masalah,
2. identifikasi alternative dan pemecahan masalah yang terbaik,
3. identifikasi sumberdaya yang tersedia untuk pemecahan masalah,
4. pengembangan rencana kegiatan serta pengorganisasian pelaksanaannya.

c) Menerapkan rencana kegiatan kelompok, rencana yang sudah disusun lalu diimplementasikan dalam kegiatan yang nyata dengan tetap memperhatikan realisasi dan rencana awal. Termasuk dalam kegiatan ini mengenai pemantauan pelaksanaan dan kemajuan kegiatan menjadi perhatian semua pihak, dan bisa melakukan perbaikan jika diperlukan.

d) Memantau proses dan hasil kegiatan secara terus menerus secara partisipatif. Pemantauan ini dilakukan terhadap keseluruhan tahapan pemberdayaan masyarakat, agar proses pemberdayaan berjalan dengan berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau yang menjadi tujuan.

4) Pemandirian Masyarakat

Pemandirian masyarakat mengarah pada pendampingan untuk menyiapkan masyarakat agar benar-benar mampu mengelola sendiri kegiatannya. Proses pemberdayaan berkaitan dengan faktor internal dan eksternal. Internal berkaitan dengan masyarakat nya sendiri dan faktor eksternal berikatan dengan pendampingnya atau suatu tim fasilitator yang berasal dari multidisiplin, dalam operasionalnya

inisiatif tim pemberdayaan masyarakat secara perlahan akan dikurangi dan akhirnya berhenti.

d. Indikator Pemberdayaan Perempuan

Menurut Nugroho (2008: xxi) dengan mengutip pendapat Katjasungkana bahwa ada 4 (empat) indikator pemberdayaan perempuan yaitu:

- 1) Akses, dalam arti kesamaan hak dalam mengakses sumber daya-sumber daya produktif di dalam lingkungan.
- 2) Partisipasi, yaitu keikutsertaan dalam mendayagunakan aset atau sumber daya yang terbatas tersebut.
- 3) Kontrol, yaitu bahwa lelaki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kontrol atas pemanfaatan sumber daya-sumber daya tersebut.
- 4) Manfaat, yaitu bahwa lelaki dan perempuan harus sama-sama menikmati hasil-hasil pemanfaatan sumber daya atau pembangunan secara sama dan setara.

e. Fasilitator Pemberdayaan

1) Ragam Fasilitator/Penyuluh

Menurut Mardikanto dan Soebiato (2015: 139-140) yang mengutip undang-undang nomor 16 tahun 2006, bahwa berdasarkan tempat bekerjanya, fasilitator dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a) Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu pegawai negeri sipil yang ditetapkan dengan status jabatan fungsional sebagai fasilitator atau penyuluh pemberdayaan masyarakat.
- b) Fasilitator/Penyuluh Swasta, yaitu fasilitator pemberdayaan masyarakat yang bekerja di lembaga swasta atau berstatus sebagai

karyawan swasta, dan penyuluh dari lembaga swadaya masyarakat juga dikategorikan penyuluh swasta.

- c) Fasilitator/ Penyuluh, yaitu fasilitator pemberdayaan masyarakat yang berasal dari masyarakat, yang melakukan pembedayaan di lingkungannya tanpa imbalan. Fasilitator yang diangkat dan diberi imbalan oleh masyarakat lingkungannya juga termasuk dalam kategori ini.

2) Peran Fasilitator/ Penyuluh

Menurut Mardikanto dan Soebiato (2015: 140) peran fasilitator secara konvensional adalah “menyampaikan informasi dan atau mempengaruhi penerima manfaat pemberdayaan melalui metoda dan teknik tertentu sampai mereka (penerima manfaat) itu dengan kesadaran dan kemampuannya sendiri mengadopsi inovasi yang disampaikan”. Sedangkan dalam perkembangan sekarang, peran fasilitator hanya sebatas menyampaikan inovasi dan mempengaruhi penerima manfaat dalam proses mengambil keputusan, dan juga menjadi penghubung antara pemerintah dengan masyarakat penerima manfaat. Lebih rinci lagi Mardikanto dan Soebiato (2015: 140) dengan mengutip pendapat Levin (1943) menjelaskan bahwa fasilitator mempunyai 3 (tiga) peran, diantaranya:

- a) pencairan diri dengan masyarakat sasaran,
- b) menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan,
- c) pemantapan hubungan dengan masyarakat sasaran.

Mardikanto dan Soebiato (2015: 142-143) yang mengutip pendapat Mardikanto bahwa ada beragam peran penyuluh atau fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat diantaranya:

- a) Peran *Edukasi*, yaitu fasilitator berperan sebagai pendidik dalam pengembangan proses belajar bersama penerima manfaatnya.
- b) Peran *Diseminasi Inovasi*, yaitu peran sebagai penghubung atau penyebar inovasi dari luar kedalam masyarakat penerima manfaat atau dari dalam masyarakat ke luar.
- c) Peran *Fasilitasi*, yaitu berperan sebagai penunjuk sumber-sumber kemudahan yang diperlukan masyarakat dan berperan sebagai perantara antar pemangku kepentingan pembangunan.
- d) Peran *Konsultasi*, yaitu berperan sebagai penasihat atau pemberi alternatif pemecahan masalah bagi masyarakat dan pemangku kepentingan.
- e) Peran *Advokasi*, yaitu berperan sebagai memberi bantuan yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat terutama kelas menengah kebawah.
- f) Peran *Supervisi*, yaitu berperan sebagai supervisor pelaksana kegiatan advokasi dan pemberdayaan masyarakat yang ditawarkan dan dilaksanakan oleh masyarakat.
- g) Peran *Pemantauan dan Evaluasi*, yaitu berperan untuk melakukan pengamatan, pengukuran, dan penilaian atas proses dan hasil-hasil



pemberdayaan masyarakat, mulai dari sebelum pemberdayaan, waktu pemberdayaan, dan setelah kegiatan pemberdayaan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan pemberdayaan perempuan sektor ekonomi yang dilihat dari tahapan kegiatan pemberdayaan secara tepat, sistematis, faktual, dan akurat sehingga peneliti bisa menganalisis pemberdayaan perempuan di Kota Malang. Menurut Silalahi (2009 : 27) yang mengutip pendapat Mely G. Tan penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus karena permasalahan pada penelitian ini merupakan kejadian yang terjadi dalam kehidupan nyata dalam konteks kontemporer (kasus). Menurut Creswell (2015: 135-136) Kualitatif studi kasus adalah penelitian yang mengeksplorasi kehidupan nyata dan sistem terbatas kontemporer (kasus), melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi dan melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini bertujuan untuk membatasi cakupan masalah dan daerah yang akan diteliti, karena menurut Sugiyono (2014 : 207) fokus adalah batasan masalah dalam penelitian kualitatif, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Fokus penelitian dalam penelitian ini didasarkan pada tahapan-tahapan kegiatan pemberdayaan yang dikemukakan oleh Mardikanto dan Soebiato (2015: 125-127) yang mengutip dari Tim Delevery, sebagai berikut:

1. Pemberdayaan perempuan sektor ekonomi di DP3AP2KB Kota Malang

- a. Seleksi Lokasi/Wilayah

- b. Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan

- c. Proses Pemberdayaan Perempuan

- 1) Mengidentifikasi dan Mengkaji Potensi Wilayah

- 2) Menyusun Rencana Kegiatan Kelompok

- 3) Menerapkan Rencana Kegiatan Kelompok

- 4) Memantau Proses dan Hasil Pemberdayaan

- d. Pemandirian Masyarakat

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan perempuan sektor ekonomi di DP3AP2KB Kota Malang

- a. Faktor Pendukung

- 1) Internal

- 2) Eksternal

- b. Faktor Penghambat

- 1) Internal

- 2) Eksternal

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti menggambarkan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti. Adapun lokasi pada penelitian ini bertempat di Kota Malang. Alasan peneliti memilih Kota Malang karena Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Malang merupakan yang tertinggi di Jawa Timur pada tahun 2015, namun pengangguran terbuka Kota Malang juga tinggi tahun 2014 dan 2015 nomor 2 (dua) se-Jawa Timur di bawah Kota Kediri dan lebih tinggi dari provinsi Jawa Timur. Selain itu alasan peneliti memilih Kota Malang karena kekerasan masyarakat khususnya perempuan di Kota Malang selalu meningkat dari tahun 2013 sampai pada tahun 2016, dan juga tingkat partisipasi perempuan dalam musrenbang tahun 2014 hanya 26%. Situs penelitian adalah tempat dimana peneliti menggambarkan pusat penelitian dari obyek yang diteliti. Adapun situs pada penelitian ini di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Informan

Informan dalam penelitian ini ada 8 (delapan) orang, 4 (empat) orang dari DP3AP2KB Kota Malang dan 4 (empat) orang masyarakat perempuan di Kota Malang, berikut lebih rincinya:

- a. Dra. Rr. Andayun S. A. MAP selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan

- b. Wiwik Koesoemaningdijah, SKM. Selaku Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
- c. Dra. Maria Angela Dj. MSi selaku Kepala Seksi Edukasi dan Partisipasi Perempuan
- d. Bapak Ayok selaku staf Bidang Pemberdayaan Perempuan
- e. Ibu Naimah selaku masyarakat perempuan sekaligus anggota PKK dan anggota Pokja Kelurahan Tlogomas
- f. Ibu Mas'adah selaku masyarakat perempuan kelurahan Purwantoro
- g. Febri Rahayu Putri selaku masyarakat perempuan kelurahan Tulusrejo
- h. Fella selaku masyarakat perempuan kelurahan Purwodadi

2. Dokumen

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) 2015 DP3AP2KB Kota Malang
- b. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) 2016 DP3AP2KB Kota Malang
- c. Matrik program bidang pemberdayaan perempuan DP3AP2KB Kota Malang 2017
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah

3. Peristiwa

Selain data yang bersumber dari dokumen penelitian ini juga menggunakan sumber data dari pengamatan atau observasi terhadap peristiwa pemberdayaan perempuan, berikut peristiwa yang diamati:

- a. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan
- b. Proses sosialisasi kegiatan pemberdayaan perempuan
- c. Monitoring dari dinas kepada masyarakat perempuan Kota Malang

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ada 3 (tiga) yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penjelasannya sebagai berikut:

1. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti dan pengamatan ini dilakukan dengan waktu yang berbeda-beda. Hal ini bertujuan agar peneliti mengetahui fakta atau kenyataan dari pemberdayaan perempuan sektor ekonomi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang. Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi terus terang, peneliti menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa sedang melakukan penelitian.

2. Wawancara

Teknik yang dilakukan dalam mengumpulkan data selanjutnya dengan wawancara, peneliti melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan yang sudah ditetapkan. Hal ini bertujuan dengan melakukan

wawancara, peneliti bisa mendapatkan data/informasi yang valid/benar.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik

wawancara semi terstruktur. Wawancara dilakukan dengan 8 (delapan)

informan selama beberapa hari, berikut rincian waktunya:

a. Wawancara dengan Ibu Andayun pada tanggal 11 April 2017, 18 April

2017 dan 22 Mei 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang

b. Wawancara dengan Ibu Wiwik pada tanggal 21 April 2017 dan 3 Mei

2017 di Kantor DP3AP2KB Kota Malang

c. Wawancara dengan Ibu Maria pada tanggal 21 April 2017 di Kantor

DP3AP2KB Kota Malang

d. Wawancara dengan Bapak Ayok pada tanggal 28 April 2017 di Kantor

DP3AP2KB Kota Malang

e. Wawancara dengan Ibu Naimah pada tanggal 26 April 2017 di rumah Ibu

Naimah

f. Wawancara dengan Ibu Mas'adah pada tanggal 26 April 2017 di rumah

Ibu Mas'adah

g. Wawancara dengan Febri Rahayu Putri pada tanggal 27 April 2017 di

Karang Besuki

h. Wawancara dengan Ibu Fella pada tanggal 29 April 2017 di rumah Ibu

Fella

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ketiga yang peneliti gunakan adalah dokumentasi,

dengan cara mengutip atau menyalin dokumen yang relevan untuk

digunakan sebagai data dalam penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk mendukung data-data observasi dan wawancara, guna meyakinkan bahwa data yang diperoleh valid.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian merupakan alat atau sarana yang digunakan dalam mengumpulkan data-data penelitian, karena teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga instrument penelitian yang digunakan sebagai berikut:

1. Peneliti sendiri, karena peneliti yang melakukan penggalan data secara langsung.
2. Pedoman-pedoman wawancara (*interview guide*) digunakan untuk membatasi dan mengarahkan peneliti dalam mencari data-data yang diperlukan sesuai dengan fokus yang telah ditetapkan.
3. Peralatan penunjang untuk pengumpulan data, seperti Handphone, buku catatan, dan alat tulis.

G. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data spiral analisis data (Cresswel 2015: 254-263) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengorganisasikan Data

Tahap awal dalam spirial analisis data ini, diawali dengan mengorganisir data dalam file-file komputer dan juga mengonversi file-file baik dengan

tangan maupun komputer menjadi satuan-satuan teks yang sesuai untuk analisis.

2. Membaca dan Membuat Memo (*Memoing*)

Setelah data diorganisir hasilnya dimaknai secara keseluruhan, dalam proses tersebut peneliti membuat catatan atau memo kecil di bagian tepi. Catatan atau memo kecil yang berupa frasa pendek, ide atau konsep penting yang muncul dalam pikiran analis.

3. Mendeskripsikan, Mengklasifikasikan, dan Menafsirkan Data Menjadi Kode dan Tema

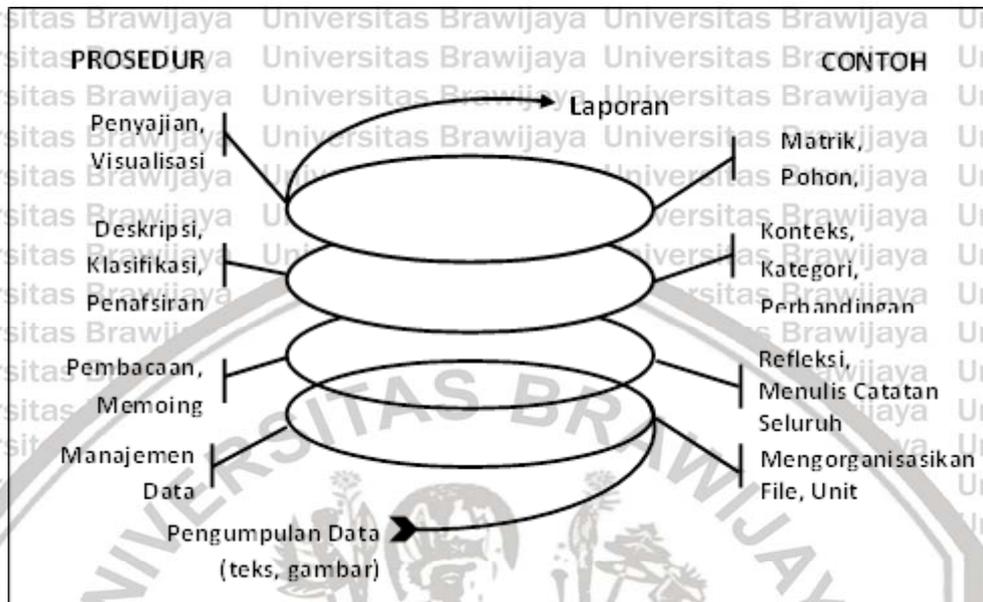
Tahap ini peneliti membuat deskripsi secara detail, mengembangkan tema, dan memberikan penafsiran menurut sudut pandang mereka dan dari perspektif yang ada dalam literatur. Proses *coding* dimulai dengan mengelompokkan data teks menjadi kategori informasi yang lebih kecil, mencari bukti untuk kode tersebut, kemudian memberikan label pada kode tersebut. Proses menjadikan tema dimulai dengan memilah data, mereduksinya menjadi serangkaian tema kecil yang dapat dikelola dan menulisnya menjadi narasi akhir.

4. Menafsirkan Data

Proses ini dimulai dengan pengembangan kode, pembentukan tema dari kode tersebut, dan dilanjutkan dengan pengorganisasian tema menjadi satuan abstraksi yang lebih luas untuk memaknai data.

5. Menyajikan dan Memvisualisasikan Data

Pada tahap akhir ini, peneliti menyajikan data yang ditemukan, yang dikemas dalam bentuk teks, tabel atau bagan atau gambar.



Gambar 3.1 Spiral Analisis Data
(Sumber: Creswell, 2015: 255)

H. Keabsahan Data

Setiap penelitian perlu dilakukan uji keabsahan data, agar hasil penelitian bisa valid, akurat, dan reliabel. Dilakukanya uji keabsahan data, sehingga hasil penelitian bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sugiyono (2015: 270) menjelaskan bahwa dalam uji keabsahan data bisa dilakukan dengan beberapa uji diantaranya 1) Uji Kredibilitas, 2) Uji *Transferability*, 3) Uji *Dependenability*, dan 4) Uji *Konfirmability*. Untuk menguji kebenaran dari hasil penelitian digunakan uji kredibilitas, dalam menguji kebenaran dari hasil penelitian, peneliti menggunakan metode triangulasi. Menurut Sugiyono (2015: 273) triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai

sumber, berbagai cara, dan berbagai waktu. Peneliti menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi teknik pengumpulan data, berikut penjelasannya:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang sudah didapatkan atau diperoleh dari lapangan melalui beberapa sumber. Jadi data tidak bersumber dari atasan saja, tetapi juga dilakukan pengecekan kepada bawahan dan masyarakat umum.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek kepada sumber yang sama, namun menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda. Jadi tidak hanya menggunakan teknik wawancara saja dalam pengumpulan data, tetapi juga menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan dokumentasi. (Sugiyono, 2015: 273-274)

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Kota Malang

Secara geografis Kota Malang merupakan kota besar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya, dengan luas wilayah 110,06 km², yang terdiri dari 5 Kecamatan dan 57 Kelurahan. Rincian jumlah Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan kelurahan di setiap kecamatan di Kota Malang sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jumlah RT, RW, dan Kelurahan setiap Kecamatan

No	Kecamatan	Kelurahan	RW	RT
1.	Klojen	11	89	675
2.	Blimbing	11	127	923
3.	Kedung Kandang	12	114	870
4.	Sukun	11	94	869
5.	Lowokwaru	12	120	774
Jumlah		57	544	4111

Sumber: Laporan Kinerja Tahunan Kota Malang 2015

Kota Malang terletak pada koordinat 7.06° - 8.02° Lintang Selatan dan 112.06° - 112.07° Bujur Timur dengan ketinggian antara 440 – 667 meter dari permukaan laut. Cukup tingginya letak Kota Malang, membuat kondisi iklim Kota Malang tercatat rata-rata suhu udara berkisar antara 22,0°C sampai 24,8°C. Kota Malang mempunyai suhu maksimum mencapai 31,4°C dan suhu minimum 17,2°C. Rata-rata kelembaban udara berkisar 78% - 86%, dengan kelembaban maksimum 98% dan minimum mencapai 19% serta curah hujan tertinggi 385 milimeter. Kondisi iklim di atas membuat

Kota Malang memiliki iklim yang relatif sejuk dibandingkan dengan daerah-daerah lain.

Secara administratif wilayah Kota Malang berbatasan langsung dengan Kabupaten Malang, batasan administratif Kota Malang sebagai berikut:

1. Sebelah Utara: Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso;
2. Sebelah Timur: Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang;
3. Sebelah Selatan: Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji;
4. Sebelah Barat: Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau. (Laporan Kinerja Tahunan, 2015)

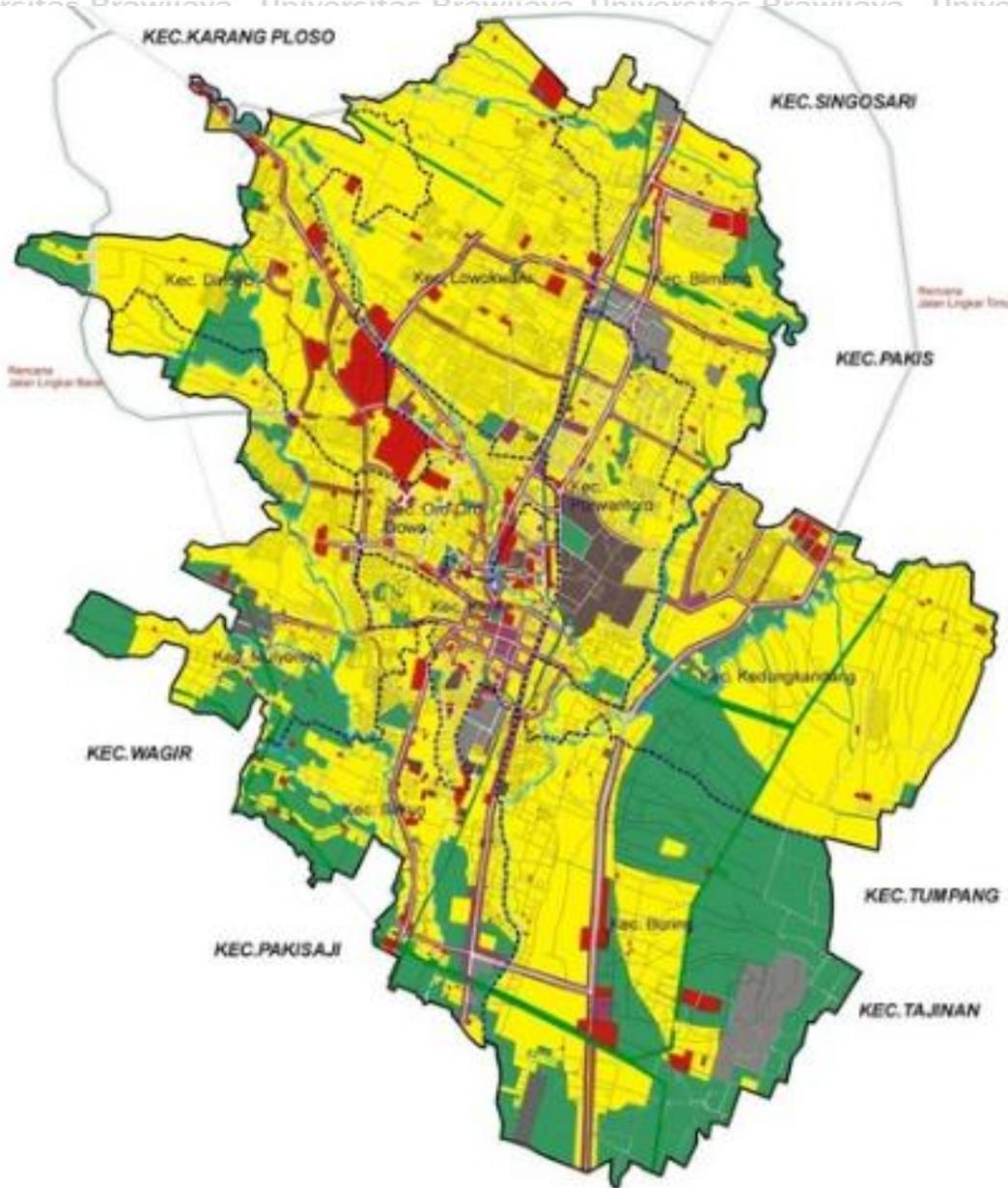
Dilihat dari jumlah penduduknya, Kota Malang mempunyai jumlah penduduk sebesar 882.736 jiwa, yang terdiri dari 440.651 laki-laki dan 442.085 perempuan, yang terbagi kedalam 5 kecamatan yaitu Blimbing, Klojen, Kedung Kandang, Sukun, dan Lowokwaru (Laporan Penduduk Dispendukcapil Kota Malang 2016). Berikut rincian jumlah penduduk Kota Malang setiap kecamatan:

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kota Malang

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)
1.	Blimbing	194.782	97.356	97.426
2.	Klojen	109.878	53.898	55.980
3.	Kedung Kandang	204.908	102.757	102.151
4.	Sukun	203.026	101.787	101.239
5.	Lowokwaru	170.142	84.853	85.289
	Jumlah	882.736	440.651	442.085

Sumber: Laporan Penduduk Dispendukcapil Kota Malang 2016

Berikut peta daerah Kota Malang:



Gambar 4.1 Peta Kota Malang

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

“Terwujudnya kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana”

Misi

- 1) Mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak
- 2) Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas

Tujuan

1) Misi 1

a) Tujuan 1 Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

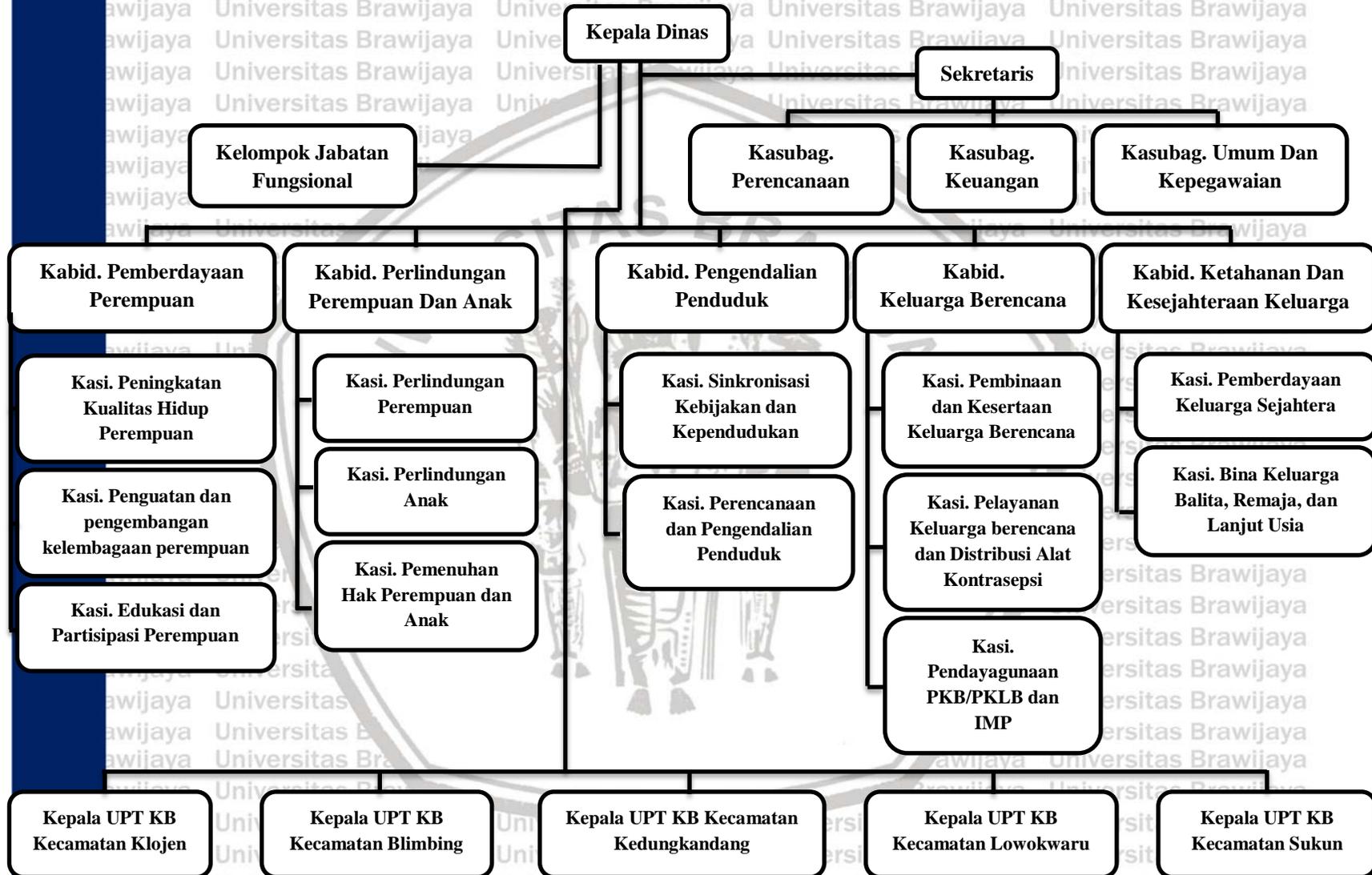
b) Tujuan 2 Meningkatkan pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan

2) Misi 2

a) Tujuan 1 Menurunkan laju pertumbuhan penduduk

b) Tujuan 2 Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

b. Struktur Organisasi



Bagan 4.1 Struktur Organisasi

c. Tugas Pokok dan Fungsi

1) Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

a) Tugas Pokok

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pelaksanaan urusan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

b) Fungsi Dinas

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. perumusan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3. pelaksanaan kegiatan bidang kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan partisipasi masyarakat
4. pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga

5. pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang

Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan

6. pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam

penguasaannya

7. pengelolaan pengaduan masyarakat

8. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional

2) Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

a) Tugas Pokok

Mengelola administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.

b) Fungsi

1. koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2. koordinasi penyusunan rencana, program dan kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

4. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama, dan hubungan masyarakat

5. pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

3) Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pemberdayaan Perempuan

a) Tugas Pokok

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan.

b) Fungsi

1. perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan

2. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyelenggaraan pemberdayaan perempuan

3. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyelenggaraan penguatan dan pengembangan kelembagaan perempuan

4. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyelenggaraan edukasi dan partisipasi perempuan

5. penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan penguatan ekonomi perempuan
 6. penyiapan bahan fasilitasi, sosialisasi dan advokasi di bidang Pemberdayaan Perempuan
 7. Penyiapan data dan bahan penyusunan pedoman penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Perempuan
 8. Penyiapan bahan fasilitasi dan advokasi Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Perempuan
 9. Penyiapan bahan dalam pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi tentang Pengarus Utamaan Gender dan Partisipasi Perempuan
- 4) Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
- a) Tugas Pokok
Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
 - b) Fungsi
 1. perumusan kebijakan teknis di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
 2. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
 3. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis di bidang Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak

4. penyiapan bahan fasilitasi, sosialisasi dan advokasi di bidang

Perlindungan Perempuan dan Anak

5. Penyiapan data dan bahan penyusunan pedoman penguatan dan

Pengembangan Kelembagaan Perlindungan Perempuan

6. Penyiapan bahan fasilitasi dan advokasi Penguatan dan

Pengembangan Kelembagaan Perlindungan Perempuan

7. Penyiapan data dan bahan penyusunan pedoman penguatan dan

Pengembangan Kelembagaan Perlindungan Anak

8. Penyiapan bahan fasilitasi dan advokasi Penguatan dan

Pengembangan Kelembagaan Perlindungan Anak

5) Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengendalian Penduduk

a) Tugas Pokok

Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas membantu

Kepala Dinas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di

bidang Pengendalian Penduduk.

b) Fungsi

1. perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk

2. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan

teknis bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Informasi

Keluarga

3. penyiapan data dan bahan Pelaksanaan pemaduan dan

sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka

pengendalian kuantitas penduduk

4. penyiapan data dan bahan pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk

5. penyiapan data dan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor

6. penyiapan data dan bahan bimbingan teknis dan fasilitasi pengendalian kependudukan

7. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pengendalian penduduk

6) Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Keluarga Berencana

a) Tugas Pokok

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang Keluarga Berencana

b) Fungsi

a. perumusan kebijakan teknis di bidang Keluarga Berencana
b. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis bidang Keluarga Berencana

c. Penyiapan data dan bahan Pelaksanaan layanan penanggulangan komplikasi/efek samping dan kegagalan ber-KB

d. Penyediaan parameter pelayanan KB

e. Penyusunan data informasi KB

f. Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana KB

g. Pelaksanaan pembinaan kesetaraan Ber KB

h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang

Keluarga Berencana

i. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga

Berencana

j. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi di bidang KB

k. Pelaksanaan pengembangan informasi dan edukasi tentang

Keluarga Berencana

l. Pelaksanaan penguatan dan pengembangan keluarga berencana

m. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB)

7) Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan

Keluarga

a) Tugas Pokok

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas

membantu Kepala Dinas melaksanakan pengelolaan program dan

kegiatan di bidang Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga.

b) Fungsi

a. perumusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan dan

Kesejahteraan Keluarga

b. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan

teknis bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

c. Penyiapan data dan bahan Pelaksanaan kebijakan teknis

dibidang Bina Keluarga Balita

d. Penyiapan data dan bahan Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Bina Keluarga remaja

e. Penyiapan data dan bahan Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Bina Keluarga Lanjut Usia

f. Penyiapan data dan bahan Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga

g. Penyiapan data dan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga

h. Penyiapan data dan bahan Pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga

d. Sumber Daya Aparatur

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai jumlah keseluruhan pegawai sebanyak 115 (seratus lima belas) orang Pegawai Negeri Sipil, berikut rinciannya:

- 1) Pegawai Negeri Sipil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang berdasarkan pangkat/golongan sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 4.3 PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan

No.	Pangkat	Gol Ruang	Jumlah	Total
	Pembina Utama Madya	IV/d	-	-
	Pembina Utama Muda	IV/c	1	1
	Pembina Tingkat I	IV/b	12	12
	Pembina	IV/a	36	36
2.	Penata Tingkat I	III/d	19	19
	Penata	III/c	8	8
	Penata Muda Tingkat I	III/b	9	9
	Penata Muda	III/a	8	8
3.	Pengatur Tingkat I	II/d	4	4
	Pengatur	II/c	10	10
	Pengatur Muda Tk.I	II/b	4	4
	Pengatur Muda	II/a	3	3
4	Juru Tingkat I	I/d	-	-
	Juru	I/c	1	1
	Juru Muda Tingkat I	I/b	-	-
	Juru Muda	I/a	-	-
5.	PTT/Tenaga Honorer	-	-	-
	Jumlah		115	115

Sumber: LAKIP DP3AP2KB 2016

2) Pegawai Negeri Sipil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang berdasarkan pendidikan formal sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 4.4 PNS Berdasarkan Pendidikan Formal

No.	Pendidikan Formal	Jumlah (Orang)
1.	Strata 3	-
2.	Strata 2	11
3.	Strata 1	69
4.	Sarjana Muda	6
5.	S L T A	24
6.	S L T P	3
7.	S D	2
	Jumlah	115

Sumber: LAKIP DP3AP2KB 2016

B. Penyajian Data

1. Pemberdayaan Perempuan

a. Seleksi Lokasi/Wilayah

Lokasi atau wilayah merupakan suatu yang penting dalam sebuah pelaksanaan pemberdayaan perempuan, karena dengan pemilihan lokasi yang tepat untuk pemberdayaan perempuan, akan berpengaruh dengan tujuan dari pemberdayaan perempuan sendiri, yang dimana untuk memandirikan perempuan perempuan di Kota Malang. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang yang hal ini mempunyai tugas pelaksanaan urusan di bidang Pemberdayaan Perempuan, melakukan seleksi lokasi atau wilayah dalam sebelum melakukan pemberdayaan kepada masyarakat perempuan di Kota Malang. Pemilihan lokasi untuk pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh DP3AP2KB disesuaikan dengan program yang direncanakan, ada program yang lokasi pelaksanaannya dilakukan

dengan penunjukan dari dinas, dengan kriteria pemilihan lokasinya disesuaikan dengan ketentuan yang provinsi jawa timur, seperti program pemberdayaan perempuan pengembang ekonomi lokal (P3EL), hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Andayun selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kota Malang, sebagai berikut:

“Kalau misal nya P3EL penunjukan berdasarkan beberapa kriteria, ini kan sudah program lama, kalau ini memang penunjukan dengan beberapa kriteria, kan harapan kami di masing-masing kelurahan ada, kita juga punya binaan perempuan kepala keluarga sekota malang, ini juga merupakan binaan kami, nantinya bagaimana mengaktualisasikan perempuan di kota malang, ini kita nanti akan koordinasi dengan beberapa temen-temen di preman super, pekerja rumahan, dll banyak saya gak hafal nama-nama semua (wawancara pada tanggal 11 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang).”

Untuk program pemberdayaan perempuan pengembang ekonomi lokal (P3EL) lokasi pemberdayaan dilakukan oleh dinas pemberdayaan perempuan dengan beberapa kriteria yang sudah ditentukan, selain pembinaan kepada perempuan pengembang ekonomi lokal, pemilihan lokasi yang dilakukan dengan ditunjuk dari dinas, juga dilakukan untuk pemberdayaan perempuan dalam pembinaan perempuan kepala keluarga di Kota Malang. Ada beberapa kriteria yang digunakan oleh DP3AP2KB dalam pemilihan lokasi pemberdayaan perempuan, seperti yang dikemukakan oleh Ibu Andayun selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kota Malang, sebagai berikut “Iya dari dinas, kriterianya yang pertama tentunya, daerah kumuh dan tidaknya, masyarakat yang ekonominya kurang, kepadatan penduduk, (wawancara pada tanggal 11 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota

Malang).” Kriteria yang digunakan oleh DP3AP2KB berdasarkan daerah kumuh, masyarakat perempuan yang dalam kondisi ekonomi di lemah atau mempunyai keadaan ekonomi yang kurang, selain itu juga menggunakan kriteria kepadatan penduduk di wilayahnya.

Selain pemilihan lokasi melalui penunjukan dari dinas yang sudah ditentukan kriterianya, beberapa program dan kegiatan seperti pelatihan-pelatihan yang dilakukan, seleksi lokasi atau pemilihan lokasi pemberdayaan perempuan dilakukan berdasarkan dari usulan masyarakat, hal ini berdasarkan pernyataan yang dikemukakan oleh Ibu Andayun selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kota Malang, sebagai berikut “Kalau yang itu beda, kita juga bersinergi dengan musrenbang kelurahan, misalnya owh masyarakat disini menginginkan pelatihan ini di kelurahan lain juga, lalu kita aspirasikan, lalu kita buat kegiatan dan kita undang masyarakat...(wawancara pada tanggal 11 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang).” Pemilihan lokasi pemberdayaan perempuan juga dilakukan berdasarkan usulan masyarakat perempuan, pada saat kegiatan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) kelurahan dilakukan. Lokasi pemberdayaan tersebut berdasarkan usulan-usulan dari masyarakat perempuan yang sama dari beberapa kelurahan pada saat musrenbang kelurahan. Lebih lanjut Ibu Andayun menjelaskan terkait penentuan lokasi melalui musrenbang, sebagai berikut:

“Aspirasinya kan sama, kita ambil yang sama sama aja, jadi kalau dari 57 kelurahan ada 30 kelurahan yang mengaspirasikan

sama, jadi kita tuangkan aspirasi tersebut ke dalam kegiatan, jadi kita adakan pelatihan dengan jumlah perempuan yang diundang berbeda, Kelurahan yang mempunyai aspirasi lebih banyak yang diundang, (wawancara pada tanggal 11 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang).”

Lokasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan berdasarkan aspirasi terbanyak dari beberapa Kelurahan yang di usulkan oleh perempuan-perempuan di Kelurahan melalui musrenbang Kelurahan. Pernyataan Ibu Andayun tersebut didukung oleh pernyataan Ibu Maria selaku Kepala Seksi Partisipasi dan Edukasi Perempuan DP3AP2KB Kota Malang, sebagai berikut:

“Untuk cara menentukan lokasinya kita melalui musrenbang Kelurahan, jadi kita ada beberapa kegiatan yang memang usulan dari atas ke bawah, atau program wajib dari provinsi, ada juga yang dari bawah atau melalui musrenbang Kelurahan, jadi kan gini, musrenbang Kelurahan kan dimulai dari masyarakat perempuan mengusulkan kepada ketua RT, nah dalam usulan itu ketua RT juga harus melihat apakah usulannya sesuai dengan potensi masyarakatnya atau tidak kalau sesuai ya diusulkan ke RW, lalu ke tingkat Kelurahan. (wawancara pada tanggal 21 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang).”

Kegiatan penentuan lokasi pemberdayaan perempuan terbagi menjadi dua, lokasi pemberdayaan ditunjuk dari pihak dinas langsung, berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan, dan lokasi pemberdayaan berdasarkan usulan masyarakat perempuan Kota Malang melalui musrenbang Kelurahan yang dilakukan setiap tahunnya. Berikut tahapan musrenbang dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah (RKPD) Kota Malang:

MUSRENBANG
KELURAHAN

MUSRENBANG
KECAMATAN

MUSRENBANG
KOTA

Bagan 4.2 Tahapan Musrenbang Kota Malang

Sumber: olahan peneliti 2017 berdasarkan data dari
barenlitbang.malangkota.go.id

Pemilihan lokasi pemberdayaan perempuan yang melalui musrenbang kelurahan banyak pihak-pihak terkait yang ikut serta, tidak hanya aparat kelurahan dan dari satuan perangkat kerja daerah (SKPD) Kota Malang saja, hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Andayun menjelaskan terkait penentuan lokasi melalui musrenbang, sebagai berikut “Kalau yang terlibat karena dari musrenbang kelurahan jadi ya ada masyarakat nya sendiri, organisasi perempuan di kelurahan itu, RT, RW, aparat kelurahan...(wawancara pada tanggal 11 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang)”. Banyak pihak yang terlibat dalam pemilihan lokasi pemberdayaan perempuan melalui musrenbang, selain aparat kelurahan, masyarakat perempuan sendiri, organisasi perempuan di kelurahan, rukun tetangga, dan rukun warga juga terlibat dalam musrenbang kelurahan. Pernyataan di atas diperkuat oleh pernyataan

yang dikemukakan oleh Ibu Maria selaku Kepala Seksi Partisipasi dan Edukasi Perempuan DP3AP2KB Kota Malang, sebagai berikut:

“Karena kita melalui musrenbang kelurahan, jadi yang terlibat pertama ya jelas masyarakat perempuan sendiri, lalu RT, RW, organisasi-organisasi perempuan, dan pihak kelurahan, nah nanti setelah aspirasi terkumpul kita pilah-pilah mana dari beberapa kelurahan yang aspirasinya sama, kita adakan kegiatan dan kita undang mereka mereka (wawancara pada tanggal 21 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang).”

Berdasarkan pernyataan Ibu Maria bahwa musrenbang kelurahan di Kota Malang diikuti oleh beberapa pihak terkait, mulai dari masyarakat perempuan, ketua rukun tetangga (RT), ketua rukun warga (RW), organisasi-organisasi perempuan dalam kelurahan tersebut, dan juga pegawai kelurahan setempat. Pernyataan keikutsertaan beberapa pihak seperti masyarakat perempuan dan pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK) dalam musrenbang tersebut juga dibenarkan oleh Ibu Fella selaku masyarakat Kelurahan Purwodadi Kota Malang, pernyataannya sebagai berikut “diikutsertakan mas kalau masyarakat perempuan daerah sini kegiatan musyarawah itu, yang ikut ya RT, RW, anggota PKK, ketua PKK, masyarakat juga, banyak yang ikut itu (wawancara pada tanggal 29 april 2017 di rumah ibu Fella Kelurahan Purwodadi)”. Di Kelurahan Purwodadi dalam kegiatan musrenbang kelurahan banyak pihak yang terlibat, seperti ketua rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), anggota pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), ketua PKK, dan masyarakat perempuan, dan beberapa aparat pemerintah kelurahan setempat.

b. Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat

Sosialisasi merupakan suatu kegiatan yang penting dan berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kegiatan, karena dengan adanya sosialisasi yang baik, akan berdampak pada partisipasi dari masyarakat.

Begitu juga dengan kegiatan pemberdayaan perempuan, sosialisasi merupakan faktor yang mendukung dalam keberhasilan pemberdayaan perempuan, dengan adanya sosialisasi kepada perempuan akan membuat

masyarakat perempuan mengetahui kegiatan yang dilaksanakan. Di

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang sebelum

melaksanakan kegiatan pemberdayaan perempuan melakukan sosialisasi

kepada masyarakat perempuan di Kota Malang, hal ini sesuai dengan

pernyataan Ibu Andayun selaku Kepala Bidang Pemberdayaan

Perempuan DP3AP2KB Kota Malang, sebagai berikut:

“Ada, sosialisasi melalui beberapa kegiatan, seperti melalui pertemuan-pertemuan, melalui penyuluh KB kelurahan, jadi penyuluh KB tidak hanya menyuluh KB saja, tetapi juga bebarapa hal yang terkait dengan kantor ini seperti pemberdayaan perempuan, kita sampaikan juga saat rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan diluar pelatihan (wawancara pada tanggal 11 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang).”

Sosialisasi yang dilakukan oleh dinas DP3AP2KB Kota Malang tentang

pemberdayaan perempuan dilakukan saat ada kegiatan pertemuan-

pertemuan dengan masyarakat perempuan, saat rapat-rapat di luar agenda

pelatihan juga disosialisasikan agenda kegiatan pemberdayaan

perempuan, DP3AP2KB juga melakukan sosialisasi melalui penyuluh

keluarga berencana (KB) yang berada dikelurahan untuk memberitahukan kegiatan pemberdayaan perempuan kepada masyarakat di kelurahannya. Selain itu sosialisasi juga dilakukan melalui komunitas-komunitas perempuan di Kota Malang, hal ini berdasarkan pernyataan dari Ibu Andayun selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kota Malang, sebagai berikut:

“Ada juga kita sharing kan ke temen-temen kita, kita melalui komunitas yang berinteraksi dengan kita, kita nyamperin ke komunitas itu dan menyampaikan bahwa akan ada pelatihan tolong disebarluaskan ke yang lain. Kita juga pakai teknologi, misal pakai WA, FB, Email (wawancara pada tanggal 11 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang).”

Penyebaran informasi tentang pemberdayaan perempuan kepada masyarakat perempuan Kota Malang juga dilakukan dengan memanfaatkan teknologi seperti *whatsapp*, facebook, dan email.

Pernyataan ibu Andayun di atas diperkuat oleh pernyataan ibu Maria selaku Kepala Seksi Partisipasi dan Edukasi Perempuan DP3AP2KB Kota Malang, sebagai berikut:

“Tentu ada, sebelum kita melakukan kegiatan kita selalu memberitahukan ke masyarakat khususnya perempuan, sosialisasinya biasanya melalui kelurahan-kelurahan, lalu kita juga mensosialisasikan melalui penyuluh KB di kelurahan, jadi penyuluh KB di kelurahan tidak hanya mensosialisasikan pentingnya KB, tapi kalau pas ada kegiatan juga membantu mensosialisasikan kegiatan dari dinas ini, (wawancara pada tanggal 21 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang).”

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa sosialisasi pemberdayaan perempuan dilakukan melalui kelurahan-kelurahan dan melalui penyuluh KB yang ada di kelurahan untuk menginfokan kepada masyarakat

khususnya perempuan. Ibu Wiwik selaku Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan juga memperkuat pernyataan tersebut bahwa sudah ada sosialisasi kepada masyarakat perempuan Kota Malang tentang pemberdayaan perempuan, berikut pernyataannya: “iya sosialisasi lewat kelurahan, penyuluh KB, kepada masyarakat langsung, selain itu kita juga memberitahukan ke komunitas-komunitas perempuan yang di Malang untuk membantu menyebarkan kegiatan kita. (wawancara pada tanggal 21 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang).”

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa sosialisasi dilakukan melalui kelurahan, penyuluh KB yang ada di setiap kelurahan, langsung kepada masyarakat dan melalui komunitas-komunitas perempuan yang ada di Kota Malang. Lebih lanjut Ibu Wiwik memperjelas pernyataannya berkaitan dengan sosialisasi melalui kelurahan, berikut pernyataan Ibu Wiwik selaku Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan:

“Ini contohnya, jadi suratnya seperti ini, surat pendelegasian peserta dari kelurahan, jadi kita memberitahukan kepada kelurahan secara lisan, bahwa kita ada kegiatan ini, nah silahkan kelurahan menginfokan kepada warganya, lalu mengirimkan perwakilannya untuk ikut kegiatan kita, ini suratnya, jadi kita kirim kelurahan, suratnya belum ada namanya, nanti yang ngisi siapa yang didelegasikan, itu dari kelurahan. (wawancara pada tanggal 3 Mei 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang).”

Sosialisasi pemberdayaan perempuan dilakukan dengan cara struktural kepada kelurahan secara lisan lalu kelurahan meneruskan informasi tersebut kepada masyarakat perempuan di kelurahannya, pemberitahuan secara lisan tersebut disertai dengan pemberian surat pengiriman

perwakilan dari setiap kelurahan untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan perempuan.

Berikut contoh surat yang dikirimkan kepada kelurahan:

173



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 Jl. Ki Ageng Gribig Nomor 5 Malang Telp/Fax (0341) 717744 email : dp3ap2td@gmail.com

Kode Pos 65137

Malang, 13 Pebruari 2017

Ncmor : 005 / 33 / 35.73.309 / 2017	Kepada :
Sifat : Penting	Yth. Sdr. _____
Lampiran : -	_____
Perihal : UNDANGAN	di MALANG

Mengharap dengan hormat kehadirannya dalam rangka pertemuan yang dilaksanakan pada :

Hari : Senin	
Tanggal : 20 Pebruari 2017	
Pukul : 08.00 WIB s/d selesai	
Tempat : Regent's Park Hotel	
	Jl. Jaksa Agung Suprpto 12 – 16 Malang
Acara : Peningkatan SDM Bagi Perempuan Di Kota Malang	

Demikian atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINASPEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
 PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
 DAN KELUARGA BERENCANA,


Dra. PENNY INDRIANI, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19630420 198903 2 014

Catatan :

1. Undangan harap dibawa
2. Harap membawa Fc KTP
3. Di larang membawa anak

Gambar 4.2 Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Masyarakat

Sumber: Dokumentasi Peneliti 2017

Masyarakat perempuan yang diwakilkan dari kelurahan, diserahkan langsung kepada kelurahan. Dilihat dari data diatas bahwa dalam kegiatan sosialisasi pemberdayaan perempuan banyak pihak yang terlibat mulai dari pegawai DP3AP2KB, penyuluh KB di kelurahan, aparat kelurahan, dan komunitas-komunitas perempuan di Kota Malang. Berdasarkan hasil observasi peneliti tentang sosialisasi pemberdayaan perempuan menghasilkan bahwa sosialisasi memang dilakukan di sela-sela ada pertemuan dengan masyarakat, dan juga dilakukan saat ada pelatihan untuk masyarakat perempuan. Sosialisasi pemberdayaan perempuan juga dilakukan dengan meminta bantuan kepada komunitas-komunitas perempuan untuk menyebarkan informasi kepada anggota dan masyarakat perempuan umumnya.

Sosialisasi kegiatan pemberdayaan perempuan ditujukan kepada masyarakat perempuan pada umumnya, hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Andayun selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kota Malang, sebagai berikut:

“Untuk kegiatan kita untuk perempuan secara umum, dan kita sosialisasikan ke semua, tidak membeda-bedakan, tapi juga ada beberapa pelatihan yang ada kriteria khusus, misal pelatihan border, jadi yang ikut ada kriteria harus bisa menggunakan alat jahit, kalau kita pelatihan di tingkat intermediate ada kriteria khusus, tapi kalau masih di dasar sama semua (wawancara pada tanggal 11 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang).”

Sasaran sosialisasi kegiatan pemberdayaan perempuan kepada masyarakat perempuan keseluruhan, namun ada beberapa kegiatan di tingkat menengah lanjutan yang memang ditujukan kepada masyarakat

yang sudah mempunyai kemampuan dasar di bidang tersebut seperti pelatihan border, dalam sosialisasi disebutkan bahwa masyarakat yang bisa mengikuti kegiatan hanya masyarakat yang sudah mempunyai dasar untuk menjahit. Data informasi mengenai sosialisasi pemberdayaan perempuan melalui kelurahan juga dibenarkan oleh Ibu Naimah selaku masyarakat perempuan dan anggota kelompok kerja 1 (satu) PKK di kelurahan Tlogomas, sebagai berikut:

“Ya ada informasi di kelurahan itu, kan saya juga dikeluarkan di pokja satu, pelatihan pelatihan itu ada informasinya di kelurahan, dari ekonomi itu seperti pengelolaan hasil setempat itu loh, dulu juga pernah ada juga kegiatan dari dinas itu di kelurahan sini tentang bahaya narkoba bagi anak, karena harus ada perwakilan dari setiap RT ya anak saya ini yang saya suruh ikut (wawancara pada tanggal 26 April 2017 di rumah Ibu Naimah Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru).

Informasi mengenai pemberdayaan perempuan dari DP3AP2KB memang sampai di Kelurahan, salah satunya di kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Namun sosialisasi yang dilakukan tidak sepenuhnya sampai kepada masyarakat, ada beberapa masyarakat perempuan yang tidak pernah mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan dari DP3AP2KB, salah satunya Ibu Nur Mas'adah selaku masyarakat perempuan Kelurahan Purwantoro, berikut pernyataannya:

“Saya gak pernah tau dan juga gak pernah dapat informasi kalau ada acara dari dinas itu, dari PKK disini juga gak pernah ada kegiatan seperti itu, belum pernah dapat info saya kalau ada kegiatan pemberdayaan perempuan dari dinas pemberdayaan perempuan itu (wawancara pada tanggal 26 April 2017 di rumah Ibu Nur Mas'adah di Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing).

Berdasarkan pernyataan Ibu Mas'adah masyarakat perempuan yang tidak bertugas di kelurahan bahwa tidak pernah mendapatkan sosialisasi atau informasi tentang kegiatan pemberdayaan perempuan dari DP3AP2KB Kota Malang. Pernyataan Ibu Mas'adah diatas didukung oleh pernyataan dari Ibu Febri Rahayu P. selaku masyarakat perempuan di kelurahan Tulusrejo, sebagai berikut:

“Aku gak pernah denger i kalau ada kegiatan pemberdayaan perempuan, ini aja aku baru denger dari mas nya ini kalau ada pemberdayaan itu, masih asing gitu loh, dari kelurahan juga kurang tau aku kalau info ada kegiatan pemberdayaan (wawancara pada tanggal 27 April 2017 di Karang Besuki).

Ibu Ferry tidak pernah mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan, dari kelurahan juga belumb pernah mendapatkan sosialisasi adanya kegiatan pemberdayaan perempuan dari DP3AP2KB Kota Malang. Selain itu Ibu Fella selaku masyarakat Kelurahan Purwodadi mengungkapkan hal yang sama, berikut pernyataannya:

“Tidak pernah dapat sosialisasi saya kalau ada kegiatan pemberdayaan perempuan, jadi tidak tau, kalau di kelurahan sini kurang ada informasi-informasi yang cukup acara seperti itu, kalau di kelurahan blimbing sana sering mas dapat informasi-informasi seperti itu, saya Tanya ke teman saya itu sering dapat, seperti pemberian susu bagi itu menyusui di posyandu gitu mereka sering ada infonya, kalau di sini jarang ada info seperti itu. Kalau acara dari PKK wilayah sini ada mas biasanya tapi ya jarang gak selalu setiap bulan, kalau PKK nya yang rutin setiap bulan ya kumpul itu. (wawancara pada tanggal 27 April 2017 di Rumah Ibu Fella Kelurahan Purwodadi).

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa Ibu Fella tidak pernah mendapatkan sosialisasi tentang kegiatan pemberdayaan perempuan baik

dari DP3AP2KB langsung maupun sosialisasi dari pihak Kelurahan Purwodadi.

Sosialisasi tidak hanya dilakukan kepada masyarakat, untuk menghindari terjadinya kesalahan komunikasi di internal dinas, kegiatan pemberdayaan perempuan juga disosialisasikan di internal dinas, hal ini berdasarkan pernyataan dari Ibu Andayun selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kota Malang, sebagai berikut:

“Ada, saat penyusunan rencana kerja, semua bidang dikumpulkan oleh secretariat, dan kita mengppresentasikan kegiatan kita, tujuannya apa, sasarannya siapa, kita sosialisasikan ke mereka, jadi sosialisasi kita di internal sudah sejak awal penyusunan (wawancara pada tanggal 11 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang).”

Sosialisasi di internal DP3AP2KB dilakukan saat penyusunan rencana kerja, dalam kegiatan itu, bidang pemberdayaan perempuan memaparkan kepada seluruh pegawai DP3AP2KB tentang kegiatan dari pemberdayaan perempuan. Pernyataan di atas diperkuat oleh pernyataan dari Ibu Maria selaku Kepala Seksi Partisipasi dan Edukasi Perempuan DP3AP2KB Kota Malang, sebagai berikut:

“Aa sosialisasi di pegawai dinas sendiri, ini mas, pas awal penyusunan program, kita mempresentasikan ke semua pegawai, program-program kita apa saja kegiatannya apa saja, sasarannya siapa, seperti itu, jadi di internalnya waktu penyusunan program. (wawancara pada tanggal 21 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang).”

Ibu Maria mengungkapkan bahwa sosialisasi dilakukan kepada internal kepegawaian DP3AP2KB di awal saat ada kegiatan penyusunan program di internal dinas, disitu ada pemaparan mengenai kegiatan dari

pemberdayaan perempuan. Ibu Wiwik selaku Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan DP3AP2KB juga memperkuat pernyataan adanya sosialisasi atau komunikasi di internal, berikut pernyataannya: “kalau di internal kita juga koordinasi tidak informal biasanya, jadi sosialisasinya kalau kita ketemu dengan pegawai lain, kita sampaikan kalau ada acara (wawancara pada tanggal 21 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang).” Berdasarkan pernyataan Ibu Wiwik bahwa sosialisasi di internal juga dilakukan dengan cara informal, atau saat bertemu dengan pegawai dinas, disampaikan tentang adanya kegiatan pemberdayaan perempuan. Hasil observasi peneliti bahwa memang adanya koordinasi dan sosialisasi secara informal saat ketemu dengan pegawai yang lain DP3AP2KB Kota Malang.

c. Proses Pemberdayaan

1. Mengidentifikasi dan Mengkaji Potensi

Setiap daerah mempunyai potensi masing-masing, begitu juga dengan masyarakat perempuan, masyarakat perempuan di setiap wilayah mempunyai potensi dan permasalahan masing-masing, sehingga sebelum melakukan pemberdayaan perempuan perlu adanya pengkajian potensi, masalah dan peluang di setiap wilayah. Hal itu dimaksudkan agar pemberdayaan perempuan yang dilakukan benar-benar tepat dan bisa menyelesaikan permasalahan dan bisa meningkatkan kehidupan masyarakat perempuan. DP3AP2KB Kota Malang sebelum melakukan perencanaan kegiatan pemberdayaan

perempuan, melakukan pengkajian potensi dan permasalahan terlebih dahulu, hal ini berdasarkan pernyataan dari Ibu Andayun selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kota Malang, sebagai berikut:

“Kalau potensi kita gambarkan dalam profil database perempuan yang kita buat, yang mencakup gambaran kondisi perempuan di kota malang, lalu kita kaji dan kita buat kebijakan, program dan kegiatan, pembuatan kebijakan itu berdasarkan data, yang misalnya kondisi perempuan yang kurang baik (wawancara pada tanggal 11 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang).”

Pengkajian dilakukan dengan cara melihat data base tentang perempuan yang sudah dibuat terkait keadaan perempuan di Kota Malang, berdasarkan data base tersebut dilakukan analisis apa yang kurang, sehingga timbul kebijakan, program, dan kegiatan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Pembuatan data base perempuan dilakukan dengan sistim *top down* atau dari atas ke bawah, tidak melibatkan masyarakat, hal ini berdasarkan pernyataan dari Ibu Andayun selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kota Malang, sebagai berikut:

“Iya kan dari bawah ke atas sistemnya, kalau top down sebenarnya ada juga tapi tidak banyak, misal kita ada perencanaan yang top down, misal kita pembuatan data base perempuan dalam rangka untuk penyusunan kebijakan, itu dari top down, tidak dari masyarakat, yang nantinya untuk penyusunan rencana kerja (wawancara pada tanggal 11 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang).”

Selain pengkajian potensi dari atas, pengkajian potensi dan permasalahan juga dilakukan dengan melibatkan masyarakat, hal ini

berdasarkan pernyataan dari Ibu Andayun selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kota Malang, sebagai berikut:

“Kalau yang terlibat karena dari musrenbang kelurahan jadi ya ada masyarakatnya sendiri, organisasi perempuan di kelurahan itu, RT, RW, aparat kelurahan, jadi pada saat pak RT mengusulkan ke pak RW ini juga harus dilihat potensi masyarakatnya, misalnya masyarakatnya ini banyak gizi buruknya ya jangan mengusulkan yang lainnya, ya usulkan untuk meningkatkan gizi burunya (wawancara pada tanggal 11 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang).”

Pengkajian potensi dilakukan melalui musrenbang kelurahan, dengan cara masyarakat di dorong untuk bisa mengidentifikasi permasalahan yang sedang dialaminya dan potensi yang ada, sehingga sebelum adanya musrenbang kelurahan, ketua rukun tetangga sebelumnya sudah mengkaji permasalahan dan potensi masyarakat perempuannya, yang nantinya akan diaspirasikan. Pernyataan serupa juga dikeluarkan oleh Ibu Maria selaku Kepala Seksi Partisipasi dan Edukasi Perempuan DP3AP2KB Kota Malang, sebagai berikut:

“Jadi kan gini, musrenbang kelurahan kan dimulai dari masyarakat perempuan mengusulkan kepada ketua RT, nah dalam usulan itu ketua RT juga harus melihat apakah usulannya sesuai dengan potensi masyarakatnya atau tidak kalau sesuai ya diusulkan ke RW, lalu ke tingkat kelurahan. (wawancara pada tanggal 21 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang).”

Pengkajian potensi dan permasalahan dilakukan dengan sistem *bottom up* atau dari bawah ke atas, ketua rukun tetangga juga melakukan pengkajian potensi sebelum mengaspirasikan keinginan warga dalam forum musrenbang kelurahan. Lebih lanjut Ibu Maria selaku Kepala

Seksi Partisipasi dan Edukasi Perempuan DP3AP2KB Kota Malang,
menambahkan pernyataannya, sebagai berikut:

“Ya seperti yang saya katakan tadi, kita melalui musrenbang kelurahan, jadi sebelum RT mengusulkan, RT juga harus tau potensinya atau permasalahan yang ada di masyarakatnya, jadi pengkajian permasalahan perempuan ada, ya melalui musrenbang tadi melalui RT nya sendiri sendiri, jadi kan bisa lebih tepat gitu, karena kan mereka yang tau masyarakatnya (wawancara pada tanggal 21 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang).”

Pengkajian potensi dilakukan sejalan dengan diadakannya musrenbang kelurahan, sebelum dari ketua rukun tetangga mengusulkan aspirasi dari masyarakat perempuan di wilayahnya, harus ada pengkajian terlebih dahulu apakah sudah sesuai atau belum.

Pernyataan diatas diperkuat oleh pernyataan Ibu Wiwik selaku Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan DP3AP2KB sebagai berikut: “sama seperti yang dikatakan bu maria, aaa kita melalui musrenbang kelurahan, jadi dari bawah yaitu masyarakat khususnya perempuan mengusul kan ke atas, sampai ke kita. (wawancara pada tanggal 21 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang).” Sistem pengkajian potensi yang dilakukan DP3AP2KB Kota Malang dilakukan dengan melibatkan masyarakat perempuan, masyarakat dilibatkan untuk mengidentifikasi apa yang menjadi permasalahannya dan apa yang menjadi potensinya. Pernyataan diatas didukung pernyataan dari Ibu Nur Mas’adah selaku masyarakat Kelurahan Purwantoro, sebagai berikut:

“Rapat penyusunan rencana pembangunan, saya diajak dan ikut, tapi di tingkat RT lalu ke tingkat RW, kalau dikelurahan sendiri saya gak pernah ikut, ya dalam rapat itu kita juga mengusulkan kebutuhan kebutuhan dari perempuan di daerah sini, tapi kalau pas dikelurahannya saya tidak pernah ikut, RT dan RW biasanya yang mewakili (wawancara pada tanggal 26 April 2017 di rumah ibu Mas’adah di kelurahan Purwantoro).

Saat musyawarah rencana pembangunan masyarakat juga bisa mengusulkan apa yang menjadi kebutuhan mereka.

Pengkajian potensi dan permasalahan yang dilakukan dengan sistim *button up* melibatkan berbagai pihak, karena dilakukan sejalan dengan kegiatan musrenbang kelurahan, hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Andayun selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kota Malang, sebagai berikut: “jadi banyak pihak yang terlibat, RT, RW, kelurahan (wawancara pada tanggal 11 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang)”. Setidaknya ada 3 (tiga) sektor yang terlibat dalam pengkajian potensi yaitu ketua rukun tetangga, ketua rukun warga dan aparatur kelurahan. Ibu Maria selaku Kepala Seksi Partisipasi dan Edukasi Perempuan DP3AP2KB Kota Malang memperkuat pernyataan dari Ibu Andayun, sebagai berikut:

“iya mas, yang terlibat ya masyarakat perempuan sendiri, RT, RW, organisasi atau komunitas perempuan yang ada di kelurahan itu, aparat kelurahan sendiri (wawancara pada tanggal 21 April 2017 bertempat di kantor DP3AP2KB Kota Malang).” Berdasarkan pernyataan diatas bahwa yang terlibat dalam pengkajian potensi dan permasalahan untuk kegiatan pemberdayaan perempuan mulai dari

masyarakat perempuan sendiri, ketua rukun tetangga, ketua rukun warga, organisasi atau komunitas perempuan di kelurahan tersebut dan dari pihak kelurahan.

2. Menyusun Rencana Kegiatan Kelompok

Sebelum adanya kegiatan pemberdayaan perempuan, perlu disusun terlebih dahulu rencana kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, sehingga dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan perempuan mempunyai arah tujuan yang jelas. DP3AP2KB melakukan penyusunan kegiatan rencana kelompok berdasarkan hasil kajian fenomena baik tingkat pusat maupun lokal, hal ini berdasarkan pernyataan dari Ibu Andayun selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kota Malang, sebagai berikut:

“Jadi kita kalau membuat program, yang sifatnya dari dinas, kita mengacu pada fenomena nasional, seperti program pusat kita adopsi karena intruksi dari pusat, kedua kita menggunakan fenomena regional atau Jawa Timur, bagaimana sih pembangunan di Jawa Timur, sekarang di Jawa Timur lagi ada masalah apa sih, kita sampaikan dalam suatu program, yang ketiga kita mengacu pada fenomena di tingkat lokal atau Malang, artinya kita motret gambaran perempuan dengan rapat koordinasi dengan wilayah, misal ada kelurahan yang tidak bisa mengcover kegiatan yang menjadi potensi, nah kita dengan berkoordinasi dengan wilayah bisa mengcover kegiatan tersebut, selama anggaran di dinas mencukupi, jadi banyak pihak yang terlibat, RT, RW, kelurahan (wawancara pada tanggal 11 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang).”

Penyusunan rencana kegiatan kelompok pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kota Malang mengacu pada

fenomenal nasional, fenomena regional atau fenomena di Jawa Timur, dan fenomena lokal atau gambaran masyarakat perempuan yang sedang terjadi saat ini. Penyusunan rencana kegiatan kelompok juga melibatkan berbagai pihak mulai dari rukun tetangga, rukun warga, dan kelurahan. Lebih lanjut Ibu Andayun menyatakan dalam penyusunan rencana kegiatan kelompok juga disinergiskan dengan hasil dari musrenbang kelurahan, berikut pernyataan dari Ibu Andayun selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kota

Malang:

“Jadi gini kalau kita membuat, kita kembali ke undang-undang sistem perencanaan nasional tentunya bahwa sistem perencanaan berbarengan dengan sistem penganggaran, kalau sudah kita tau banyak program-program yang wajib, ada fenomena ini fenomena ini, kemudian musrenbang kita sinergiskan akhirnya kan terbentuk dan kita presentasikan saat penyusunan, jadi satu dinas punya agenda tersendiri untuk menyusun program, dalam rapat itu kita sampaikan tujuannya apa, sasarannya apa, jadi kita bisa mengukur kinerjanya tersebut, oh ternyata ini tidak terlalu signifikan dengan pengukuran kinerjanya, ini akan kita ganti dengan program lain, jadi kita punya program super prioritas, prioritas, dan biasa, jadi kalau prioritas program wajib-wajib dari pusat dan regional kita masukkan (wawancara pada tanggal 11 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang).”

Penyusunan rencana kegiatan pemberdayaan dilakukan dengan mengkaji fenomena mulai dari fenomena nasional sampai fenomena lokal, lalu disinergiskan dengan hasil dari musrenbang kelurahan sampai muncul rencana kegiatan apa yang akan dilakukan. Pernyataan diatas diperkuat oleh Ibu Wiwik selaku Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan DP3AP2KB sebagai berikut:

“Owh iya jadi gini alur penyusunannya kan ada dua, dari bawah yang dari musrenbang kelurahan tadi terus ke kecamatan lalu di dinas ada agenda sendiri untuk menindaklanjuti usulan-usulan dari masyarakat tadi, kita lihat juga dengan keadaan perempuan di kota malang, setelah itu kalau sudah kita susun programnya, ada juga yang program wajib dari provinsi, nah itu dari atas nyusunnya dari provinsi lalu kita rapatkan dan kita susun kegiatannya (wawancara pada tanggal 21 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang).”

Penyusunan rencana kegiatan pemberdayaan perempuan dilakukan dengan mengkolaborasikan antara hasil dari musrenbang kelurahan dan kajian terhadap fenomena perempuan yang dilakukan DP3AP2KB Kota Malang. Pernyataan diatas juga didukung oleh pernyataan Ibu Naimah selaku masyarakat dan anggota kelompok kerja PKK kelurahan Tlogomas, sebagai berikut:

“Ya jelas ada yang diikuti, kalau sekarang di pak lurahnya bagus mas, jadi kita dalam menyusun pembangunan juga dilibatkan, kita dimintain aspirasi, diajak diskusi keinginannya apa, mau mengeturakan apa, mau kegiatan apa, selalu ditanyain sama pak lurahnya (wawancara pada tanggal 26 April 2017 di rumah Ibu Naimah Kelurahan Tlogomas).”

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa dalam penyusunan rencana kegiatan pemberdayaan melalui musrenbang kelurahan, masyarakat perempuan dikutsertakan dan di berikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Pernyataan Ibu Naimah juga didukung oleh pernyataan Ibu Fella selaku masyarakat Kelurahan Purwodadi sebagai berikut: “diikutsertakan mas kalau masyarakat perempuan daerah sini kegiatan musyarawah itu, yang ikut ya RT, RW, anggota PKK, ketua PKK, masyarakat juga, banyak yang ikut itu (wawancara pada tanggal

29 April 2017 di rumah Ibu Fella Kelurahan Purwodadi)".

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa masyarakat dilibatkan dalam penyusunan rencana pembangunan termasuk penyusunan rencana kegiatan pemberdayaan perempuan. Berikut foto dokumentasi kegiatan musrenbang di salah satu kelurahan yang melibatkan masyarakat perempuan:



Gambar 4.3 Dokumentasi Musrenbang Kelurahan
Sumber: Kelsukun.Malangkota.go.id

Perlibatan masyarakat dan beberapa pihak yang terkait dalam penyusunan rencana kegiatan pemberdayaan perempuan hanya sebatas pengusulan saat musrenbang, hal ini berdasarkan pernyataan dari Ibu Andayun selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kota Malang: "owh tidak bisa, pihak lain hanya sebatas pengusulan saja, komunitas, masyarakat dll hanya sebatas usulan saja, analisisnya kita sendiri, dan saat presentasi ya kita sendiri, (wawancara pada tanggal 11 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota

Malang)”. Penyusunan rencana kegiatan pemberdayaan perempuan di internal DP3AP2KB tidak melibatkan masyarakat. Masyarakat, komunitas dan pihak lain yang terkait hanya sebatas mengusulkan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan tentang perempuan. Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan Ibu Wiwik selaku Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan DP3AP2KB sebagai berikut:

“Kalau fasilitator tidak ikut dalam agenda yang dinas tadi, hanya sebatas bisa mengusulkan, jadi kalau di dinasnya ya kita-kita pegawai yang terlibat, kalau masyarakat perempuan dsb itu ikut sampai pengusulan musrenbang tadi. (wawancara pada tanggal 21 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang).”

Masyarakat dan fasilitator hanya terlibat pada saat pengusulan dalam musrenbang, saat penyusunan dan analisis di internal dinas hanya pegawai dari dinas yang terlibat, tidak ada pihak eksternal yang terlibat dalam kegiatan penyusunan kegiatan pemberdayaan perempuan di internal DP3AP2KB Kota Malang.

Setelah program dan kegiatan tersusun, dalam penyusunan konsep pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan, ada beberapa pihak yang terlibat, hal ini berdasarkan pernyataan dari Ibu Andayun selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kota Malang sebagai berikut: “Ih ada juga yang akan berkolaborasi dengan kita, mulai dari pembuatan konsep sampai dengan permodalan (wawancara pada tanggal 11 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang)”. Lebih lanjut Ibu Maria selaku Kepala Seksi Partisipasi dan

Edukasi Perempuan DP3AP2KB Kota Malang menambahkan pernyataan dari Ibu Andayu, sebagai berikut: “yang terlibat jelas orang sini atau pegawai bidang pemberdayaan perempuan, selain itu juga biasanya kita melibatkan fasilitator dalam pembuatan konsepnya, kan mereka yang lebih profesional jadi lebih tau. (wawancara pada tanggal 21 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang)”.

Penyusunan konsep kegiatan pemberdayaan perempuan melibatkan pegawai internal DP3AP2KB dan juga melibatkan fasilitator dari kegiatan yang direncanakan. Pernyataan Ibu Maria diperkuat oleh pernyataan Ibu Wiwik selaku Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan DP3AP2KB sebagai berikut: “kalau yang buat konsep biasanya kita sendiri, biasanya juga melibatkan orang luar seperti instruktur buat pelatihan. (wawancara pada tanggal 21 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang)”. Berdasarkan pernyataan Ibu Wiwik dalam penyusunan konsep kegiatan pemberdayaan perempuan ada keterlibatan dari fasilitator dari kegiatan tersebut.

3. Menerapkan Rencana Kegiatan Kelompok

Setelah adanya perumusan rencana kegiatan pemberdayaan perempuan, kegiatan selanjutnya adalah penerapan dari rencana itu sendiri. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan perempuan dan memunculkan pengusaha-pengusaha baru. Hal ini berdasarkan pernyataan dari Ibu

Andayun selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan

DP3AP2KB Kota Malang sebagai berikut:

“Untuk di sektor ekonomi, kita ada pelatihan pelatihan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya perempuan, pembinaan di, kita punya binaan untuk meningkatkan perekonomian, misal di preman super, yang arahnya mereka punya usaha lah... (wawancara pada tanggal 11 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang).”

Untuk mencapai tujuan dari pemberdayaan perempuan diatas dilakukan dengan melalui beberapa kegiatan seperti kegiatan pelatihan dan juga pembinaan kepada komunitas-komunitas perempuan yang ada di Kota Malang seperti komunitas perempuan mandiri sumber perubahan (Preman Super). Berikut dokumentasi dari kegiatan pemberdayaan perempuan sektor ekonomi untuk meningkatkan sumber daya manusia di organisasi perempuan dan pelatihan yang dilakukan:



Gambar 4.4 Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Organisasi Perempuan

Sumber: Dokumen DP3AP2KB



Gambar 4.5 Pelatihan Pengelolaan Sayur

Sumber: Dokumen DP3AP2KB

Selain kegiatan pemberdayaan pelatihan ketrampilan dan pembinaan komunitas atau organisasi, ada juga kegiatan pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui pelatihan *public speaking*, hal ini berdasarkan pernyataan dari Ibu Andayun selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kota Malang sebagai berikut:

“Kita selain pembinaan organisasi perempuan dan pelatihan-pelatihan, kemarin kita juga ada pelatihan *public speaking* untuk perempuan, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, selama ini seperti di even-even kelurahan, cara berbicara mereka tidak sesuai dengan vacuumnya, nah itu kita arahkan, toh apabila mereka berhasil dalam bidang ini banyak yang makek, kemudian kita ini yang akan berlangsung penilaian perempuan insiratif di kota malang, sehingga bisa menjadi contoh bagi yang lain, kita ingin tau sampai sejauh mana perempuan di menginspirasi masyarakat (wawancara pada tanggal 11 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang).”

Berdasarkan permasalahan perempuan di Kota Malang banyak yang masih belum mempunyai cara berkomunikasi yang baik, sehingga DP3AP2KB memberikan pelatihan *public speaking* untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Berikut dokumentasi pelatihan *public speaking* dan perempuan inspiratif 2017:



Gambar 4.6 Pelatihan *Public Speaking*

Sumber: Dokumen DP3AP2KB



Gambar 4.7 Pemilihan Perempuan Inspiratif

Sumber: Dokumentasi Peneliti 2017

Selain itu untuk menunjang pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi diadakannya kegiatan penilaian perempuan inspiratif. Lebih lanjut Ibu Andayun juga mengungkapkan adanya pelatihan manajemen keuangan, hal ini berdasarkan pernyataan berikut: “ada, kemarin ada pelatihan manajemen keuangan, pokoknya kantor ini itu kegiatannya mencakup seluruh kegiatan (wawancara pada tanggal 11 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang)”. Pernyataan diatas diperkuat oleh pernyataan ibu Maria selaku Kepala Seksi Partisipasi dan Edukasi Perempuan DP3AP2KB Kota Malang sebagai berikut:

“Banyak mas, kegiatannya, seperti program pelatihan ketrampilan bagi perempuan, peningkatan sumber daya perempuan, seperti yang sudah dilakukan pelatihan manajemen keuangan, terus yang sedang berjalan ini ada pelatihan wanita inspiratif, itu untuk mengapresiasi perempuan-perempuan di kota malang yang sudah memberikan inspirasi kepada masyarakat sekitar, juga untuk menjadikan motivasi masyarakat yang lainnya, dan masih banyak mas, saya tidak hafal coba nanti dilihat saja daftar program-program nya. (wawancara pada tanggal 21 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang).”

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa ada beberapa kegiatan pemberdayaan perempuan di DP3AP2KB diantaranya pelatihan ketrampilan, peningkatan sumber daya perempuan seperti pelatihan manajemen keuangan, dan pelatihan wanita inspiratif. Ibu Wiwik selaku Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan DP3AP2KB juga memperkuat pernyataan diatas, berikut pernyataanya: “ada juga seperti yang sudah dilakukan yaitu pelatihan

public speaking untuk para perempuan, jadi untuk menunjang kita juga melakukan pelatihan public speaking untuk mereka (wawancara pada tanggal 21 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang)". Untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan di Kota Malang diadakanya kegiatan pelatihan *public speaking* bagi perempuan di Kota Malang. Berikut tabel daftar kegiatan pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi tahun 2015, 2016 dan 2017:

Tabel 4.5 Daftar Kegiatan Pemberdayaan Perempuan di Sektor Ekonomi

No	Tahun	Nama Kegiatan
1.	2015	Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan PKK Kota Malang;
		Pembinaan kemampuan dan ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil tembakau Melalui Pelatihan Ketrampilan desain dan motif batik Malang
		Pembinaan kemampuan dan ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil tembakau Melalui Pelatihan Membuat Kue kering dan aneka makanan
2.	2016	Pembinaan kemampuan dan ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil tembakau Melalui Pelatihan Pengolahan Kripik Sayur Untuk Perempuan
		Pembinaan kemampuan dan ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil tembakau Melalui Pelatihan Pengolahan Kripik Buah Untuk Perempuan
		Peningkatan Sumber Daya Perempuan Melalui Pelatihan Manajemen Keuangan
		Peningkatan Sumber Daya Perempuan Melalui Pelatihan Pembuatan Handycraft
3.	2017	Pengembangan Kapasitas SDM Organisasi Perempuan
		Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi perempuan
		Peningkatan SDM bagi perempuan
		Penilaian peran perempuan inspiratif Kota Malang
		Pembinaan peran perempuan dalam pembangunan di Kota Malang

Sumber: olahan peneliti 2017 dari LAKIP 2015, LAKIP 2016, dan Matrik Program 2017 DP3AP2KB Kota Malang

Selain kegiatan yang sudah di rencanakan di awal tahun, tetapi ada juga kegiatan yang sebelumnya belum direncanakan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Andayun selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kota Malang sebagai berikut:

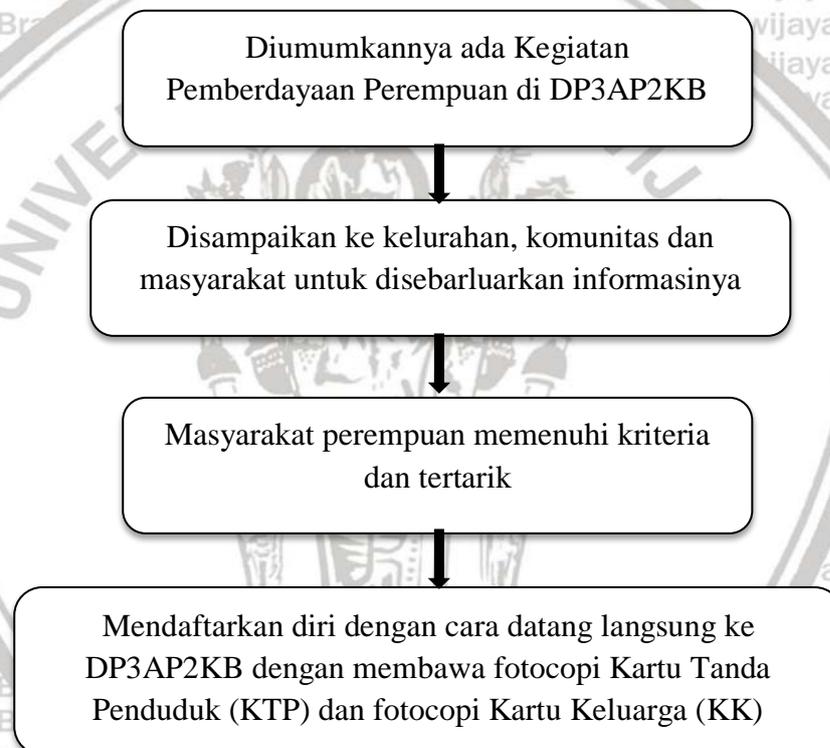
“Kan program semua sudah disusun dengan apbd ya mas, namun apabila dalam rangka peningkatan kinerja di anggaran tidak ada, istilahnya kita koordinasi dulu, kita buat konsepnya dan bekerjasama dengan lembaga lain, jadi istilahnya pandai-pandainya kita ngomong-ngomong dengan orang yang punya keterkaitan, (wawancara pada tanggal 11 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang).”

Untuk meningkatkan kinerja, tidak menutup kemungkinan ada kegiatan susulan yang sebelumnya belum dianggarkan di anggaran pendapatan dan belanja daerah, kegiatan dilaksanakan dengan cara bekerja sama dengan lembaga yang lain.

Proses pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi tidak seluruh masyarakat perempuan di Kota Malang bisa mengikuti. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk bisa mengikuti kegiatan pemberdayaan, hal ini berdasarkan pernyataan Ibu Andayun selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kota Malang sebagai berikut:

“Dengan cara mendaftarkan diri ke sini, dengan kriteria domisili malang, kaum perempuan pra sejahtera, kalau pun tidak ada pra sejahtera ya diatasnya, ada kriteria pada saat kita mensosialisasikan, kita juga kasih kriteria non pns, jadi kami menerima peserta yang non pns (wawancara pada tanggal 11 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang).”

Masyarakat perempuan yang bisa mengikuti kegiatan pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi adalah perempuan yang berdomisili di Kota Malang, mempunyai kondisi ekonomi pra sejahtera, dan bukan pegawai negeri sipil (PNS). Setelah memenuhi kriteria itu, masyarakat bisa langsung mendaftar ke DP3AP2KB. Berikut mulai diumumkan sampai pendaftaran:



Bagan 4.3 Alur Kegiatan Pemberdayaan Perempuan di Sektor Ekonomi

Sumber: hasil olahan peneliti 2017

Proses pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan DP3AP2KB di bantu dengan fasilitator yang sudah ditunjuk. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Andayun selaku

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kota Malang sebagai berikut:

“Kalau fasilitator ada, tapi dari luar, jadi konsep di kantor ini tidak sama dengan konsep di disnaker, pengambilan fasilitator dari luar dalam rangka peningkatan dan profesionalisnya tiap bidang itu, kalau kita kan punya konsep tersendiri, tiap dinas berbeda-beda, untuk dinas kami, tidak terlalu bisa banyak kelas, kalau di kita misal pelatihan masak, instruktur kita ambilkan dari bogasari baking center, rosebrand, kemudian dari BLK, dsb (wawancara pada tanggal 11 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang).”

Fasilitator dalam kegiatan pemberdayaan perempuan yang diselenggarakan oleh DP3AP2KB berasal dari lembaga ekstenal.

DP3AP2KB bekerjasama dengan lembaga eksternal untuk menjadi fasilitator atau menjadi instruktur dalam setiap kegiatan pemberdayaan perempuan dengan pertimbangan profesionalitas setiap bidang yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Pernyataan Ibu Andayun diatas didukung oleh pernyataan Ibu Maria selaku Kepala Seksi Partisipasi dan Edukasi Perempuan DP3AP2KB Kota Malang, sebagai berikut:

“Kalau fasilitator buat kegiatan pemberdayaan perempuan ada mas, soalnya kan kita semisal mengadakan kegiatan pelatihan membuat handy craft gitu ya, nah kan kita juga belum tentu bisa membuatnya, makanya kita mengundang fasilitator atau guru lah yang sudah ahli di bidangnya untuk mengajari, karena kita mencari yang sudah professional sehingga bisa bagus di palatihannya. (wawancara pada tanggal 21 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang).”

Berdasarkan pernyataan diatas, fasilitator atau instruktur dalam kegiatan pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi diambilkan dari lembaga yang lebih ahli di bidangnya. Pernyataan tersebut juga

didukung oleh pernyataan ibu Wiwik selaku Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan DP3AP2KB juga

memperkuat pernyataan diatas, berikut pernyataanya:

“Iya ada seperti yang dibilang bu maria tadi, jadi ya untuk fasilitatornya kita kerjasama dengan lembaga lain, misalkan pelatihan masak, kita kerjasama dengan lembaga yang menangani masalah masalah masak seperti itu, jadi tidak selalu kita yang menjadi fasilitatornya. (wawancara pada tanggal 21 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang).”

Berdasarkan pernyataan Ibu Wiwik, dalam kegiatan pemberdayaan perempuan menggunakan fasilitator dan fasilitator berasal dari lembaga eksternal. Pemilihan fasilitator atau instruktur dalam kegiatan pemberdayaan perempuan berdasarkan beberapa kriteria, hal ini berdasarkan pernyataan dari Ibu Andayun selaku Kepala Bidang

Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kota Malang sebagai berikut:

“Ada mas, kompetensinya, misal gini, kita bikin kue kukus, banyak orang yang bisa bikin kue kukus, tapi kita pakai kompetensi yang mempunyai nilai plus dalam rangka nanti pembinaan di masyarakat, kita ambil yang punya istilahnya dia punya nama besar, sehingga bisa diangkat, dan bisa menjadi bapak asuh dari masyarakat (wawancara pada tanggal 11 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang).”

Pemilihan fasilitator dalam kegiatan pemberdayaan perempuan berdasarkan pada kompetensi atau kemampuan yang dimiliki dan juga nama besar dari lembaga, sehingga bisa meningkatkan ketertarikan.

Pernyataan diatas didukung oleh pernyataan dari Ibu Wiwik selaku Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan DP3AP2KB juga memperkuat pernyataan diatas, berikut pernyataanya:

“Yang jelas pertama kompetensinya atau kemampuannya, selain itu kita biasanya mengambil yang sudah mempunyai nama besar, sehingga bisa menarik masyarakat untuk ikut serta, soalnya kan partisipasi masyarakat penting mas, kan kita mengadakan kegiatan untuk masyarakat khususnya perempuan, jadi ya harus membuat mereka tertarik, biar partisipasinya tinggi (wawancara pada tanggal 21 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang).”

Fasilitator dipilih berdasarkan kemampuan yang dimiliki dan nama besar dari lembaganya, hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan ketertarikan dari masyarakat dan profesionalitas. Berdasarkan hasil observasi peneliti di beberapa kegiatan pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kota Malang, fasilitator atau yang menjadi pemateri atau instruktur berasal dari lembaga yang sudah ahli dibidangnya.

Jumlah fasilitator atau instruktur dalam setiap kegiatan pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi berdasarkan kebutuhan, hal ini berdasarkan pernyataan dari Ibu Andayun selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kota Malang sebagai berikut: “kalau narasumber yang utama satu dan dua, kalau instruktur relatif, tergantung kebutuhan, dan menyesuaikan dengan anggaran juga, (wawancara pada tanggal 11 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang)”. Banyaknya jumlah fasilitator dalam setiap kegiatan pemberdayaan perempuan tidak sama, jumlahnya berdasarkan kebutuhan, dan disesuaikan dengan anggaran juga. Ibu Wiwik selaku Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan DP3AP2KB juga mengeluarkan pendapat yang sama, sebagai berikut: “jumlah

fasilitatornya tidak pasti, tergantung kebutuhan, biasanya satu, dua orang atau bisa lebih, itu tergantung kebutuhan juga, tergantung kegiatannya (wawancara pada tanggal 21 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang)”. Berdasarkan pernyataan Ibu Wiwik bahwa fasilitator dalam kegiatan pemberdayaan perempuan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan setiap kegiatan. Namun fasilitator dalam kegiatan pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi masih sebatas pemateri atau instruktur, tidak mendampingi secara berkelanjutan, hal ini berdasarkan pernyataan dari Ibu Andayun selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kota Malang sebagai berikut:

“Ada beberapa hal, tergantung dari konsep, ada juga yang hanya untuk menjadi pemateri, sampai saat ini masih sebatas menjadi pemateri, tetapi misalkan masyarakat kebingungan bisa komunikasi langsung dengan pematerinya, jadi bisa dibina langsung (wawancara pada tanggal 11 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang).”

Konsep fasilitator dalam pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi masih sebatas menjadi pemateri atau instruktur. Pernyataan diatas juga didukung oleh pernyataan dari Ibu Wiwik selaku Kepala Seksi

Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan DP3AP2KB, sebagai berikut:

“Kalau penyuluh adanya di penyuluh KB, di sebelah, kalau di bidang pemberdayaan perempuan buat kegiatan pemberdayaan tidak ada setau saya, jadi kalau kita ada kegiatan ya kita minta tolong ke penyuluh KB buat memberitahukan ke kelurahan-kelurahan (wawancara pada tanggal 21 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang).”

Fasilitator masih sebatas pemateri, belum sampai fasilitator seperti penyuluh keluarga berencana (KB) yang mendampingi secara berkelanjutan. Pernyataan Ibu Wiwik juga didukung oleh pernyataan Bapak Ayog selaku staf bidang pemberdayaan perempuan DP3AP2KB, sebagai berikut:

“Kalau penyuluh khusus buat pemberdayaan perempuan belum ada, kita jadi satu dengan penyuluh KB, jadi kalau ada kegiatan apa-apa kita minta bantuan ke penyuluh KB buat menginfokan, soalnya biasanya kan kita butuh cepat di sebarluaskan, makanya kita minta tolong penyuluh KB buat meyebarakan informasi (wawancara pada tanggal 28 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang)

Fasilitator pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi belum sampai mendampingi masyarakat perempuan secara berkelanjutan seperti penyuluh keluarga berencana (KB) di setiap kelurahan.

Partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi yang diselenggarakan oleh DP3AP2KB sangat tinggi, hal ini berdasarkan pernyataan dari Ibu Andayun selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kota Malang sebagai berikut: “kalau di malang luar biasa, saya di pemberdayaan perempuan dan melihat perkembangan perempuan sangat luar biasa, dan potensinya juga luar biasa (wawancara pada tanggal 11 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang)”. Partisipasi masyarakat perempuan dalam kegiatan sangat tinggi. Pernyataan diatas didukung pernyataan dari Ibu Maria selaku Kepala Seksi Partisipasi dan Edukasi Perempuan DP3AP2KB Kota Malang, sebagai berikut:

“Kalau partisipasi dalam setiap kegiatan sudah baik mas, misal kegiatan pemilihan wanita inspiratif kemarin, banyak yang ikut juga, nah saat kita undang juga datang, jadi kalau menurut saya partisipasinya sudah baik. (wawancara pada tanggal 21 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang).”

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa partisipasi perempuan dalam kegiatan pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi sudah baik.

Hasil observasi peneliti bahwa perempuan di Kota Malang partisipasinya dalam kegiatan pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi sudah cukup bagus, selalu banyak yang mengikuti setiap kegiatan. Agar partisipasi perempuan dalam kegiatan selalu tinggi,

DP3AP2KB selalu memberikan motivasi-motivasi, hal ini berdasarkan pernyataan dari Ibu Andayun selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kota Malang sebagai berikut:

“Pada saat pelatihan, mesti saya sisipkan motivasi-motivasi kepada mereka, selalu memberikan pembelajaran kepada mereka seperti menyampaikan jadi perempuan tidak hanya menerima saja (wawancara pada tanggal 11 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang).”

Motivasi untuk meningkatkan partisipasi perempuan dilakukan di tengah-tengah kegiatan yang dilakukan dan juga selalu memberikan pembelajaran. Pernyataan Ibu Andayun didukung oleh pernyataan dari

Ibu Maria selaku Kepala Seksi Partisipasi dan Edukasi Perempuan DP3AP2KB Kota Malang, sebagai berikut:

“Jadi gini, untuk meningkatkan partisipasi perempuan, kita selalu memberikan motivasi-motivasi kepada mereka, biasanya yang memberikan Bu Andayun, jadi misal ada pertemuan-pertemuan, pelatihan, Ibu selalu menyisipkan pembelajaran-pembelajaran kepada mereka, untuk agar termotivasi, ada juga melalui kegiatan seperti pemilihan perempuan inspiratif, itu untuk mengapresiasi mereka, itu

juga bisa memotivasi yang lainnya, kita juga mengirim beberapa masyarakat untuk mengikuti pelatihan, di kota lain, mengikuti pameran, itu semua untuk memotivasi para perempuan juga untuk selalu ingin berkembang. (wawancara pada tanggal 21 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang).”

Untuk menjaga partisipasi masyarakat perempuan Kota Malang dalam kondisi tinggi dan selalu berkembang, dilakukan dengan selalu memberikan motivasi di sela-sela kegiatan pemberdayaan, selain itu juga diadakannya kegiatan seperti pemilihan perempuan inspiratif, dan juga diikuti pelatihan dan pameran di luar kota. Pernyataan serupa juga dikemukakan oleh Ibu Andayun selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kota Malang sebagai berikut:

“Selalu kita adakan kegiatan yang mengarah pada untuk memotivasi mereka, seperti pelatihan yang dikemas dalam bentuk lain, seperti ibu-ibu yang membuat coklat, kita kirimkan ke Yogyakarta untuk mengikuti pelatihan, jadi dengan kondisi demikian kan mereka sharing ke yang lain jadi mereka termotivasi (wawancara pada tanggal 11 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang).”

Berdasarkan pernyataan diatas untuk menjaga kondisi masyarakat perempuan di Kota Malang dalam keadaan semangat tinggi dan mempunyai motivasi untuk berkembang, DP3AP2KB melakukan kegiatan dengan kemasan yang berbeda seperti pelatihan coklat yang pelatihannya dilakukan di luar kota. Hasil observasi peneliti dari beberapa kegiatan bahwa memang dalam setiap kegiatan atau pertemuan dengan masyarakat perempuan selalu diselipkan pembelajaran-pembelajaran dan motivasi kepada masyarakat.

4. Memantau Proses dan Hasil

Pemantauan dari setiap proses dan hasil dari kegiatan pemberdayaan perempuan sangatlah penting, karena dengan dilakukannya pemantauan apabila ada sebuah kegagalan dalam proses maupun hasil bisa dilakukan perbaikan secara langsung. DP3AP2KB Kota Malang melakukan pemantauan kepada masyarakat perempuan namun tidak satu persatu, hal ini berdasarkan pernyataan Ibu Andayun selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kota Malang sebagai berikut:

“...Jadi kita tidak bisa memonitor setiap orang karena jumlahnya buanyak, jadi kita sampaikan misalkan ibu-ibu ada kendala bisa disampaikan kepada kami dan kami akan meneruskan ke narasumber atau fasilitatornya, jadi seperti itu (wawancara pada tanggal 11 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang).”

Dikarenakan jumlah masyarakat perempuan yang mengikuti pemberdayaan perempuan banyak sehingga pemantauan yang dilakukan dengan cara partisipatif. Masyarakat perempuan diberikan kesempatan berinteraksi lebih lanjut dengan pegawai DP3AP2KB.

Selain itu pemantauan juga dilakukan dengan mengadakan lomba, hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Andayun selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kota Malang sebagai berikut:

“Nah ini yang sudah kita lakukan, mengadakan lomba, gelar prodak, gelar prodak misalnya kami, membuat lomba makanan berbahan dasar tepung beras, yang diikuti perkomunitas, dan hasilnya yang sudah terjadi luar biasa, dari hasil yang kita dapatkan saat pelatihan dan sekarang jauh berbeda, sudah jauh berkembang, menurut saya monitoring

nya sudah berhasil (wawancara pada tanggal 11 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang).”

Untuk memantau perkembangan masyarakat perempuan yang mengikuti pemberdayaan, DP3AP2KB menggunakan cara dengan mengadakan lomba dan gelar produk tentang pemberdayaan perempuan yang sebelumnya dilakukan. Pernyataan Ibu Andayun diatas diperkuat oleh pernyataan dari Ibu Maria selaku Kepala Seksi Partisipasi dan Edukasi Perempuan DP3AP2KB Kota Malang menambahkan pernyataan dari Ibu Andayun, sebagai berikut:

“Kalau pemantauan satu persatu masyarakat kita sumber daya manusianya belum ada, soalnya kan SDM kita di bidang pemberdayaan perempuan Cuma 6 orang, pemantauan biasanya kita mengadakan kegiatan lagi seperti lomba masak, nah kan dulu ada pelatihan masak, jadi kita buat lomba masak, nah itu untuk memantau bagaimana perkembangan mereka apakah berkembang atau tidak, yang dulu setelah dapat pelatihan bagaimana, sekarang bagaimana, itu yang kita lakukan. Selain itu ini mas biasanya pas saat kegiatan kita sampaikan kepada mereka kalau waktu mencoba dirumah ada yang dibingungan silahkan tanyakan ke kita, nanti kita tanyakan ke fasilitatornya yang dulu, lalu kita sampaikan lagi ke mereka. (wawancara pada tanggal 21 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang).”

Berdasarkan pernyataan Ibu Maria mengingat jumlah sumber daya aparatur dari DP3AP2KB hanya 6 (enam) orang, pemantauan dilakukan dengan mengadakan perlombaan berkaitan dengan pemberdayaan yang dilakukan sebelumnya, hal tersebut dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan masyarakat perempuan setelah adanya pemberdayaan perempuan. Lebih lanjut Ibu Wiwik selaku Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

DP3AP2KB menambahkan bahwa pemantauan dilakukan juga secara informal, berikut pernyataannya: “pemantauannya juga misal kita bertemu salah satu peserta kita juga tanyakan perkembangannya, jadi pemantauan tidak formal (wawancara pada tanggal 21 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang)”. Pemantauan kepada peserta pemberdayaan perempuan juga dilakukan saat bertemu secara informal. Pemantauan yang dilakukan oleh DP3AP2KB tidak melibatkan fasilitator atau instruktur yang sebelumnya menjadi pemateri, hal ini berdasarkan pernyataan dari Ibu Andayun selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kota Malang sebagai berikut: “ya kita tidak mengikutkan mereka, monitornya dari kita sendiri... (wawancara pada tanggal 11 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang)”. Pemantauan yang dilakukan hanya melibatkan pegawai internal DP3AP2KB saja tanpa melibatkan fasilitator. Lebih lanjut Ibu Andayun menambahkan pernyataannya, walaupun tidak melibatkan fasilitator dalam proses pemantauan, namun komunikasi dengan fasilitator tetap terjaga, hal ini berdasarkan pernyataan Ibu Andayun berikut: “jadi keberhasilan pemberdayaan kita sampai mereka mempunyai usaha, dan pemantauan dari kita sendiri, kalau nanti ada masalah kita tanyakan ke narasumber/fasilitatornya (wawancara pada tanggal 11 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang)”. Pernyataan diatas diperkuat oleh pernyataan Ibu Maria selaku Kepala Seksi Partisipasi dan Edukasi

Perempuan DP3AP2KB Kota Malang sebagai berikut: “kalau fasilitatornya tidak ikut, tapi masyarakat bisa, misal ada kesulitan, bisa Tanya ke instruktur atau fasilitatornya, biasanya pas pelatihan itu dikasih kontakannya mas. (wawancara pada tanggal 21 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang)”. Proses pemantauan yang dilakukan tidak melibatkan fasilitator, namun masyarakat perempuan bisa berkomunikasi dengan fasilitator sebelumnya apabila terdapat kesulitan dalam proses berkembang. Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa setelah adanya kegiatan pemberdayaan perempuan ada pemantauan secara informal dari pegawai DP3AP2KB kepada peserta kegiatan pemberdayaan perempuan, selain itu DP3AP2KB juga tetap menjalin komunikasi yang baik dengan fasilitator dalam kegiatan pemberdayaan perempuan, untuk mengantisipasi apabila peserta mengalami kesulitan dalam proses mengembangkan ketrampilannya, bisa berkonsultasi dengan fasilitator.

d. Pemandirian Masyarakat

Setelah adanya proses pemberdayaan perempuan, perlu adanya pendampingan lebih lanjut sampai masyarakat perempuan bisa benar-benar bisa mandiri. DP3AP2KB dalam pemandirian masyarakat masih mendampingi atau membantu dalam proses pencarian modal, hal ini berdasarkan pernyataan dari Ibu Andayun selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kota Malang sebagai berikut:

“Kalau untuk permodalan dengan bentuk uang, karena uang yang mengeluarkan adalah perbankan jadi kita berkoordinasi dengan perbankan, sehingga binaan kita bisa dijadikan sasaran mereka untuk binaan juga, masing-masing khususnya di masing-masing bidang ini mempunyai jalur kesana, jadi untuk kita mengkoordinasikan dengan bank bank terkait, (wawancara pada tanggal 11 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang).”

DP3AP2KB setelah adanya proses pemberdayaan perempuan masih memberikan bantuan kepada masyarakat perempuan yang membutuhkan bantuan modal, dengan cara membantu berkoordinasi dengan pihak perbankan yang mengeluarkan dana. Bantuan akses kepada bank ini dilakukan, karena dinas sudah tidak boleh memberikan bantuan uang tunai kepada masyarakat perempuan, hal ini berdasarkan pernyataan dari Ibu Andayun selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kota Malang sebagai berikut:

“...Namun ketika ada kebijakan bahwa pemerintah tidak bisa menggulirkan dana, jadi kita sekarang tidak bisa menggulirkan dana atau fresh money, karena ini sangat rawan sekali, kemudian kalau yang sekarang peraturan lebih ketat lagi jadi kita sekarang tidak bisa menggulirkan dana ke mereka (wawancara pada tanggal 11 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang).”

Adanya kebijakan pemerintah yang semakin memperketat dengan dilarangnya pemberian modal kepada masyarakat perempuan, sehingga DP3AP2KB berkoordinasi dengan pihak perbankan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat perempuan yang membutuhkan permodalan. Pernyataan diatas juga didukung oleh pernyataan Ibu Wiwik selaku Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan DP3AP2KB sebagai berikut: “nah kalau bantuan modal sudah tidak bisa ngasih sini

mas, soalnya sudah tidak boleh, jadi kita hanya bisa bantu memudahkan akses saja ke perbankan (wawancara pada tanggal 21 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang)". Bantuan untuk permodalan kepada masyarakat perempuan yang membutuhkan, dilakukan berkoordinasi sama pihak bank terkait. Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Maria selaku Kepala Seksi Partisipasi dan Edukasi Perempuan DP3AP2KB Kota Malang sebagai berikut:

"Kalau masalah jaringan buat mengembangkan usaha, trus pemasaran kita sangat terbatas akses mas, biasanya mereka sendiri yang mengembangkan jaringannya, yang memasarkannya kalau permodalan biasanya kita bisa membantu melalui perbankan, jadi kita menjalin komunikasi dengan perbankan terkait, misal ada yang membutuhkan permodalan, kita bisa membantu menyampaikan melalui perbankan, tapi kita tidak bisa memberikan bantuan modal langsung, soalnya sekarang sudah tidak boleh (wawancara pada tanggal 21 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang)."

Masalah permodalan, DP3AP2KB mendampingi masyarakat perempuan yang membutuhkan permodalan untuk mendapatkan modal dari perbankan, namun untuk pemasaran dari DP3AP2KB tidak bisa membantu memasarkan karena terbatasnya akses untuk pemasaran produk. Pernyataan terbatasnya akses pemasaran juga diungkapkan oleh Ibu Andayun selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kota Malang sebagai berikut:

"Mereka sendiri yang mengembangkan pasar atau jaringan, jadi kita sudah tidak punya akses, kan yang paling dominan Cuma dua, permodalan dan marketing, kalau permodalan kita bisa menyampaikan lewat perbankan, nah kalau marketing kita agak susah, karena di dinas terbatas akses, (wawancara pada tanggal 11 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang)."

DP3AP2KB dalam hal pengembangan jaringan dan pemasaran tidak bisa memberikan bantuan dan mendampingi karena keterbatasan akses dalam hal tersebut. Untuk pendampingan secara berkelanjutan untuk pemandirian masyarakat DP3AP2KB masih belum mempunyai program yang sudah direncanakan tentang pendampingan secara berkelanjutan, namun apabila masyarakat perempuan menginginkan pendampingan lebih lanjut bisa mengajukan, hal ini berdasarkan pernyataan dari Ibu Andayun selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kota Malang sebagai berikut: “kalau mereka mengajukan diri bisa, tapi mengajukan sendiri, kalau masyarakatnya masih komit bisa didampingi terus, (wawancara pada tanggal 11 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang)”. Pernyataan di atas juga didukung oleh pernyataan Ibu Maria selaku Kepala Seksi Partisipasi dan Edukasi Perempuan DP3AP2KB Kota Malang sebagai berikut: “kalau disini kayaknya belum ada mas, jadi ya masih pada tahap dasar, tapi masyarakat kalau mau bisa mengajukan diri untuk terus didampingi oleh fasilitatornya itu bisa mengajukan. (wawancara pada tanggal 21 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang)”. Belum ada pendampingan secara berkelanjutan untuk pemandirian masyarakat perempuan, namun apabila masyarakat perempuan menginginkan pendampingan lebih lanjut bisa mengajukan untuk didampingi lebih lanjut oleh fasilitator. Untuk konsep kegiatan pemberdayaan perempuan di DP3AP2KB masih pada tingkat dasar. Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan Ibu Andayun selaku

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kota Malang sebagai berikut:

“Kalau disini konsep dari pelatihannya belum sampek kepada tahap professional, karena faktor waktu dan biaya, kalau disini kita pakai konsep masih pengenalan, sampai pada tahap atau level satu dan dua, jadi kalau yang sudah professional itu di perindustrian, jadi kita program kerjanya berbeda dengan disperindag, (wawancara pada tanggal 11 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang).”

Konsep kegiatan pemberdayaan perempuan di DP3AP2KB masih dalam tahap dasar, hanya untuk mengenalkan kepada masyarakat perempuan, tidak sampai pada tahap profesional.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat

a. Faktor Pendukung

1) Internal

Pelaksanaan setiap tahapan kegiatan pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), ada beberapa faktor di internal dinas yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan tersebut. Salah satunya tersedianya fasilitas gedung pertemuan atau aula yang bisa digunakan untuk kegiatan pemberdayaan perempuan. Hal ini berdasarkan pernyataan Ibu Andayun selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kota Malang sebagai berikut:

“Kalau gini jadi salah satu, kalau di analisis SWOT ya, sarana-prasarana itu menjadi faktor utama dari setiap kegiatan, jadi kegiatan apa saja tentunya membutuhkan

sarpras untuk kelancarannya, kalau sarpras disini seperti aula dan perlengkapannya disediakan buat kegiatan kita, jadi bisa kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan kita,... (wawancara pada tanggal 22 Mei 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang).”

Sarana prasarana seperti aula dan perlengkapannya yang ada di DP3PA2KB Kota Malang bisa digunakan dalam setiap kegiatan pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi. Pernyataan diatas didukung oleh pernyataan Ibu Wiwik selaku Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan DP3AP2KB Kota Malang sebagai berikut:

“Sarana prasarana ya, sudah ada, misal kita juga sudah ada gedung buat kegiatan di lantai dua, jadi kalau mau ada acara bisa digunakan juga, lengkap dengan kursi, sound, proyektor, dllnya (wawancara pada tanggal 21 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang)”.

Tersedianya sarana prasarana yang bisa digunakan dalam kegiatan pemberdayaan perempuan seperti gedung pertemuan yang dilengkapi dengan kursi, sound, dan proyektor. Berikut foto dokumentasi ruang pertemuan di DP3AP2KB Kota Malang yang bisa digunakan untuk kegiatan pemberdayaan perempuan:



Gambar 4.8 Ruang Pertemuan atau Aula DP3AP2KB Kota Malang

Sumber: Dokumentasi peneliti 2017

Selain itu komitmen yang kuat dari kepala dinas juga menjadi faktor yang mendukung dalam setiap tahapan kegiatan pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi, hal ini berdasarkan pernyataan dari Ibu Andayun selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kota Malang sebagai berikut:

“Kepala dinas nya sangat mendukung, karena kan pemberdayaan perempuan merupakan program atau urusan wajib kalau di kita, jadi kepala dinasnya punya komitmen yang tinggi untuk menjalankan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi (wawancara pada tanggal 22 Mei 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang).”

Kepala dinas DP3AP2KB Kota Malang mempunyai komitmen penuh dalam memandirikan perempuan-perempuan di Kota Malang, komitmen tersebut ditunjukkan dengan selalu mendukung setiap program pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi yang dijalankan oleh bidang pemberdayaan perempuan. Adanya komitmen dari kepala dinas DP3AP2KB ini menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan setiap tahapan kegiatan pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi di Kota Malang.

2) Eksternal

Selain faktor pendukung dari internal DP3AP2KB Kota Malang, dalam melaksanakan tahapan kegiatan pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi juga ada beberapa faktor pendukung dari eksternal dinas, seperti partisipasi masyarakat perempuan yang tinggi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Andayun selaku Kepala

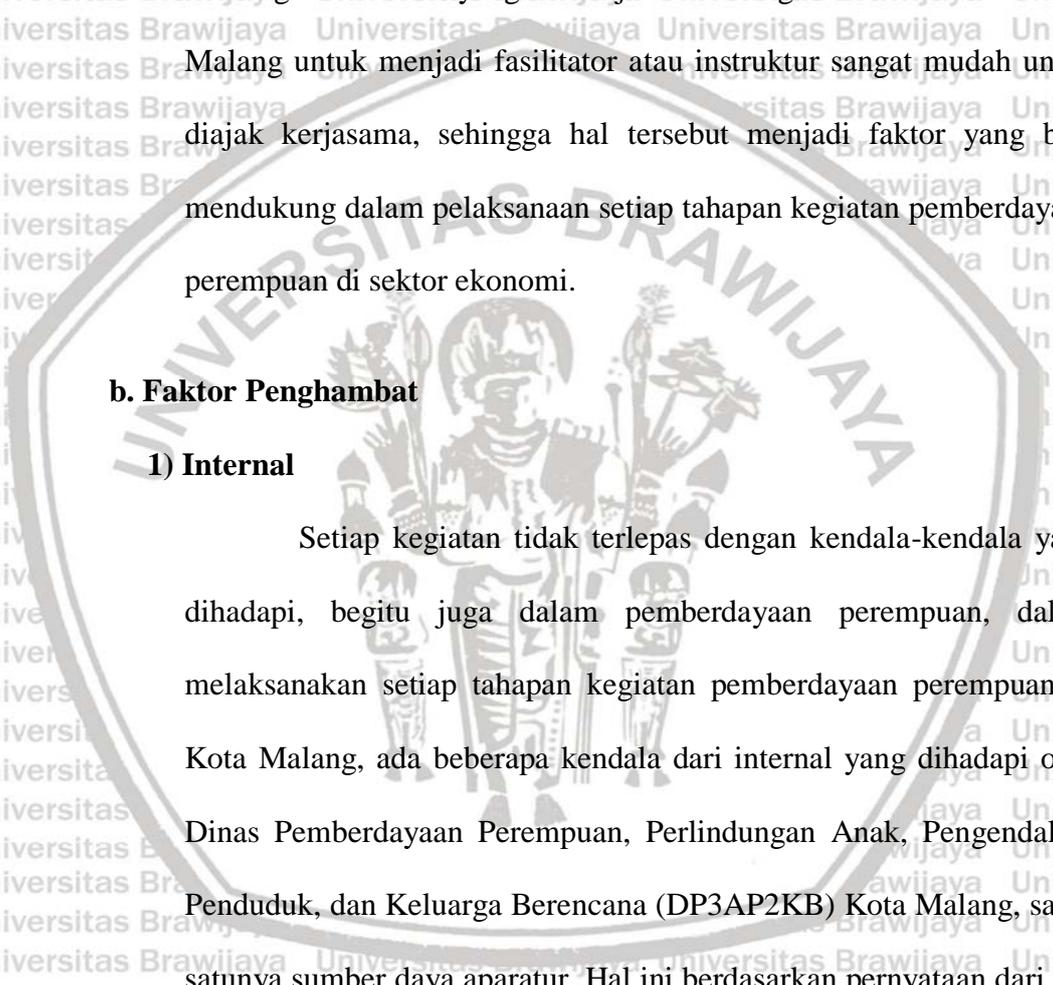
Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kota Malang sebagai berikut: “kalau di malang luar biasa, saya di pemberdayaan perempuan dan melihat perkembangan perempuan sangat luar biasa, dan potensinya juga luar biasa, (wawancara pada tanggal 11 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang)”. Tingginya minat berpartisipasi masyarakat perempuan di Kota Malang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan setiap tahapan kegiatan pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi. Pernyataan di atas didukung oleh pernyataan Ibu Maria selaku Kepala Seksi Edukasi dan Partisipasi Perempuan DP3AP2KB Kota Malang sebagai berikut:

“Kalau partisipasi dalam setiap kegiatan sudah baik mas, misal kegiatan pemilihan wanita inspiratif kemarin, banyak yang ikut juga, nah saat kita undang juga datang, jadi kalau menurut saya partisipasinya sudah baik (wawancara pada tanggal 21 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang)”

Masyarakat perempuan Kota Malang mempunyai minat berpartisipasi dalam setiap kegiatan di tahapan pemberdayaan perempuan tinggi, sehingga ini menjadi faktor pendukung DP3AP2KB Kota Malang untuk melaksanakan tahapan kegiatan pemberdayaan perempuan sektor ekonomi.

Selain itu lembaga eksternal juga menjadi faktor pendukung dalam kegiatan pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi, hal ini berdasarkan pernyataan dari Ibu Andayun selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kota Malang sebagai berikut:

“Ya, untuk lembaga diluar yang kita ajak kerjasama, tentunya menjadi suatu nilai tambah bagi mereka, karena diajak

kerjasama oleh kita, saya rasa itu simbiosis mutualisme untuk kami dan mereka, hingga kedepannya masih ingin diajak kerjasama, terkait hal itu jadi kita harus terus-menerus melakukan koordinasi dengan teman-teman terkait, jadi kalau lembaga dari luar itu sangat mau sekali kalau diajak kerjasama (wawancara pada tanggal 22 Mei 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang)”.


Lembaga eksternal yang bekerjasama dengan DP3AP2KB Kota Malang untuk menjadi fasilitator atau instruktur sangat mudah untuk diajak kerjasama, sehingga hal tersebut menjadi faktor yang bisa mendukung dalam pelaksanaan setiap tahapan kegiatan pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi.

b. Faktor Penghambat

1) Internal

Setiap kegiatan tidak terlepas dengan kendala-kendala yang dihadapi, begitu juga dalam pemberdayaan perempuan, dalam melaksanakan setiap tahapan kegiatan pemberdayaan perempuan di Kota Malang, ada beberapa kendala dari internal yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang, salah satunya sumber daya aparatur. Hal ini berdasarkan pernyataan dari Ibu Andayun selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kota Malang sebagai berikut:

“...Ini semua terkendala beberapa hal, sumber daya manusia di kami kurang...(wawancara pada tanggal 11 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang).”

“...Kita di bidang ini kita punya staff Cuma 6 orang tentunya tidak mencukupi untuk satu kota malang, kami ingin karena

masyarakat sudah pinter jadi lebih aktif lagi, ada feedback dari masyarakat (wawancara pada tanggal 11 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang).”

Kendala yang dihadapi oleh DP3AP2KB Kota Malang dalam melaksanakan tahapan kegiatan pemberdayaan perempuan minimnya jumlah sumber daya aparatur di DP3AP2KB Kota Malang yang mendapat tugas melaksanakan pemberdayaan perempuan sektor ekonomi. Di bidang pemberdayaan perempuan DP3AP2KB Kota Malang hanya ada 6 (orang) pegawai, yang terdiri dari 1 (satu) Kepala Bidang, 3 (tiga) Kepala Seksi, dan 2 staf biasa. Mengingat banyaknya jumlah penduduk perempuan di Kota Malang, membuat jumlah pegawai di bidang pemberdayaan perempuan kurang mencukupi, sehingga menjadi penghambat. Pernyataan diatas juga disampaikan oleh Ibu Andayun selaku Kepala Bidang Pemberdayaan perempuan di waktu yang berbeda, berikut pernyataannya:

“Kalau dari anggaran itu kan klasik ya saya rasa, jadi kalau di kita sumber daya manusia, kalau di bidang kami Cuma 6, kalau dengan SDM yang kita punyai saya rasa tidak cukup, sdm itu bukan berarti hanya menangani peng SPJ an tidak,tapi ketika dalam proses pemberdayaan mereka harus punya kompetensinya, sedangkan kita mutasi aja tidak jelas, maksudnya harusny dibutuhkan seperti misalnya bu wiwik, sarjananya SKM, harusnya berkuat dalam dunia kesehatan masyarakat, bukan di kita, nah kompetensinya kan gak cocok. Sekarang logikanya aja, kalau mau maksimal seharusnya saya punya staf minimal 5 orang, jadi setiap kecamatan dipegang satu orang (wawancara tanggal 22 Mei 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang)”.

Terbatasnya sumber daya manusia di bidang pemberdayaan perempuan menjadi kendala dalam proses pelaksanaan, selain itu

kompetensi yang dimiliki tidak sesuai dengan yang dibutuhkan juga menjadi kendala tersendiri dalam proses pelaksanaan setiap tahapan kegiatan pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi. Pernyataan diatas didukung oleh pernyataan dari Ibu Maria selaku Kepala Seksi Edukasi dan Partisipasi Perempuan DP3AP2KB Kota Malang, sebagai berikut: “soalnya kan SDM kita di bidang pemberdayaan perempuan Cuma 6 orang (wawancara pada tanggal 21 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang)”. Terbatasnya jumlah pegawai di bidang pemberdayaan perempuan yaitu hanya 6 (enam) orang menjadi penghambat dalam melaksanakan tahapan pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi. Lebih lanjut Ibu Andayun selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kota Malang menambahkan bahwa minimnya akses marketing dari dinas juga menjadi penghambat, berikut pernyataanya:

“Jadi kita sudah tidak punya akses, kan yang paling dominan Cuma dua, permodalan dan marketing, kalau permodalan kita bisa menyampaikan lewat perbankan, nah kalau marketing kita agak susah, karena di dinas terbatas akses (wawancara pada tanggal 11 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang).”

Terbatasnya akses pemasaran DP3AP2KB Kota Malang ke eksternal menjadi penghambat DP3AP2KB Kota Malang dalam membantu mendampingi masyarakat untuk memperluas pasar. Pernyataan diatas didukung oleh pernyataan Ibu Maria selaku Kepala Seksi Edukasi dan Partisipasi Perempuan DP3AP2KB Kota Malang, berikut pernyataanya: “kalau masalah jaringan buat mengembangkan usaha,

trus pemasaran kita sangat terbatas akses mas, biasanya mereka sendiri yang mengembangkan jaringannya, yang memasarkannya.

(wawancara pada tanggal 21 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang)”. Terbatasnya akses dinas ke eksternal dalam membantu memasarkan dan mengembangkan jaringan menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan pendampingan kepada masyarakat perempuan. Faktor lain yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan setiap tahapan kegiatan pemberdayaan perempuan di DP3AP2KB Kota Malang adalah faktor terbatasnya waktu dan biaya, hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Andayun selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kota Malang, sebagai berikut:

“Kalau disini konsep dari pelatihannya belum sampek kepada tahap professional, karena faktor waktu dan biaya, kalau disini kita pakai konsep masih pengenalan, sampai pada tahap atau level satu dan dua, jadi kalau yang sudah professional itu di perindustrian, jadi kita program kerjanya berbeda dengan disperindag (wawancara tanggal 18 April 2018 di kantor DP3AP2KB Kota Malang)”.

Terbatasnya waktu untuk pemberdayaan perempuan menjadi faktor penghambat di internal, selain itu biaya yang terbatas di DP3AP2KB Kota Malang untuk kegiatan pemberdayaan perempuan juga menjadi penghambat dalam pelaksanaan setiap tahapan pemberdayaan perempuan di Kota Malang.

2) Eksternal

Selain faktor internal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tahapan kegiatan pemberdayaan perempuan sektor

ekonomi DP3AP2KB Kota Malang, ada juga beberapa faktor penghambat dari eksternal, seperti masyarakat perempuan di Kota Malang. Hal ini berdasarkan pernyataan dari Ibu Andayun selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kota Malang sebagai berikut:

“...Iya kalau pas rumahnya berdekatan, dan itu pinginnya seperti itu berkelanjutan tetapi, ini semua terkendala beberapa hal, sumber daya manusia di kami kurang, sumber daya manusia di lembaga tersebut juga kurang, atau masyarakat masih pasif atau menunggu saja, kurang aktif, jadi faktor yang sering kali kita temukan kalau orang kan gampang nyalahkan pemerintah, karena sudah oke kita nunggu laporan, bu kita pingin di lingkungan saya karena orang-orangnya aktif di bidang ini bagaimana kalau ini, kita kan gak tau, karena keterbatasan kami jadi kita perlu laporan juga dari masyarakat...(wawancara pada tanggal 11 April 2017 di kantor DP3AP2KB Kota Malang).”

Masyarakat perempuan Kota Malang masih pasif, hanya menunggu saja, kurang aktif, sehingga DP3AP2KB Kota Malang dalam melaksanakan dari tahapan-tahapan pemberdayaan perempuan sektor ekonomi mengalami kesulitan. Selain itu terbatasnya sumber daya manusia di lembaga eksternal yang bekerjasama dengan DP3AP2KB Kota Malang, bekerjasama dalam hal menjadi fasilitator pemberdayaan perempuan juga menjadi faktor penghambat dari eksternal dalam menjalankan setiap tahapan pemberdayaan perempuan sektor ekonomi di Kota Malang.

C. Analisis Data

1. Pemberdayaan Perempuan

a. Seleksi Lokasi/Wilayah

Menurut Mardikanto dan Soebiato (2015:125) yang mengutip dari Tim Delivery bahwa seleksi lokasi dilakukan sesuai dengan kriteria yang sudah disepakati oleh lembaga, pihak-pihak terkait dan masyarakat. Penetapan kriteria dalam seleksi lokasi agar pemilihan lokasi dapat dilakukan sebaik mungkin, sehingga tujuan dari pemberdayaan perempuan bisa tercapai dengan apa yang diharapkan. Pemilihan lokasi pemberdayaan perempuan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang dilakukan dengan 2 (dua) cara, hal itu disesuaikan dengan program dan kegiatan yang direncanakan.

Pertama, ada pemilihan lokasi yang dilakukan dengan penunjukan langsung oleh DP3AP2KB Kota Malang, seperti pemilihan lokasi untuk kegiatan pemberdayaan perempuan pengembang ekonomi lokal (P3EL), selain itu kegiatan pembinaan perempuan kepala keluarga sekota Malang juga dilakukan penunjukan lokasi berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan yaitu daerah kumuh, masyarakat perempuan yang dalam kondisi ekonomi di lemah, dan juga menggunakan kriteria kepadatan penduduk di wilayahnya. Penentuan kriteria pemilihan lokasi pemberdayaan perempuan seharusnya melibatkan lembaga, masyarakat, pihak-pihak terkait, namun kriteria pemilihan lokasi untuk kegiatan

pemberdayaan perempuan tidak melibatkan masyarakat dan pihak-pihak yang terkait, karena kriteria untuk pemilihan lokasi sudah ditentukan berdasarkan instruksi dari provinsi dan kriteria dari DP3AP2KB Kota Malang.

Kedua, ada kegiatan yang pemilihan atau seleksi lokasi pemberdayaan perempuan dilakukan menggunakan sistim dari bawah atau dari masyarakat, diantaranya kegiatan pelatihan-pelatihan yang dilakukan. Pemilihan lokasi buat kegiatan pelatihan seperti pelatihan ketrampilan dilakukan bersinergi dengan kegiatan musyawarah rencana pembangunan kelurahan (musrenbang kelurahan). Lokasi ditentukan melihat dari aspirasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang kelurahan.

Banyak pihak yang terlibat dalam kegiatan musrenbang mulai dari masyarakat perempuan, ketua Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), organisasi dan komunitas perempuan yang ada di kelurahan seperti pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), dan pemerintah kelurahan sendiri. Namun dalam proses pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan pemilihan lokasi yang digunakan tidak berdasarkan hasil kajian aspirasi hasil musrenbang kelurahan. Saat kegiatan pemberdayaan perempuan dilakukan seperti kegiatan pelatihan ketrampilan kerja, lokasinya menjadi satu untuk keseluruhan perempuan di Kota Malang. Misal kan kegiatan pemberdayaan perempuan dilakukan di hotel atau aula DP3AP2KB Kota Malang. Jadi pemberdayaan perempuan tidak dilakukan di lokasi yang berbeda setiap kegiatannya

berdasarkan hasil musrenbang, tetapi dilakukan menjadi satu dalam satu lokasi dan mengundang masyarakat perempuan Kota Malang.

Proses pelaksanaan seleksi lokasi mulai dari penentuan kriteria dan pelaksanaan seleksi lokasi kegiatan pemberdayaan perempuan seharusnya selalu melibatkan masyarakat, karena menurut Mardikanto dan Soebiato (2015:105) bahwa kegiatan pemberdayaan harus mempunyai prinsip mengerjakan, yang berarti kegiatan pemberdayaan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk menerapkan dan mengerjakan sesuatu. Namun pada kenyataannya masyarakat perempuan di Kota Malang belum sepenuhnya dilibatkan dalam seleksi lokasi baik dalam penentuan kriteria maupun pelaksanaan lokasi.

b. Sosialisasi Pemberdayaan

Menurut Mardikanto dan Soebiato (2015:125) yang mengutip dari Tim Delivery bahwa kegiatan sosialisasi merupakan upaya mengkomunikasikan kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat. Adanya sosialisasi dapat membantu masyarakat dan pihak terkait dalam meningkatkan pemahaman tentang program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang setiap sebelum dilaksanakan kegiatan pemberdayaan perempuan sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat perempuan di Kota Malang. Sosialisasi yang dilakukan DP3AP2KB Kota Malang di sela-sela kegiatan pertemuan yang

dilakukan dengan masyarakat perempuan. Selain di dalam pertemuan-pertemuan, sosialisasi juga dilakukan saat diluar kegiatan baik kegiatan pertemuan dengan masyarakat atau kegiatan pemberdayaan perempuan.

Sosialisasi juga dilakukan dengan meminta bantuan kepada penyuluh keluarga berencana (KB) yang berada di setiap kelurahan untuk menyebarkan informasi mengenai kegiatan pemberdayaan perempuan.

DP3AP2KB Kota Malang juga menyebarkan informasi atau melakukan sosialisasi kegiatan pemberdayaan perempuan melalui komunitas-komunitas dan organisasi perempuan yang menjadi binaan DP3AP2KB Kota Malang, dengan cara datang ke komunitas dan organisasi yang bersangkutan. Selain itu juga dilakukan sosialisasi dengan memanfaatkan teknologi dan informasi dengan cara menyebarkan informasi melalui *whatsapp*, facebook, dan email. Sosialisasi juga dilakukan secara struktural ke bawah, dengan meminta bantuan kepada kelurahan-kelurahan di Kota Malang. Proses sosialisasi kegiatan pemberdayaan perempuan yang direncanakan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pegawai internal dinas, masyarakat yang berada di komunitas, penyuluh KB di setiap kelurahan, dan pemerintah kelurahan.

Sasaran dari sosialisasi kegiatan pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kota Malang kepada seluruh perempuan di Kota Malang, namun ada beberapa kegiatan pemberdayaan perempuan yang ditingkat menengah-sasarannya adalah masyarakat yang sudah mempunyai dasar dari kegiatannya. Dilihat dari sasaran sosialisasi yang

adalah masyarakat secara keseluruhan, seharusnya informasi mengenai kegiatan pemberdayaan perempuan dari DP3AP2KB diterima oleh masyarakat perempuan di Kota Malang. Namun berdasarkan hasil peneliti kepada beberapa masyarakat perempuan memang ada yang sudah mendapatkan informasi, hal ini karena perempuan tersebut juga menjadi pengurus PKK di kelurahan, sedangkan perempuan yang tidak menjadi pengurus di kantor kelurahan belum sepenuhnya mendapatkan sosialisasi terkait kegiatan pemberdayaan perempuan dari DP3AP2KB Kota Malang.

Sosialisasi tentang rencana program dan kegiatan pemberdayaan perempuan yang akan dilakukan, selain di sosialisasikan kepada masyarakat juga dilakukan kepada pegawai internal DP3AP2KB, hal tersebut dilakukan agar tidak ada kesalahan komunikasi di internal DP3AP2KB. Proses komunikasi di internal dinas dilakukan saat diawal penyusunan program di DP3AP2KB Kota Malang, selain itu juga dilakukan secara informal, saat bertemu dengan pegawai DP3AP2KB juga disampaikan kegiatan pemberdayaan perempuan yang akan dilakukan.

Menurut Mardikanto dan Soebiato (2015:125) yang mengutip dari Tim Delivery bahwa sosialisasi merupakan kegiatan yang penting karena akan menentukan minat atau ketertarikan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan. Mengingat sasaran pemberdayaan perempuan dari

DP3AP2KB Kota Malang adalah seluruh perempuan di Kota Malang, maka sosialisasi perlu dilakukan lebih menyeluruh dan masih kepada masyarakat perempuan, karena berdasarkan hasil dilapangan bahwa DP3AP2KB Kota Malang sudah melakukan sosialisasi, namun masih ada masyarakat perempuan yang belum mengetahui kegiatan pemberdayaan perempuan dari DP3AP2KB Kota Malang.

c. Proses Pemberdayaan Perempuan

1. Mengidentifikasi dan Mengkaji Potensi Wilayah

Menurut Mardikanto dan Soebiato (2015:126) yang mengutip dari Tim Delivery bahwa mengidentifikasi dan mengkaji potensi lokasi atau wilayah, permasalahan, serta peluang-peluangnya, proses ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat perempuan, sehingga masyarakat bisa percaya diri dalam menganalisa keadaanya. Tahap ini diharapkan dapat diperoleh gambaran keadaan masyarakat perempuan. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang sebelum merencanakan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan melakukan indentifikasi dan pengkajian terhadap potensi dan permasalahan di wilayah. Pengkajian potensi dan permasalahan dilakukan dengan cara menganalisis dari data *base* perempuan yang sudah dibuat sebelumnya, dari data *base* tersebut akan terlihat gambaran keadaan dan permasalahan perempuan di Kota Malang,

yang nantinya untuk dibuat kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan perempuan.

Selain identifikasi dan pengkajian potensi dan permasalahan wilayah yang dilakukan berdasarkan data *base* perempuan, pengkajian potensi dan permasalahan wilayah juga dilakukan dengan melibatkan masyarakat perempuan. Pengkajian ini dilakukan sejalan dengan kegiatan musrenbang kelurahan yang dilakukan, dalam proses kegiatan musrenbang kelurahan, sebelum ketua rukun tetangga (RT) mengusulkan kegiatan saat musrenbang kelurahan, ketua RT dan masyarakat perempuan melakukan pengkajian terlebih dahulu apa yang menjadi potensi dan permasalahan di wilayahnya, sehingga agenda kegiatan yang diusulkan bisa tepat sasaran.

Kegiatan identifikasi dan pengkajian potensi dan permasalahan wilayah melalui musrenbang kelurahan, melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat perempuan, sebagai masyarakat yang mengetahui potensi dan permasalahan yang sedang dialami di wilayahnya, ketua rukun tetangga (RT), ketua rukun warga (RW), organisasi-organisasi dan komunitas perempuan di kelurahannya seperti pembina kesejahteraan keluarga (PKK), dan aparat pemerintah kelurahan. Identifikasi dan kajian potensi dan permasalahan wilayah yang dilakukan DP3AP2KB Kota Malang seharusnya selalu melibatkan masyarakat perempuan, karena menurut Mardikanto dan Soebiato (2015: 105) bahwa prinsip kegiatan pemberdayaan salah

satunya adalah harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk menerapkan dan mengerjakan sesuatu. Namun kenyataan di lapangan bahwa, perempuan Kota Malang belum sepenuhnya dilibatkan dalam kegiatan mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah karena pengkajian potensi dan permasalahan wilayah juga dilakukan hanya berdasarkan data *base* perempuan.

2. Menyusun Rencana Kegiatan Kelompok

Menurut Mardikanto dan Soebiato (2015:126) yang mengutip dari Tim Delivery bahwa dalam penyusunan rencana kerja kegiatan kelompok untuk pemberdayaan perempuan harus melibatkan masyarakat perempuan di Kota Malang sampai tahap pengembangan rencana kegiatan serta pengorganisasian pelaksanaan dari kegiatan tersebut. DP3AP2KB Kota Malang dalam penyusunan rencana kegiatan kelompok pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kota Malang mengacu pada fenomenal nasional, fenomena di Jawa Timur, dan fenomena perempuan atau keadaan perempuan di Kota Malang. Penyusunan rencana kegiatan kelompok tidak hanya mengacu fenomena di nasional, regional dan lokal, tetapi juga disinergiskan dengan kegiatan musrenbang kelurahan, sehingga mengkolaborasikan antara hasil dari musrenbang kelurahan dan kajian terhadap fenomena perempuan yang dilakukan DP3AP2KB Kota Malang.

Penyusunan rencana kegiatan kelompok karena melalui musrenbang kelurahan, sehingga melibatkan berbagai pihak mulai dari masyarakat perempuan, organisasi dan komunitas perempuan di kelurahan seperti pembina kesejahteraan keluarga (PKK), ketua rukun tetangga (RT), ketua rukun warga (RW), dan aparat kelurahan. Perlibatan masyarakat dan beberapa pihak seperti ketua RT. Ketua RW dan organisasi atau komunitas perempuan yang terkait dalam penyusunan rencana kegiatan kelompok pemberdayaan perempuan hanya sebatas pengusulan saat musrenbang di kelurahan. Sedangkan penyusunan rencana kegiatan kelompok pemberdayaan perempuan di internal DP3AP2KB Kota Malang tidak mengikutsertakan masyarakat.

Masyarakat, komunitas dan pihak lain yang terkait hanya sebatas mengusulkan apa yang menjadi permasalahan, potensi dan kebutuhan perempuan di Kota Malang, fasilitator pemberdayaan perempuan juga tidak dilibatkan dalam penyusunan rencana kegiatan kelompok di DP3AP2KB Kota Malang, untuk langkah selanjutnya yaitu analisis untuk dijadikan kebijakan, program, dan kegiatan hanya melibatkan internal kepegawaian DP3AP2KB Kota Malang. Fasilitator pemberdayaan perempuan baru akan dilibatkan setelah program pemberdayaan terbentuk, yaitu saat dalam penyusunan konsep kegiatan kelompok pemberdayaan perempuan yang akan dilaksanakan oleh DP3AP2KB Kota Malang. Padahal menurut

Mardikanto dan Soebiato (2015: 105) bahwa salah satu prinsip kegiatan pemberdayaan adalah harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk menerapkan dan mengerjakan sesuatu. Masyarakat perempuan, dan pihak-pihak terkait seharusnya dilibatkan dalam setiap agenda penyusunan rencana kegiatan kelompok pemberdayaan perempuan, karena yang mengetahui secara jelas dan pasti tentang keadaan, potensi, dan permasalahan perempuan, adalah masyarakat perempuan sendiri. Jadi bukan lagi masyarakat perempuan menjadi obyek dalam penyusunan rencana kegiatan kelompok, tetapi menjadi subjek yang dilibatkan dalam setiap penyusunan rencana kegiatan kelompok pemberdayaan perempuan di Kota Malang.

3. Menerapkan Rencana Kegiatan Kelompok

Setelah adanya penyusunan rencana kegiatan kelompok, selanjutnya adalah menerapkan rencana tersebut. Ada beberapa kegiatan pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi di tahun 2017 dari DP3AP2KB Kota Malang, hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan perempuan dan memunculkan pengusaha-pengusaha baru. Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan dengan beberapa kegiatan pemberdayaan diantaranya Pengembangan Kapasitas sumber daya manusia Organisasi Perempuan, pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi perempuan, peningkatan sumber daya manusia bagi perempuan, penilaian peran perempuan inspiratif, dan pembinaan peran perempuan dalam pembangunan di Kota Malang

Selain kegiatan yang sudah di rencanakan di awal tahun dan sudah dianggarkan di anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Malang, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada kegiatan yang sebelumnya belum direncanakan, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja. Kegiatan yang belum di rencanakan di awal tersebut dijalankan menggunakan sistim bekerja sama dengan lembaga lain. Dilihat dari kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan oleh DP3AP2KB baik yang sudah terlaksana atau yang akan dilaksanakan bisa ditarik kesimpulan bahwa kegiatan yang dilakukan menggunakan metode pelatihan partisipatif. Menurut Mardikanto dan Soebiato, (2015: 199-205) bahwa pelatihan partisipatif merupakan metode yang melakukan pelatihan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dilaksanakan melalui pelatihan-pelatihan, metode ini diawali dengan penelusuran tentang apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. pelatihan yang dilakukan DP3AP2KB Kota Malang berdasarkan kajian atau penelusuran mengenai apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat perempuan Kota Malang, melalui kegiatan musrenbang kelurahan.

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi yang dilaksanakan DP3AP2KB Kota Malang tidak seluruhnya bisa diikuti oleh masyarakat perempuan, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, agar bisa mengikuti kegiatan tersebut, yaitu perempuan yang berdomisili di Kota Malang, mempunyai

kondisi ekonomi pra sejahtera, dan bukan pegawai negeri sipil (PNS).

Setelah memenuhi kriteria, masyarakat perempuan baru bisa mengikuti kegiatan pemberdayaan perempuan dengan cara langsung mendaftar ke DP3AP2KB.

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan DP3AP2KB Kota Malang di bantu dengan fasilitator yang sudah ditunjuk. Fasilitator dalam kegiatan pemberdayaan perempuan yang diselenggarakan oleh DP3AP2KB berasal dari lembaga eksternal, hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan pertimbangan profesionalitas setiap bidang yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Ada beberapa kriteria yang ditentukan dalam pemilihan fasilitator untuk kegiatan pemberdayaan perempuan dari DP3AP2KB Kota Malang, yaitu berdasarkan pada kompetensi atau kemampuan yang dimiliki dan juga nama besar dari lembaga. Konsep fasilitator yang mendampingi dalam kegiatan pemberdayaan masih sebatas menjadi atau instruktur, tidak mendampingi secara berkelanjutan. Fasilitator atau instruktur dalam setiap kegiatan pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi jumlahnya ditentukan berdasarkan kebutuhan dan disesuaikan juga dengan anggaran yang tersedia, setiap kegiatan pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kota Malang jumlah fasilitatornya berbeda-beda.

Menurut Mardikanto dan Soebiato (2015:140) bahwa fasilitator pemberdayaan perempuan mempunyai peran

menyampaikan inovasi dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh masyarakat perempuan, dan menjadi jembatan penghubung antara pemerintah dengan masyarakat. Namun kenyataan dilapangan bahwa fasilitator pemberdayaan perempuan DP3AP2KB Kota Malang perannya masih sebatas sebagai pemateri atau instruktur di setiap kegiatan pemberdayaan. Lebih lanjut menurut Mardikanto dan Soebiato (2015:142-143) yang mengutip pendapat Mrdikanto bahwa fasilitator mempunyai peran edukasi atau sebagai pendidik, peran diseminasi inovasi atau penyebarluasan inovasi dari luar ke dalam dan dari dalam ke luar, peran fasilitasi atau memberi petunjuk kemudahan kepada masyarakat dan peran meditasi antar pemangku kepentingan pembangunan, peran konsultasi atau sebagai penasehat, peran advokasi, peran supervisi atau sebagai supervisor advokasi dan pemberdayaan masyarakat, dan peran pemantauan dan evaluasi mulai dari perumusan, proses, dan hasil setelah kegiatan pemberdayaan. Dilihat dari peran fasilitator tersebut bahwa kenyataan dilapangan, fasilitator pemberdayaan perempuan dari DP3AP2KB Kota Malang, karena hanya sebatas pemberi materi dan konsultasi, maka fasilitator hanya berperan edukasi dan konsultasi, seharusnya fasilitator pemberdayaan perempuan DP3AP2KB Kota Malang juga mempunyai peran diseminasi inovasi, fasilitasi, advokasi, supervise dan peran pemantauan dan evaluasi, jadi tidak sebatas memberikan pembelajaran dan konsultasi.

Partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi yang diselenggarakan oleh DP3AP2KB sudah baik. Ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kota Malang untuk menjaga agar semangat partisipasi dan motivasi perempuan untuk berkembang selalu tinggi, diantaranya: selalu memberikan motivasi-motivasi di tengah-tengah kegiatan yang dilakukan dan juga selalu memberikan pembelajaran. Selain itu juga diadakannya kegiatan seperti pemilihan perempuan inspiratif, untuk mengapresiasi perempuan di Kota Malang yang sudah berkontribusi untuk masyarakat sekitar dan juga diikuti sertakan pelatihan dan pameran di luar kota.

4. Memantau Proses dan Hasil Kegiatan

Menurut Mardikanto dan Soebiato (2015:126) yang mengutip dari Tim Delivery memantau proses dan hasil kegiatan dilakukan secara terus menerus dan secara partisipatif, dengan melibatkan masyarakat perempuan. Pemantauan ini dilakukan terhadap keseluruhan tahapan pemberdayaan masyarakat, agar proses pemberdayaan berjalan dengan berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau yang menjadi tujuan. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang melakukan pemantauan kepada masyarakat perempuan di Kota Malang, namun pemantauan tidak bisa dilakukan secara keseluruhan satu persatu

perempuan, hal ini dikarenakan jumlah masyarakat perempuan yang mengikuti pemberdayaan perempuan cukup banyak sehingga pemantauan yang dilakukan dengan cara partisipatif.

Masyarakat perempuan diberikan kesempatan berinteraksi lebih lanjut dengan pegawai DP3AP2KB Kota Malang. DP3AP2KB Kota Malang melakukan pemantauan dengan cara mengadakan kegiatan lomba dan gelar produk tentang kegiatan pemberdayaan perempuan yang sebelumnya dilakukan. Pengadaan kegiatan lomba tersebut dimaksudkan untuk memantau sejauh mana masyarakat perempuan berkembang setelah adanya kegiatan pemberdayaan perempuan dari DP3AP2KB Kota Malang.

Pemantauan kepada masyarakat perempuan yang mendapatkan pemberdayaan perempuan juga dilakukan dengan cara informal. Setiap kegiatan monitoring atau pemantauan yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kota Malang, fasilitator atau instruktur yang sebelumnya menjadi pemateri tidak dilibatkan dalam hal ini.

Pemantauan yang dilakukan hanya melibatkan pegawai internal DP3AP2KB Kota Malang saja tanpa melibatkan fasilitator. Namun komunikasi antara DP3AP2KB Kota Malang dengan fasilitator tetap terjaga, hal ini dilakukan apabila dalam proses pemantauan perkembangan masyarakat perempuan ada kendala, bisa dikomunikasikan dengan fasilitator.

Jadi DP3AP2KB Kota Malang sudah melakukan pemantauan baik dari segi proses dan hasil setelah adanya kegiatan pemberdayaan perempuan, namun pemantauan tidak dilakukan secara terus menerus sampai masyarakat perempuan di Kota Malang bisa mandiri atau bisa meningkatkan pendapatan. Menurut Mardikanto dan Soebiato (2015:126) yang mengutip dari Tim Delivery pemantauan proses dan hasil harus dilakukan secara terus menerus dan partisipatif atau melibatkan berbagai pihak terutama masyarakat perempuan. Pemantauan yang dilakukan juga tidak melibatkan masyarakat, hanya pegawai internal DP3AP2KB Kota Malang, seharusnya ada keterlibatan masyarakat dalam pemantauan proses dan hasil pemberdayaan perempuan, karena menurut Mardikanto dan Soebiato (2015: 105) bahwa prinsip kegiatan pemberdayaan salah satunya adalah harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk menerapkan dan mengerjakan sesuatu. Dan juga mengingat jumlah sumber daya aparatur di DP3AP2KB Kota Malang sedikit yaitu hanya 6 (enam) orang.

d. Pemandirian Masyarakat

Menurut Mardikanto dan Soebiato (2015:126) yang mengutip dari Tim Delivery pemandirian masyarakat mengarah pada pendampingan untuk menyiapkan masyarakat agar benar-benar mampu mengelola sendiri kegiatannya. Proses pemberdayaan berkaitan dengan faktor internal dan eksternal. Internal berkaitan dengan masyarakat nya

sendiri dan faktor eksternal berikatan dengan pendampingnya atau suatu tim fasilitator yang berasal dari multidisiplin, dalam operasionalnya inisiatif tim pemberdayaan masyarakat secara perlahan akan dikurangi dan akhirnya berhenti. DP3AP2KB Kota Malang setelah adanya proses pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi belum ada program atau kegiatan pendampingan secara berkelanjutan, karena konsep pemberdayaan yang digunakan di DP3AP2KB Kota Malang masih tahap dasar. Namun masyarakat yang menginginkan diberikan pendampingan secara berkelanjutan untuk memulai usaha bisa mengajukan diri atau mengusulkan kepada DP3AP2KB Kota Malang, agar bisa didampingi secara berkelanjutan oleh fasilitator.

Pendampingan yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kota Malang membantu dalam proses akses pencarian modal untuk pendanaan usaha. Adanya Permendagri nomor 14 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, membuat adanya pelarangan pemberian bantuan modal uang *cash* kepada masyarakat, sehingga DP3AP2KB Kota Malang tidak diperbolehkan memberikan modal dalam bentuk uang *cash*, pendampingan yang dilakukan dengan cara membantu berkoordinasi dengan pihak perbankan terkait yang bisa mengeluarkan dana. Pendampingan masih sebatas pendampingan dalam mendapatkan modal, untuk pendampingan

pemasaran dari DP3AP2KB juga tidak bisa membantu mendampingi dan memasarkan karena terbatasnya akses untuk pemasaran produk.

Menurut Mardikanto dan Soebiato (2015:127) yang mengutip dari Tim Delivery bahwa setelah adanya proses pemberdayaan perempuan harus ada pematangan perempuan, pematangan yang dimaksud disini adalah pendampingan untuk menyiapkan masyarakat perempuan agar mampu mengelola sendiri kegiatannya. Berdasarkan hasil dilapangan bahwa DP3AP2KB Kota Malang belum ada program atau kegiatan pendampingan berkelanjutan yang sudah direncanakan, sehingga tidak ada fasilitator yang dibentuk untuk mendampingi masyarakat secara berkelanjutan. Pendampingan yang dilakukan hanya sebatas membantu memberikan akses untuk mendapatkan modal kepada bank. Belum ada kegiatan pendampingan yang secara terus menerus kepada masyarakat perempuan sampai masyarakat perempuan bisa mengatur sendiri kegiatannya atau sampai mandiri.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat

a. Faktor Pendukung

1) Internal

Setiap pelaksanaan tahapan kegiatan pemberdayaan perempuan tidak lepas dengan faktor-faktor yang mendukung baik dari internal DP3AP2KB maupun dari eksternal. Ada beberapa faktor di internal dinas yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan setiap tahapan kegiatan pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) diantaranya pertama tersedianya sarana prasarana yang bisa digunakan dalam kegiatan pemberdayaan perempuan seperti gedung pertemuan yang dilengkapi dengan kursi, sound, dan proyektor. Adanya sarana prasarana yang memadai bisa menjadi faktor pendukung dalam kegiatan pemberdayaan perempuan di DP3AP2KB Kota Malang, karena dengan adanya sarana-prasarana seperti gedung dan yang lainnya DP3AP2KB tidak bingung dalam mencari tempat dan perlengkapannya dalam setiap pelaksanaan tahapan kegiatan pemberdayaan perempuan.

Selain sarana-prasarana yang tersedia, faktor pendukung di internal DP3AP2KB Kota Malang adalah komitmen dari kepala dinas untuk melaksanakan pemberdayaan perempuan di Kota Malang. Adanya komitmen yang kuat untuk memandirikan perempuan di Kota Malang melalui pemberdayaan perempuan akan mempermudah pelaksanaan dari setiap tahapan kegiatan pemberdayaan perempuan.

Karena dengan adanya komitmen dari kepala dinas setiap kegiatan yang akan dilakukan akan mendapat dukungan penuh dari kepala dinas.

2) Eksternal

Di setiap pelaksanaan tahapan kegiatan pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi selain ada beberapa faktor yang

mendukung dari internal DP3AP2KB Kota Malang, ada juga faktor-faktor yang menjadi pendukung dari eksternal dinas. Faktor-faktor yang mendukung di luar dinas seperti minat partisipasi masyarakat perempuan Kota Malang yang tinggi dalam setiap tahapan kegiatan pemberdayaan perempuan sektor ekonomi. Tingginya minat berpartisipasi masyarakat perempuan di Kota Malang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan setiap tahapan kegiatan pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi.

Setiap kegiatan pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi dibutuhkan partisipasi masyarakat perempuan di Kota Malang, karena yang menjadi objek sasaran dari pemberdayaan perempuan sektor ekonomi yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kota Malang adalah perempuan Kota Malang. Tidak adanya partisipasi dari masyarakat perempuan dalam setiap tahapan kegiatan pemberdayaan perempuan sektor ekonomi akan membuat menghambat pelaksanaan tersebut, sehingga dengan minat berpartisipasi masyarakat perempuan yang tinggi menjadi faktor pendukung yang dari eksternal DP3AP2KB Kota Malang. Selain minat partisipasi masyarakat perempuan yang tinggi yang menjadi faktor pendukung dari eksternal DP3AP2KB Kota Malang adalah lembaga luar yang mudah diajak kerjasama. Setiap kegiatan pemberdayaan perempuan sektor ekonomi, DP3AP2KB Kota Malang mengambil fasilitator atau instruktur dari lembaga luar, dengan mudahnya lembaga luar untuk diajak kerjasama dalam setiap

kegiatan pemberdayaan perempuan disektor ekonomi, hal itu menjadi faktor pendukung yang berasal dari eksternal DP3AP2KB Kota Malang.

b. Faktor Penghambat

1) Internal

Ada faktor yang mendukung dalam setiap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi, ada juga faktor yang menjadi penghambat, di setiap kegiatan tidak terlepas dengan kendala-kendala yang dihadapi, dalam melaksanakan setiap tahapan kegiatan pemberdayaan perempuan sektor ekonomi di Kota Malang, ada beberapa kendala dari internal yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang, diantaranya pertama, sumber daya aparatur DP3AP2KB Kota Malang. Sedikitnya jumlah sumber daya aparatur di DP3AP2KB Kota Malang yang mendapat tugas melaksanakan pemberdayaan perempuan sektor ekonomi menjadi kendala tersendiri dalam setiap kegiatan. Di bidang pemberdayaan perempuan DP3AP2KB Kota Malang hanya ada 6 (orang) pegawai, yang terdiri dari 1 (satu) Kepala Bidang, 3 (tiga) Kepala Seksi, dan 2 staf biasa. Mengingat banyaknya jumlah penduduk perempuan di Kota Malang, membuat jumlah pegawai di bidang pemberdayaan perempuan kurang mencukupi, sehingga sumber daya aparatur di internal DP3AP2KB Kota Malang menjadi

faktor penghambat. Selain itu kompetensi yang dimiliki oleh pegawai di bidang pemberdayaan perempuan juga kurang sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan juga menjadi faktor penghambat.

Selain sumber daya aparatur yang terbatas dan kompetensi yang dimiliki oleh pegawai, terbatasnya akses pemasaran DP3AP2KB Kota Malang ke eksternal juga menjadi penghambat DP3AP2KB Kota Malang dalam membantu mendampingi masyarakat untuk memperluas pasar. Karena marketing sangat penting dalam sebuah usaha, apabila akses untuk pemasaran terbatas, akan sulit untuk mengembangkan usaha, begitu juga dengan DP3AP2KB, karena terbatasnya akses pemasaran, sehingga tidak bisa mendampingi masyarakat untuk memperluas pasar usaha dan jaringan.

2) Eksternal

Selain faktor internal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tahapan kegiatan pemberdayaan perempuan sektor ekonomi DP3AP2KB Kota Malang, ada juga beberapa faktor penghambat dari eksternal. Diantaranya masyarakat perempuan Kota Malang masih pasif, hanya menunggu saja, kurang aktif, sehingga DP3AP2KB Kota Malang dalam melaksanakan dari tahapan-tahapan pemberdayaan perempuan sektor ekonomi mengalami kesulitan. Pasifnya masyarakat perempuan Kota Malang membuat DP3AP2KB Kota Malang harus lebih ekstra aktif dalam menginformasikan segala

sesuatu kepada masyarakat perempuan. Selain itu terbatasnya sumber daya manusia di lembaga eksternal yang bekerjasama dengan DP3AP2KB Kota Malang, bekerjasama dalam hal menjadi fasilitator kegiatan pemberdayaan perempuan juga menjadi faktor penghambat dari eksternal dalam menjalankan setiap tahapan pemberdayaan perempuan sektor ekonomi di Kota Malang. Terbatasnya sumber daya dari lembaga yang menjadi instruktur atau fasilitator dalam setiap kegiatan pemberdayaan perempuan, membuat DP3AP2KB Kota Malang mengalami kesulitan dalam mengatur pembagian fasilitator di setiap kegiatan pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tentang pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi yang dilihat dari tahapan kegiatannya, dari hasil pembahasan dan analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. DP3AP2KB Kota Malang melakukan seleksi lokasi berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan hanya untuk beberapa kegiatan saja seperti kegiatan pembinaan perempuan kepala keluarga dan pembinaan peran perempuan dalam pembangunan, namun penetapan kriteria seleksi lokasi tidak melibatkan masyarakat perempuan dan pihak-pihak yang terkait. Selain itu DP3AP2KB Kota Malang tidak melakukan seleksi lokasi, karena lokasi yang digunakan untuk kegiatan pemberdayaan perempuan sektor ekonomi terpusat atau menjadi satu di tempat yang sudah ditetapkan oleh DP3AP2KB Kota Malang.
2. DP3AP2KB Kota Malang sudah melakukan sosialisasi tentang rencana kegiatan pemberdayaan di sektor ekonomi melalui kelurahan, penyuluh KB, komunitas-komunitas perempuan, secara langsung kepada masyarakat, dan juga melalui media elektronik seperti facebook, whatsapp, dan email. Namun sosialisasi yang dilakukan belum menyeluruh, ada masyarakat perempuan yang masih belum mengetahui atau mendapat informasi mengenai kegiatan pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi.

3. DP3AP2KB Kota Malang melakukan identifikasi dan kajian potensi wilayah berbarengan dengan kegiatan musrenbang kelurahan yang melibatkan masyarakat perempuan dan pihak-pihak terkait. Namun identifikasi dan kajian potensi wilayah belum sepenuhnya melibatkan masyarakat perempuan, karena ada identifikasi dan kajian potensi wilayah yang dilakukan dengan menganalisis dari data *base* perempuan yang sudah dibuat sebelumnya.

4. Penyusunan rencana kegiatan kelompok yang dilakukan DP3AP2KB Kota Malang melalui 2 (dua) sistem, pertama melalui analisis yang dilakukan berdasarkan fenomena nasional, regional dan lokal dan kedua melalui musrenbang kelurahan, namun masyarakat perempuan dan fasilitator tidak sepenuhnya dilibatkan dalam penyusunan rencana kegiatan kelompok, masyarakat dan fasilitator hanya dilibatkan sampai pengusulan saja, analisis sampai munculnya program dilakukan sendiri oleh internal dinas. Fasilitator dilibatkan kembali saat pembuatan konsep kegiatan setelah program sudah jadi.

5. DP3AP2KB Kota Malang sudah menjalankan beberapa kegiatan yang sudah direncanakan dari awal, seperti pengembangan kapasitas sumber daya manusia organisasi perempuan, pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi perempuan, peningkatan sumber daya manusia bagi perempuan, dan penilaian peran perempuan inspiratif. Penerapan kegiatan pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi menggunakan metode pelatihan partisipatif, pelaksanaan dilakukan dengan bantuan fasilitator dari luar, namun fasilitator

hanya sebatas sebagai pemateri atau instruktur, fasilitator hanya menjalankan peran *edukasi* dan konsultasi. Di setiap kegiatan pemberdayaan partisipasi masyarakat perempuan Kota Malang sudah baik.

6. DP3AP2KB Kota Malang melakukan pemantauan dengan cara mengadakan lomba setelah adanya kegiatan pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi. Pemantuan juga dilakukan secara informal atau saat bertemu dengan masyarakat yang mengikuti pemberdayaan. Namun pemantauan tidak dilakukan secara terus menerus, dan juga dalam kegiatan pemantauan baik proses dan hasil dilakukan tidak melibatkan masyarakat dan fasilitator, hanya dilakukan oleh pegawai internal dinas.

7. DP3AP2KB Kota Malang belum ada program dan kegiatan berkelanjutan untuk pemandirian masyarakat, selain itu pendampingan setelah adanya kegiatan pemberdayaan hanya dilakukan dalam hal membantu mendapatkan modal dari bank, tidak ada agenda pendampingan secara keseluruhan dan berkelanjutan yang sudah direncanakan oleh DP3AP2KB Kota Malang.

Tidak optimalnya hasil dari pemberdayaan perempuan sektor ekonomi di Kota Malang disebabkan dari beberapa faktor diatas, dan juga beberapa faktor yang menjadi penghambat mulai dari sumber daya manusia di bidang pemberdayaan perempuan yang sedikit yaitu hanya 6 (enam) orang, kompetensi pegawai yang mengurus pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi belum mempunyai, terbatasnya akses dinas untuk membantu pemasaran, kurang aktifnya masyarakat perempuan kota malang dan terbatasnya sumber daya manusia dari lembaga eksternal yang bekerjasama dengan DP3AP2KB Kota Malang untuk

menjadi fasilitator atau pemateri. Selain beberapa kendala dan ketidaksesuaian di atas, ada juga yang menjadi faktor pendukung untuk perbaikan kegiatan pemberdayaan perempuan sektor ekonomi di Kota Malang diantaranya kepala dinas yang mempunyai komitmen tinggi dalam memandirikan masyarakat perempuan, sarana prasarana yang sudah tersedia, minat masyarakat perempuan untuk berpartisipasi tinggi, dan antusiasnya dan mudahnya lembaga eksternal untuk diajak kerjasama dalam kegiatan pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi.

B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian di atas, ada beberapa saran dari peneliti agar hasil pemberdayaan perempuan sektor ekonomi yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kota Malang bisa lebih optimal, diantaranya:

1. Masyarakat perempuan dalam pelaksanaan seleksi lokasi atau wilayah untuk kegiatan pemberdayaan perempuan harus selalu dilibatkan, mulai dari penentuan kriteria untuk pemilihan lokasi dan saat pemilihan lokasi, selain itu lokasi pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi harus dibedakan, karena setiap wilayah mempunyai potensi yang berbeda-beda, perbedaan lokasi pemberdayaan ini berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat perempuan di wilayah tersebut.
2. Sosialisasi harus dilakukan lebih menyeluruh dengan memanfaatkan media sosial twitter, website pemerintah Kota Malang, dan media massa seperti TV dan Radio di Kota Malang. Selain itu juga mengintruksikan kepada kelurahan agar tidak langsung menunjuk orang yang mengikuti

pemberdayaan tetapi disosialisasikan kepada seluruh masyarakat perempuan terlebih dahulu, dan juga perlu adanya kerjasama dengan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) untuk melakukan sosialisasi kegiatan.

3. Setiap proses identifikasi dan mengkaji potensi wilayah, penyusunan rencana kegiatan, dan pemantauan proses dan hasil, harus melibatkan masyarakat perempuan dan fasilitator sampai pada tahap pengembangan rencana kegiatan serta pengorganisasian kegiatan karena masyarakat perempuan yang mengetahui kebutuhan dan permasalahan.
4. Membentuk tim fasilitator di setiap kelurahan agar bisa mendampingi masyarakat perempuan secara berkelanjutan, karena pemberdayaan perempuan bukanlah kegiatan yang satu kali selesai, tetapi kegiatan yang berkelanjutan dan terus menerus.
5. Membuat program dan kegiatan pemberdayaan perempuan yang berkelanjutan, tidak hanya satu kali selesai.
6. Bekerjasama dengan lembaga lain seperti lembaga pemberdayaan kelurahan untuk membuat program dan kegiatan pemberdayaan perempuan yang berkelanjutan dan pendampingan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Aflahul. 2016. *Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Malang akan Punya Payung Hukum*. (Online) Diakses pada tanggal 21 Juli 2017 di suryamalang.tribunnews.com/2016/10/05/korban-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-kota-malang-akan-punya-payung-hukum.

Afiffuddin. *Pengantar Administrasi Pembangunan: Konsep, Teori dan Implikasinya di Era Reformasi*. Bandung: Alfabeta.

Badan Pusat Statistik. 2009. *Indeks Pembangunan Manusia 2007-2008*. Jakarta:

Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. 2017. *Indeks Pembangunan Manusia*. (Online) Diakses pada tanggal 21 Mei 2017 di <http://ipm.bps.go.id/page/ipm>.

Badan Pusat Statistik. 2017. *Indeks Pembangunan Manusia Kota Malang 2010-2015*. (Online) Diakses pada tanggal 12 Mei 2017 di <http://ipm.bps.go.id/data/kabkot/metode/baru/3573>.

Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2016. *Indeks Pembangunan Manusia 2015*. (Online) Diakses pada tanggal 21 Mei 2017 di <https://jatim.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/31>.

Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2016. *Tingkat Pengangguran Terbuka*. (Online) Diakses pada tanggal 21 Mei 2017 di <https://jatim.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/11>.

Badan Pusat Statistik Kota Malang. 2015. *Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2014*. (Online) Diakses pada tanggal 21 Mei 2017 di <https://malangkota.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/523>.

Badan Pusat Statistik Kota Malang. 2015. *Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2014*. (Online) Diakses pada tanggal 21 Mei 2017 di <https://malangkota.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/525>.

Barenlitbang. 2017. *7185 Usulan Program Masuk Pembahasan Di Musrenbang 2017 Kota Malang*. (online) diakses tanggal 21 Mei 2017 di

<http://barenlitbang.malangkota.go.id/2017/03/18/7185-usulan-program-masuk-pembahasan-di-musrenbang-2017-kota-malang-warga-malang-setelah-melalui-proses-berjenjang-partisipatif-seja/>.

Bryant, Coralie dan White, Louise. 1989. *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*. Diterjemahkan oleh Simatupang, Rusyanto L. Jakarta: LP3ES.

Budiman, Arief. 2000. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Creswell, John, W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset, Memilih Diantara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dimock, Dimock. 1992. *Administrasi Negara*. Diterjemahkan oleh Husni Thamrin. Jakarta: Rineka Cipta.

Dispendukcapil Kota Malang. 2016. *Rekapitulasi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kota Malang*. (Online) Diakses pada tanggal 20 April 2017 di <http://dispendukcapil.malangkota.go.id/2016/12/lampid-2016/>.

Ernawan, Rizky. 2016. Upaya Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Pembangunan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) dan Masyarakat Kelurahan Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. *Skripsi Administrasi Pemerintahan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya*.

Hadi, Samsul. 2015. *Ngeri, Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan di Malang Makin Menjadi*. (Online) Diakses pada tanggal 21 Juli 2017 di suryamalang.tribunnews.com/2015/09/08/ngeri-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-di-malang-makin-menjadi.

Henry, Nicholas. 1975. *Paradigms of Public Administration*. *Jurnal Wiley on behalf of the American Society for Public Administration*. Vol. 35, No. 4, pp. 378-386.

Humas Kota Malang. 2017. *Peran Perempuan Dalam Pengendalian Inflasi*. (Online) Diakses pada tanggal 21 Juli 2017 di

<http://humas.malangkota.go.id/2017/05/10/peran-perempuan-dalam-pengendalian-inflasi/>

Indrawan, Angga. 2017. *Puluhan Kasus KDRT di Kota Malang Dilatarbelakangi Faktor Ekonomi*. (Online) Diakses pada tanggal 21 Juli 2017 di nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/05/12/optwp2365-puluhan-kasus-kdrt-di-kota-malang-dilatarbelakangi-faktor-ekonomi.

Keban, Yeremias, T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Admistrasi Publik, Konep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.

Laporan Kinerja Tahunan Kota Malang 2014.

Laporan Kinerja Tahunan Kota Malang 2015.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang 2015.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang 2016.

Mardikanto, Totok dan Soebiato, Poerwoko. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Prespektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Munandar, Aris. 2008. Peran Negara Dalam Penguatan Program Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Poelitik Universitas Nasional Jakarta*. Vol. 4 No. 1.

Nugroho, Riant. 2008. *Gender dan Strategi Pengarus-utamaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Pasalong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Radar, Malang. 2016. *Alamak, 29.6060 Pengangguran Ada di Kota Malang*. (Online) Diakses pada tanggal 21 Mei 2017 di

<http://radarmalang.jawapos.com/read/2016/07/28/2014/-alamat-296060-penganggaran-ada-di-kota-malang/2>.

Samin, Rumzi. 2011. Konvergensi Perkembangan Pemikiran Administrasi Publik dan Pembangunan. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMRAH*, Vol. I, No. 1, hal: 1-10.

Sedarmayanti. 2010. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik)*. Bandung: Refika Aditama.

Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.

Soesilo, Nining, I. 2000. *Reformasi Pembangunan dengan Langkah-langkah Manajemen Strategik*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suhendra. 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.

Suryono, Agus. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang: Universitas Negeri Malang Press.

Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: Universitas Brawijaya Press.

Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaya. 1996. *Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan: Perkembangan Teori dan Penerapan*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah.

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Widjajanti, Kesi. 2011. Model Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Semarang*. Vol. 12, No. 1, Hal: 15-27.